

**LAMPIRAN I** : PERATURAN BUPATI SERANG  
Nomor : 56 Tahun 2014  
Tanggal : 15 Desember 2014  
Tentang: Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah  
Kabupaten Serang

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. PPKD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN**

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara itu, yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan juga dijelaskan bahwa suatu entitas pelaporan umumnya memiliki ciri-ciri berikut:

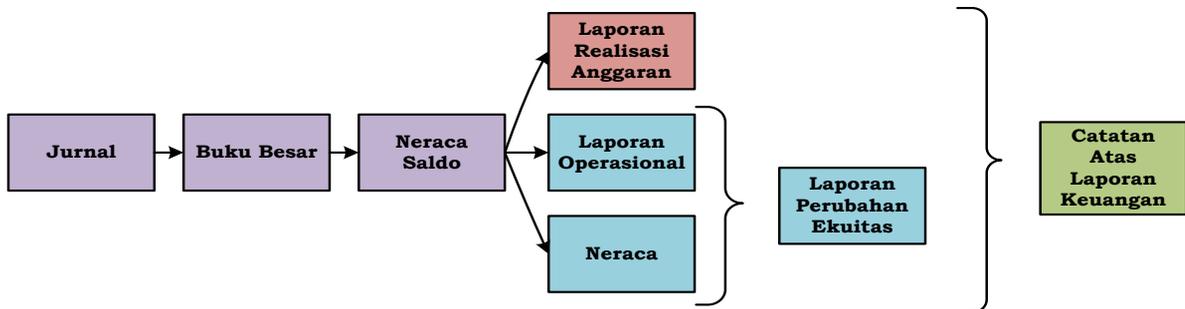
- (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Serang merupakan entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan PPKD. Sebagai entitas akuntansi, PPKD mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD. PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa PPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BUD melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

## B. SIKLUS AKUNTANSI PPKD

Tidak berbeda dengan SKPD, kegiatan akuntansi pada PPKD Kabupaten Serang dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Identifikasi transaksi adalah proses meneliti kejadian atau peristiwa mana saja kejadian yang memiliki dampak pada posisi keuangan. Transaksi tersebut dapat berupa pendapatan-LO atau pendapatan-LRA, beban atau belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Transaksi tersebut harus dipastikan memiliki dokumen sumber yang jelas dan spesifik sebagai dasar pencatatan di tahap berikutnya.

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi secara kronologis pada sebuah buku yang disebut buku jurnal. Pencatatan tersebut harus berdasarkan dokumen sumber yang didapat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dari pihak yang terkait. Penjurnalan menjadi fase yang sangat penting dan krusial karena pada tahap ini ditentukan posisi *debit* atau *kredit* atas setiap akun yang terlibat.

Penjurnalan yang dilakukan merepresentasikan basis akuntansi yang digunakan. Seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual. Namun dalam tahap awal penerapannya, Pemerintah Kabupaten Serang menerapkan basis akrual dengan kebijakan pengakuan masih berdasarkan basis kas, sedangkan pengukuran dan pengungkapan sudah mengikuti kaidah basis akrual.

Namun, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, dibuat pula jurnal-jurnal berbasis kas untuk transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penjurnalan pun akan dilakukan dua kali untuk setiap transaksi, yakni penjurnalan dengan basis akrual dan dengan basis kas.

Di tahap selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting. Proses tersebut bertujuan untuk melakukan update pada buku besar secara periodik dengan cara menyalin informasi transaksi dalam buku jurnal ke buku besar. Transaksi yang sebelumnya dicatat secara kronologis dalam buku jurnal disalin ke dalam format buku besar yang sudah terpilah-pilah berdasarkan akun atau kode rekeningnya. Jadi, setiap akun atau kode rekening memiliki satu buku besar tersendiri.

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo di akhir periode tertentu. Neraca Saldo merupakan sebuah tabel yang menampilkan saldo akhir dari setiap buku besar. Neraca Saldo disusun sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Bagan 1, kita dapat melihat bahwa ada 3 laporan keuangan primer yang langsung disusun dari Neraca Saldo, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca. Kemudian berdasarkan ketiga laporan keuangan primer tersebut, Fungsi Akuntansi juga menyusun 4 laporan keuangan lainnya, yakni Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Semua informasi tambahan yang penting dan diperlukan untuk menunjang laporan keuangan tersebut, namun belum tercantum di dalamnya akan dimasukkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pendapatan-LO sebagai hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan Kabupaten Serang dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi Pendapatan-LO pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pencatatan akuntansi dari masing-masing kelompok pendapatan ini melekat pada siklus pendapatan Pemerintah Kabupaten Serang.

### **B. PIHAK TERKAIT**

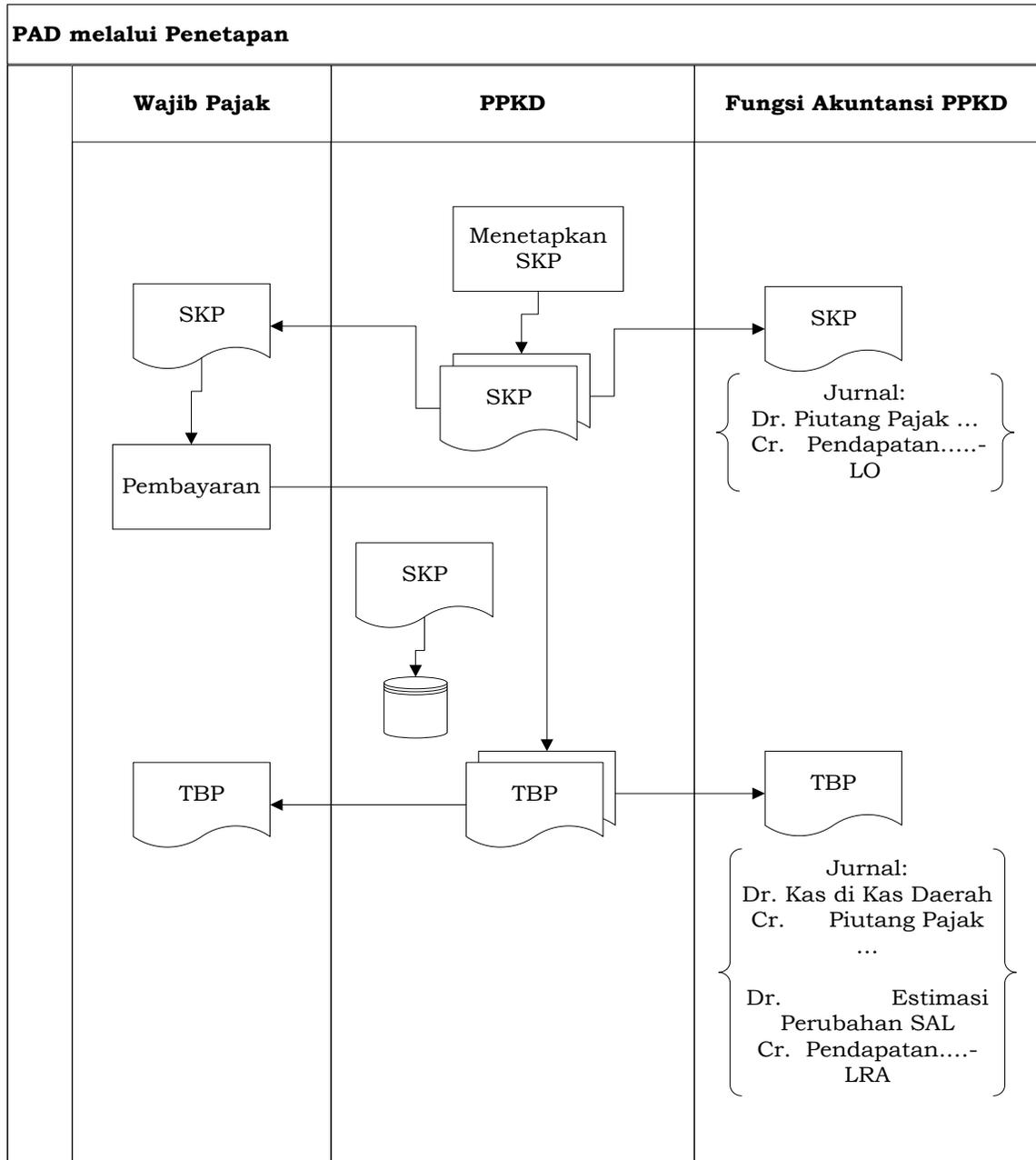
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO PPKD:

1. Pemerintah Pusat
2. PPKD Kabupaten Serang
3. Bendahara Penerimaan PPKD/Bank Kas Daerah Kabupaten Serang
4. Fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Serang

### **C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Serang dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan-LO. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan terlebih dahulu *flowchart* yang menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya.

**1. PAD Melalui Penetapan**



- a. PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemerintah Kabupaten Serang atas suatu pendapatan. Rekapitan Dokumen Ketetapan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Fungsi Akuntansi PPKD sebagai dasar bukti pengakuan pendapatan. Berdasarkan rekapitan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat “Piutang Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di sisi debit dan “Pendapatan-LO (sesuai rincian objek terkait)” di sisi kredit.

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan ..... -LO	xxx

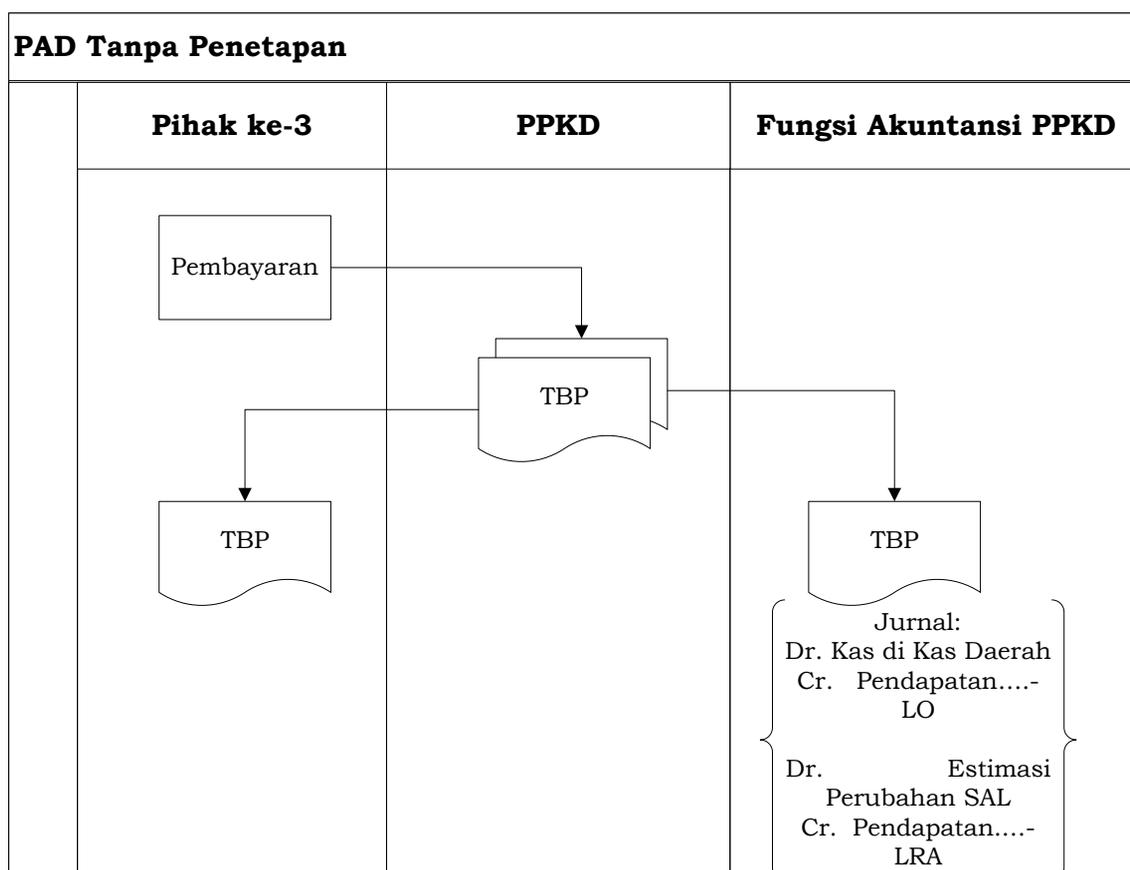
- b. Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk menghapus Piutang Pendapatan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di sisi kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ..... -LRA	xxx

## 2. PAD Tanpa Penetapan



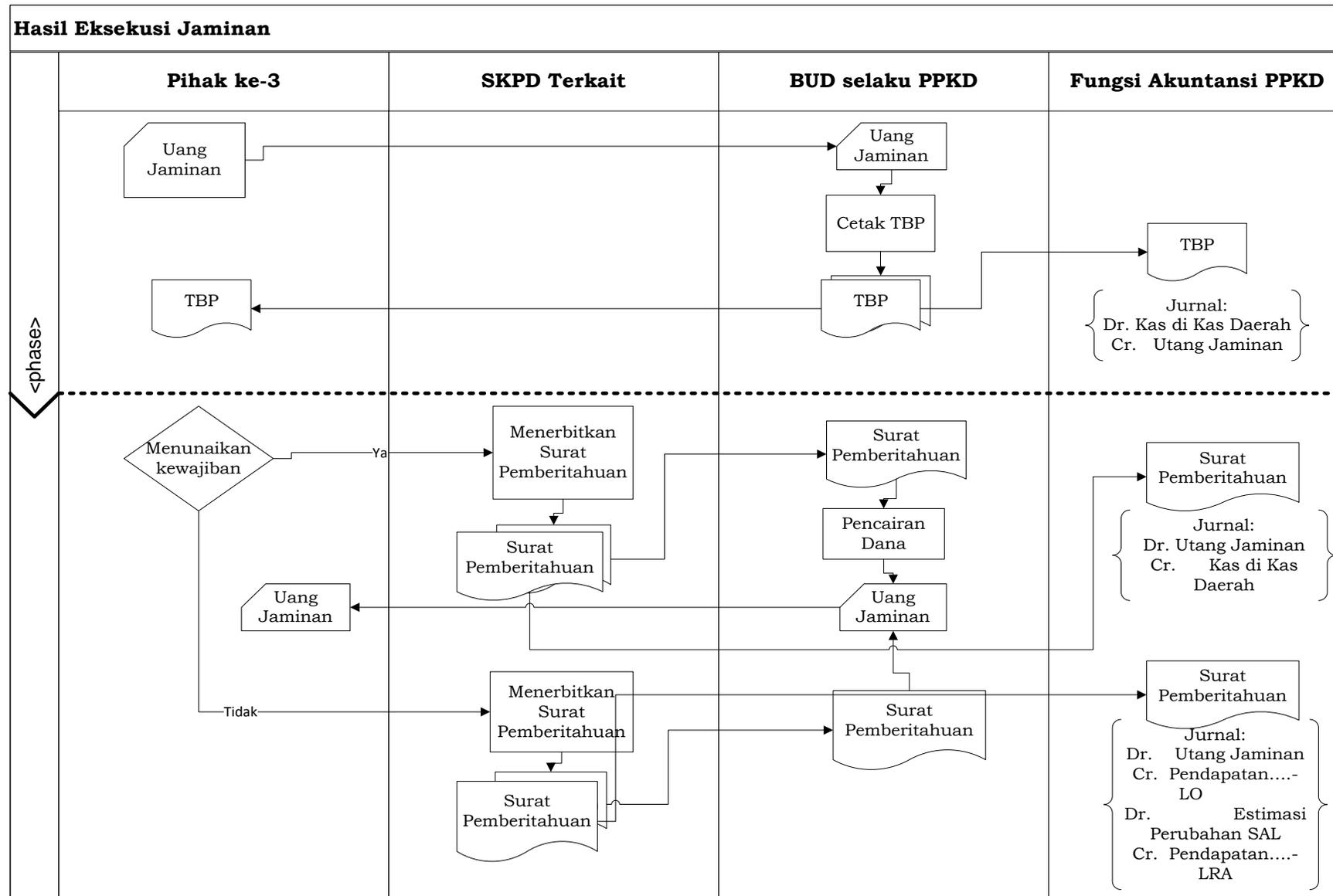
Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan-LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan...-LO	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di sisi kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ..... -LRA	xxx

3. Hasil Eksekusi Jaminan



- a. Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk mengakui utang jaminan dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Utang Jaminan” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang Jaminan	xxx

- b. Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. Kemudian berdasarkan bukti memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan pencatatan dengan membuat jurnal “Utang Jaminan” di debit dan “Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO” di kredit.

Utang Jaminan	xxx
Pendapatan Hasil Eksekusi –LO	xxx

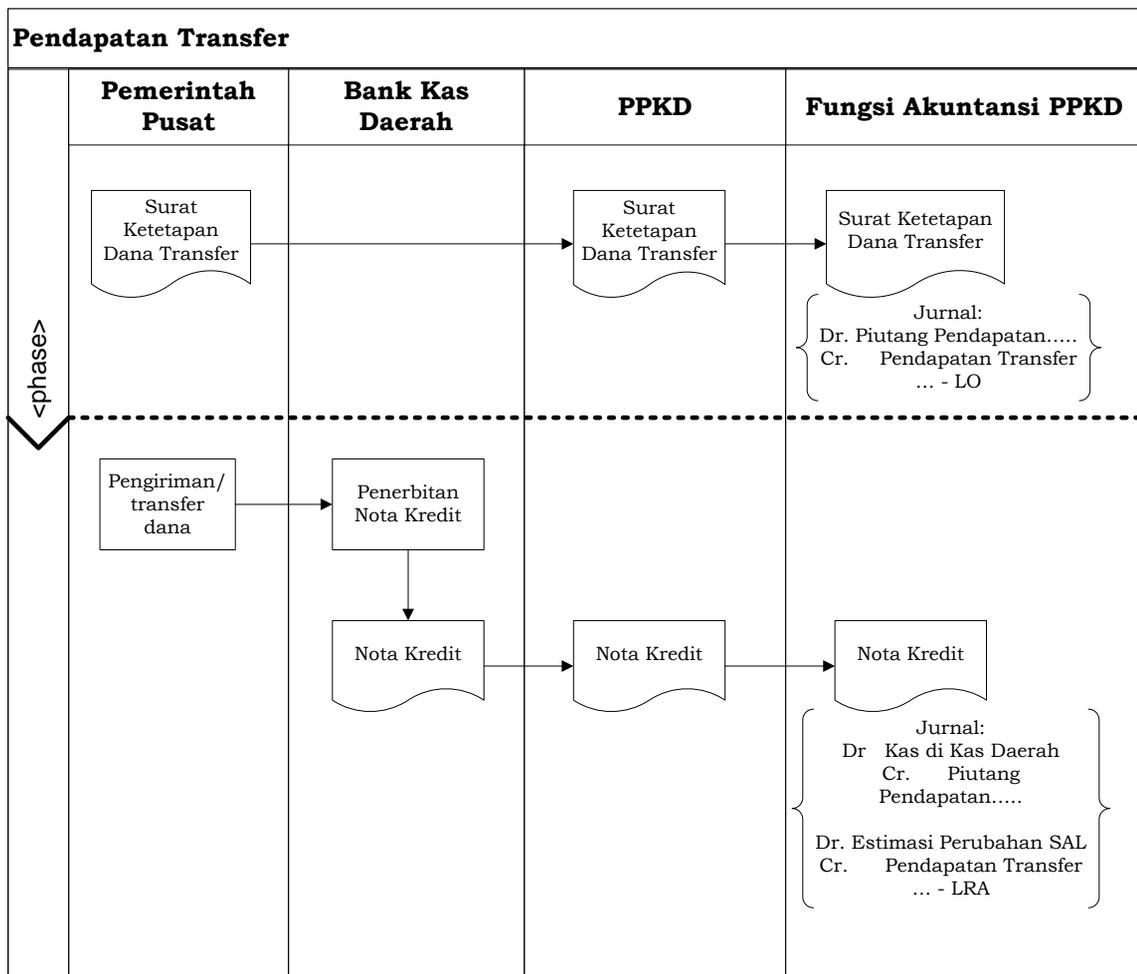
Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LRA” di kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hasil Eksekusi –LRA	xxx

- c. Jika pihak ketiga telah memenuhi kewajibannya, maka pemerintah daerah mengembalikan uang jaminan kepada pihak ketiga dengan melakukan jurnal sebagai berikut:

Utang Jaminan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

#### 4. Pendapatan Transfer



- a. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Ketetapan jumlah dana transfer tersebut akan menjadi dasar pencatatan pengakuan pendapatan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “Piutang Pendapatan” di debit dan “Pendapatan Transfer....-LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan Transfer.... -LO	xxx

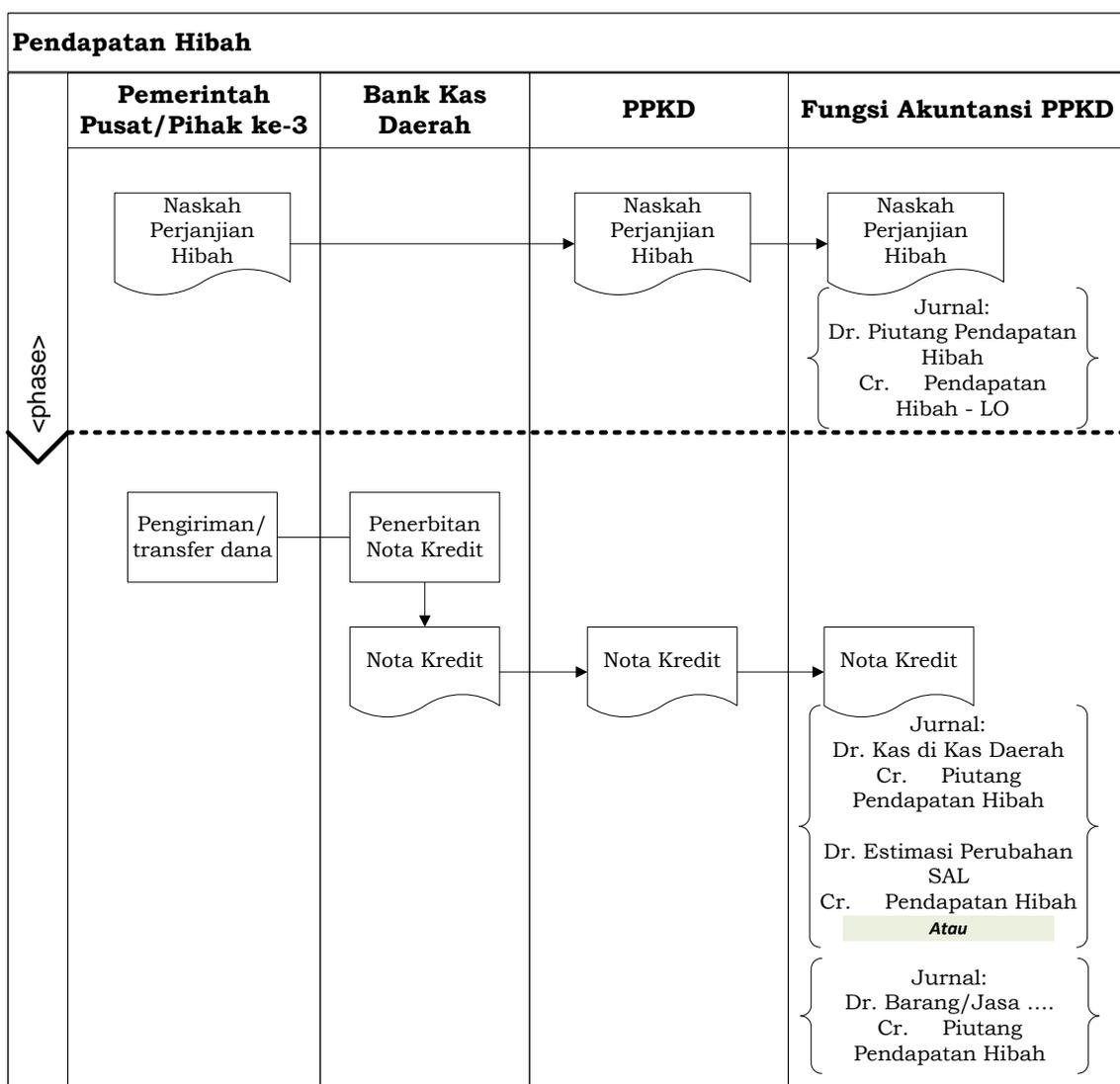
- b. Apabila Pemerintah Kabupaten Serang telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit yang akan diserahkan PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi akan mencatat adanya penambahan kas dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Pendapatan” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Pendapatan	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Transfer .....-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Transfer.... -LRA	xxx

### 5. Pendapatan Hibah



- a. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui Pendapatan Hibah dengan mencatat jurnal “Piutang Pendapatan Hibah” di debit dan “Pendapatan Hibah-LO” di kredit.

Piutang Pendapatan Hibah	xxx
Pendapatan Hibah-LO	xxx

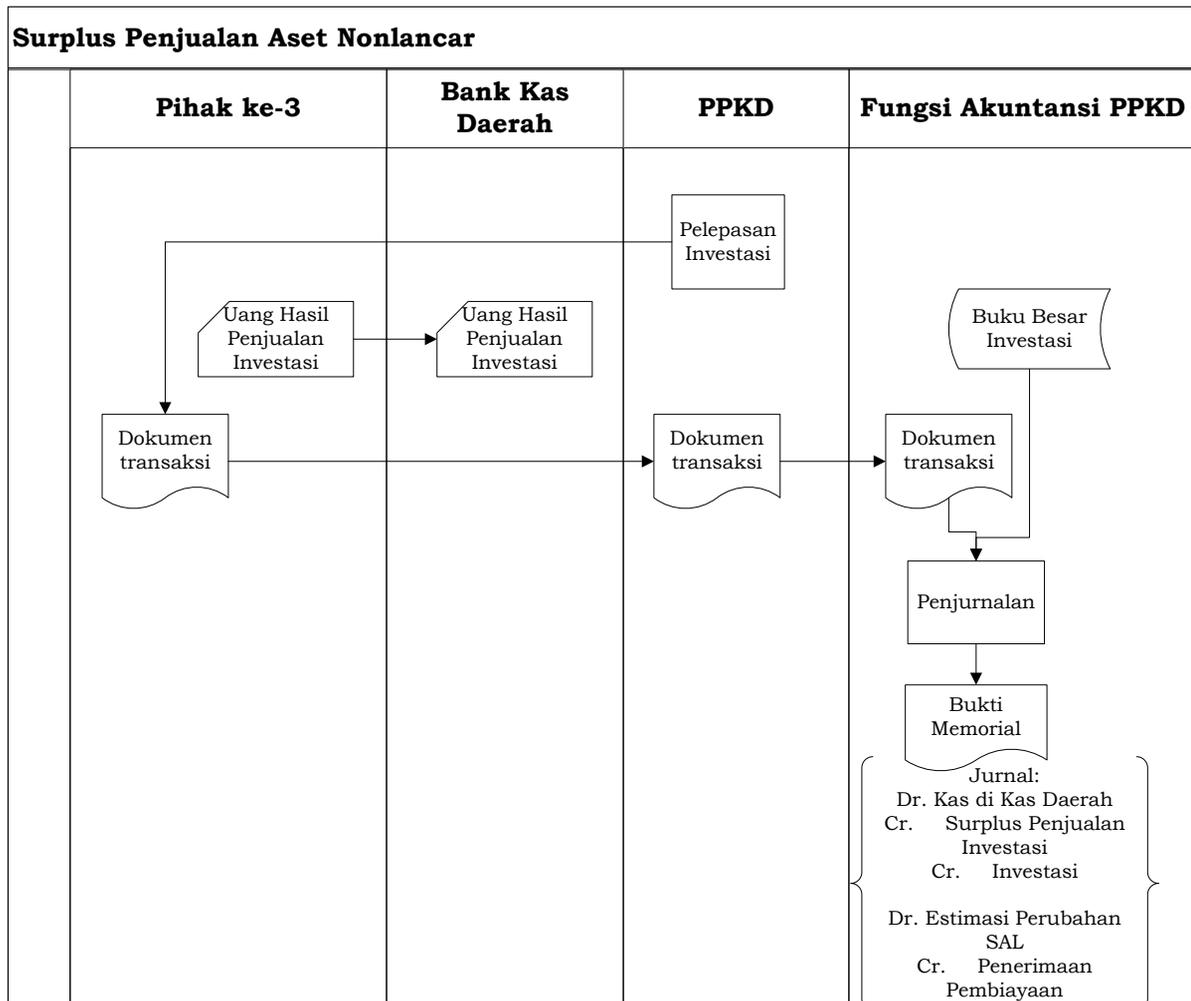
- b. Selanjutnya, ketika pencairan hibah terjadi/hibah diterima, maka Fungsi akuntansi akan menghapus Piutang Pendapatan Hibah dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa (sesuai jenis hibah yang diperoleh)” di debit dan “Piutang Pendapatan Hibah” di kredit.

Kas di Kas Daerah/Barang/Jasa	xxx
Piutang Pendapatan Hibah	xxx

- c. Selain itu, jika hibah yang diterima berupa uang yang merupakan realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hibah-LRA” di kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Hibah -LRA	xxx

**6. Pendapatan Non Operasional – Surplus Penjualan Aset Nonlancar**



Surplus Penjualan Aset Nonlancar dalam level PPKD berasal dari aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.

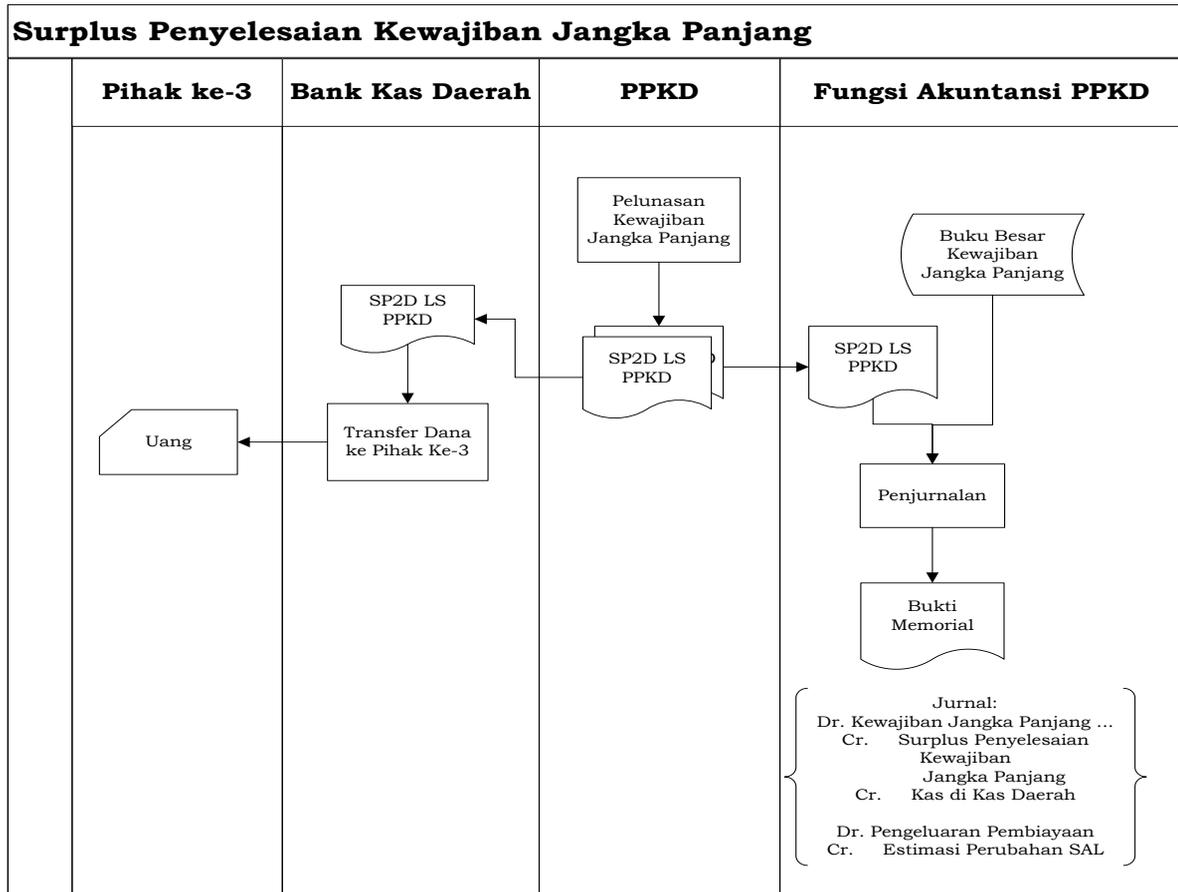
Dalam pelepasan investasi, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus Penjualan Aset Nonlancar-Investasi” dan “Investasi” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Surplus Penjualan Aset Nonlancar- Investasi	xxx
Investasi	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

**7. Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**



Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan mencatat jurnal “Kewajiban” di debit serta “Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang” dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Kewajiban .....	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

#### D. CONTOH PENJURNALAN

1. Pada tanggal 10 Januari 2015 Kabupaten Serang menerima pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp.6.014.225.000 dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.955.000.000
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	37.725.000
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	21.500.000

2. Telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah senilai Rp. 15.000.000 pada tanggal 17 Januari 2015.
3. Tanggal 20 Januari 2015, melalui rekening kas umum daerah diterima pendapatan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 50.000.000.00 secara tunai.
4. Tanggal 30 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Serang melalui rekening kas umum daerah diterima pendapatan hibah atas NPHD tanggal 17 Januari 2015.

Atas transaksi-transaksi penerimaan pendapatan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal sebagai berikut:

#### PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN SERANG BUKU JURNAL PPKD

**Halaman:**

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	5
10-Jan-15	1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	6.014.225.000	
	1.1.3.5.01	Pendapatan Bagi Hasil dari PBB-LO		5.955.000.000
	1.1.3.5.02	Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LO		37.725.000
	1.1.3.5.03	Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan-LO		21.500.000
	3.1.2 .05	Estimasi Perubahan SAL	6.014.225.000	
	4.2.1.01	Pendapatan Bagi Hasil dari PBB-LRA		5.955.000.000

SAPD Kabupaten Serang

	4.2.1.02	Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LRA		37.725.000
	4.2.1.02	Pendapatan Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan-LRA		21.500.000
17-Jan-15	1.1.3.09	Piutang Hibah	15.000.000	
	8.3.1.01	Pendapatan Hibah-LO		15.000.000
20-Jan-15	1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	23.000.000.000	
	1.1.3.5.04	Piutang Dana Alokasi Umum		23.000.000.000
	3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL	23.000.000.000	
	4.2.1.03	Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA		23.000.000.000
30-Jan-15	1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	15.000.000	
	1.1.3.09	Piutang Hibah		15.000.000
	3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL	15.000.000	
	4.3.1.01	Pendapatan Hibah-LRA		15.000.000

**Fungsi Akuntansi PPKD**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
2. Surat Ketetapan Pajak
3. Surat Pemberitahuan
4. Surat Ketetapan Dana Transfer
5. Nota Kredit
6. Naskah Penjanjian Hibah
7. Dokumen Transaksi
8. Bukti Memorial
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung

## AKUNTANSI BEBAN

### A. KETENTUAN UMUM

Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban akan belanja yang kita lakukan.

Akuntansi Beban pada PPKD Kabupaten Serang dilakukan oleh fungsi Akuntansi PPKD. Sistem dan prosedur Akuntansi Beban ini meliputi Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, dan Beban Transfer.

#### 1. Beban Bunga

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Serang untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

#### 2. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

#### 3. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar. Beban Hibah diakui ketika Nota Perjanjian Hibah sudah ditandatangani oleh PPKD dan pihak penerima hibah.

#### **4. Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan.

#### **5. Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan.

### **B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

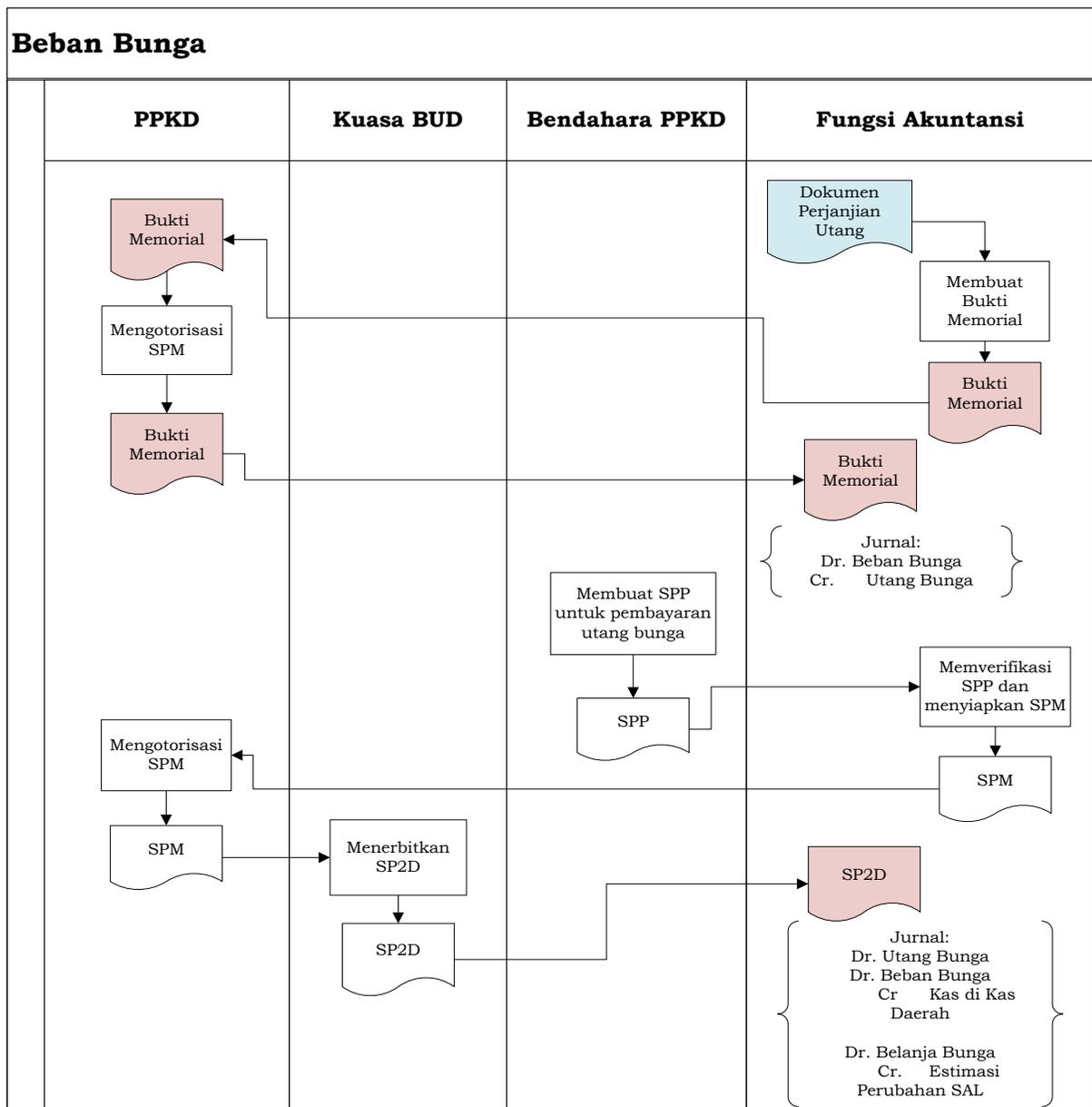
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban adalah:

1. Fungsi Akuntansi PPKDKabupaten Serang
2. Bendahara PPKDKabupaten Serang
3. PPKDKabupaten Serang
4. Kuasa BUDKabupaten Serang
5. Pemda Lain/PD/Masyarakat/Ormas

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Pencatatan beban level PPKD Kabupaten Serang dapat dilihat dalam *flowchart* berikut ini:

**1. Beban Bunga**



- a. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban Bunga” di debit dan “Utang Bunga” di kredit.

Beban Bunga	xxx
Utang Bunga	xxx

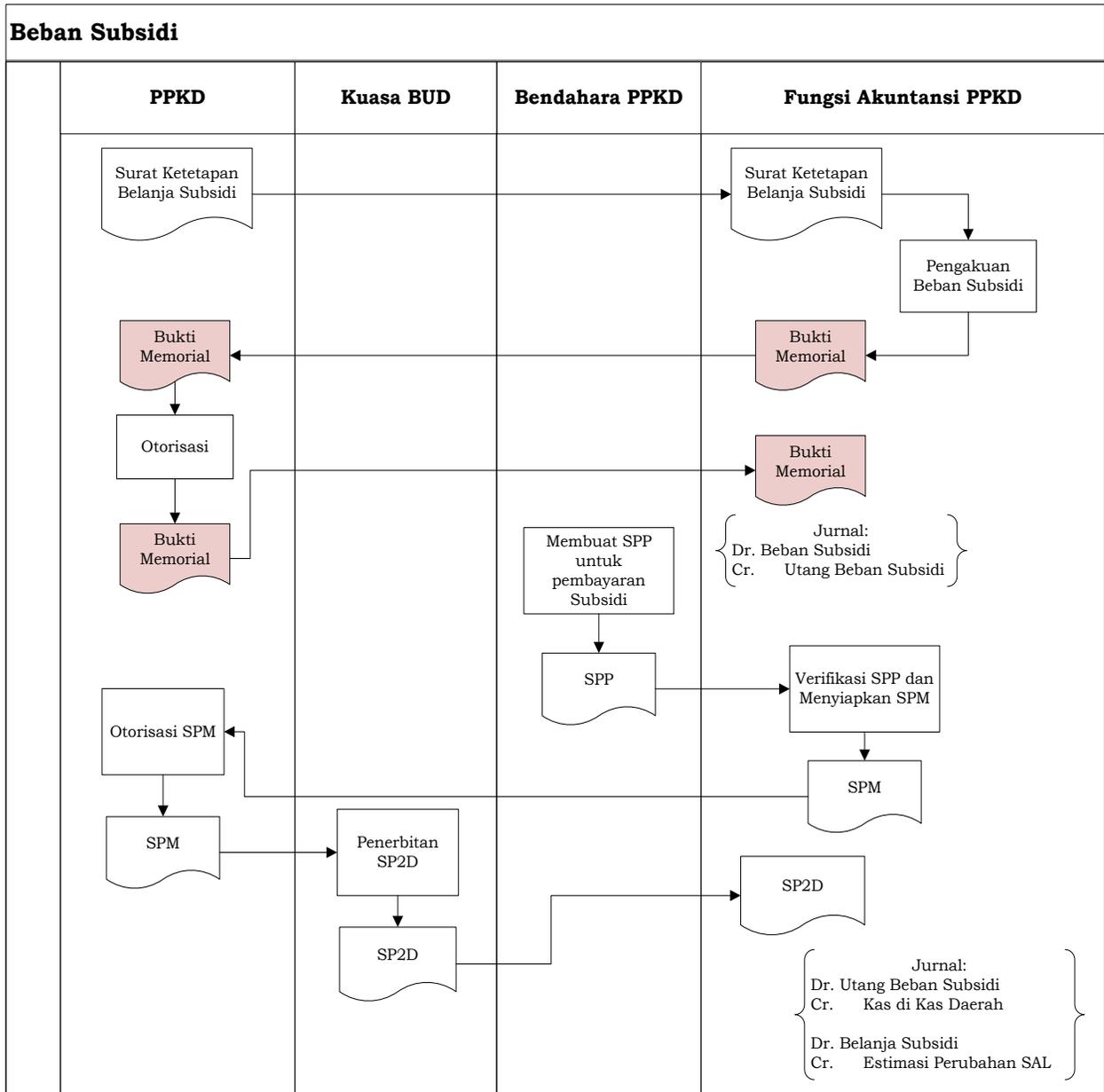
- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal “Utang Bunga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Bunga	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Bunga” di debit dan “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Bunga	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

**2. Beban Subsidi**



- a. Berdasarkan surat ketetapan tentang subsidi yang terkait, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal “Beban Subsidi” di debit dan “Utang Beban Subsidi” di kredit.

Beban Subsidi	xxx
Utang Beban Subsidi	xxx

- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi

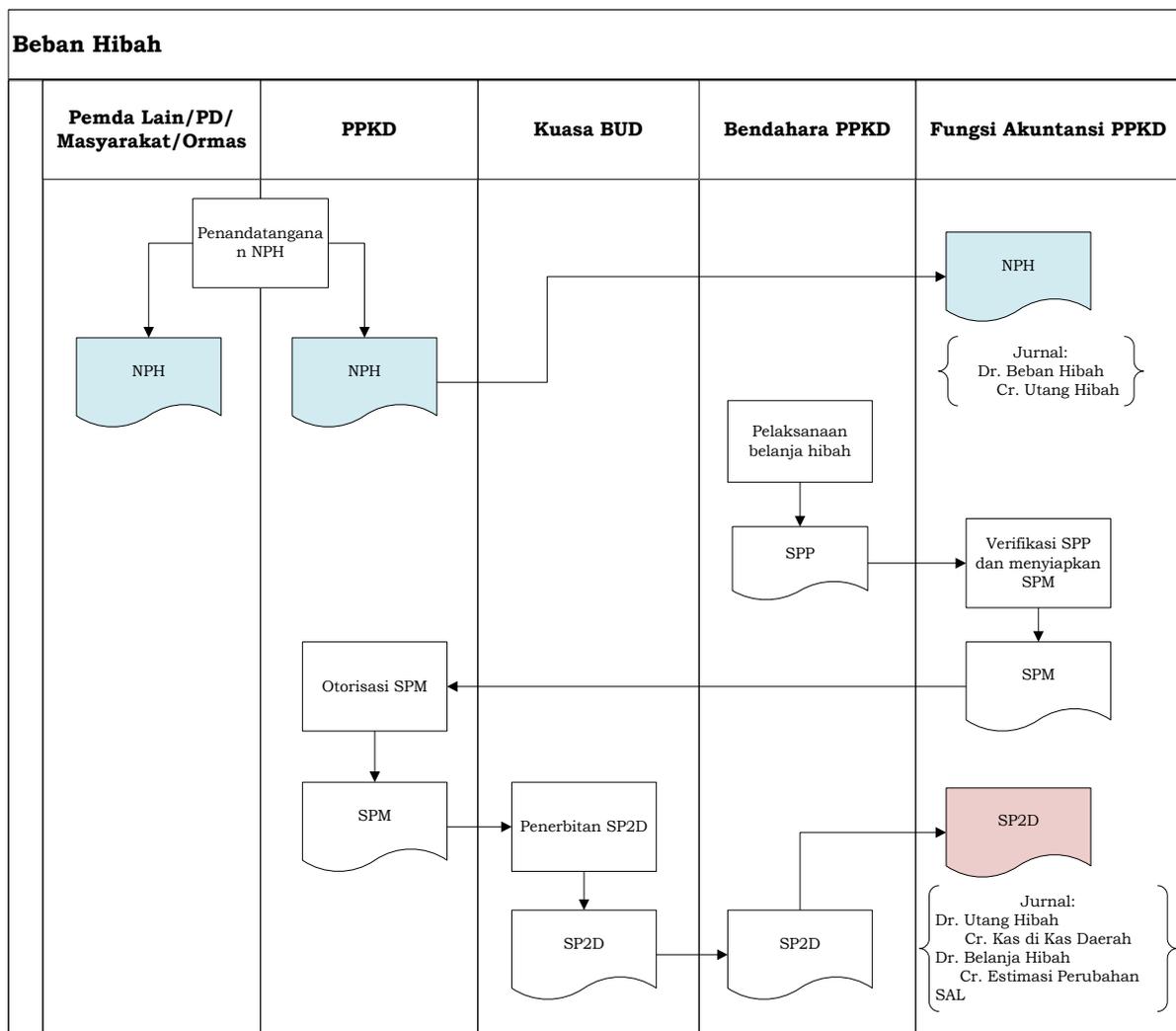
PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Subsidi” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Subsidi	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Subsidi” di debit dan “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Subsidi	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

### 3. Beban Hibah



- a. PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat pengakuan beban hibah dan utang dengan jurnal “Beban Hibah” di debit dan “Utang Beban Hibah” di kredit.

Beban Hibah	xxx
Utang Beban Hibah	xxx

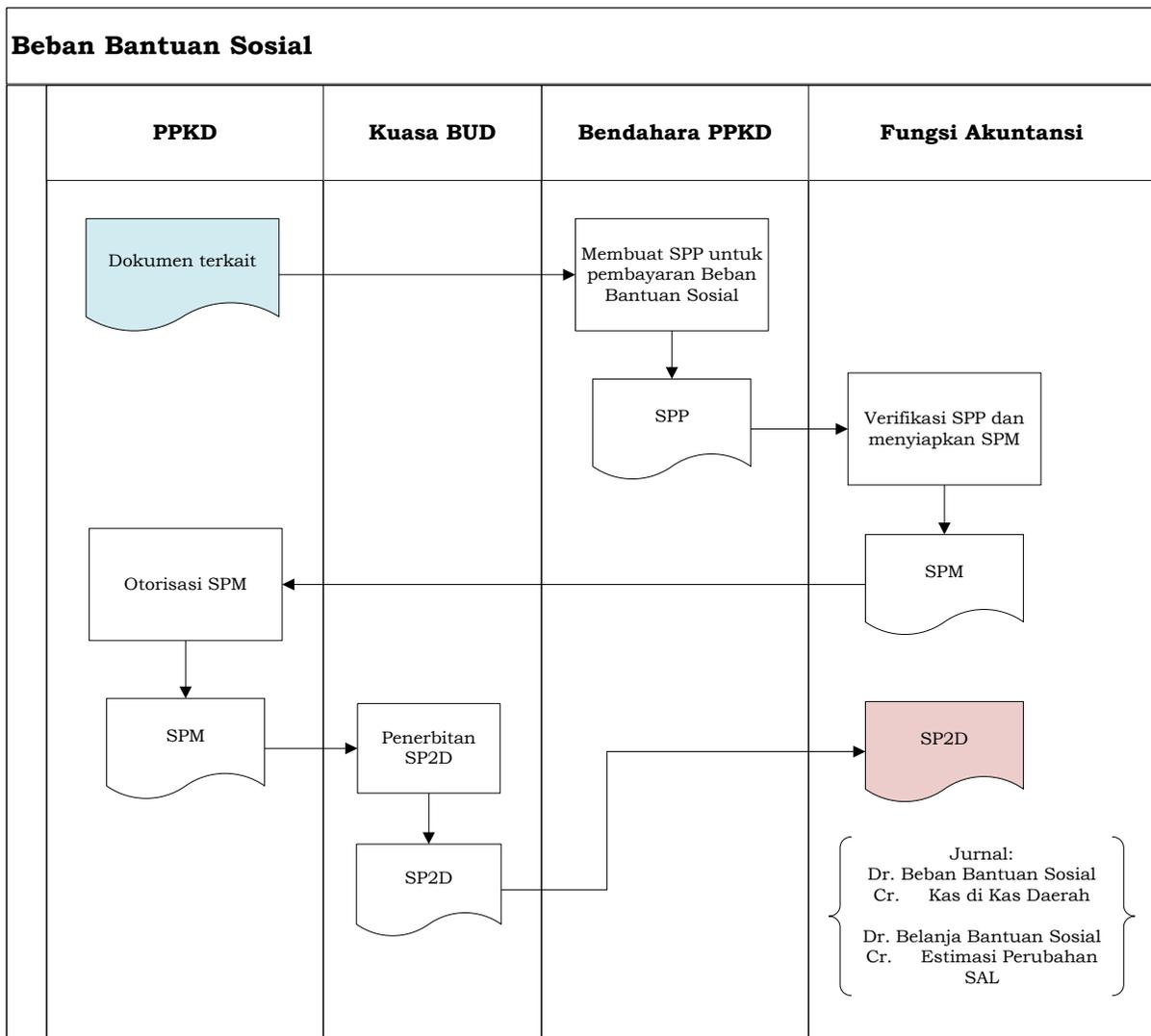
- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban hibah tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban hibah, dengan jurnal “Utang Beban Hibah” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Hibah	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Hibah	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

**4. Beban Bantuan Sosial**



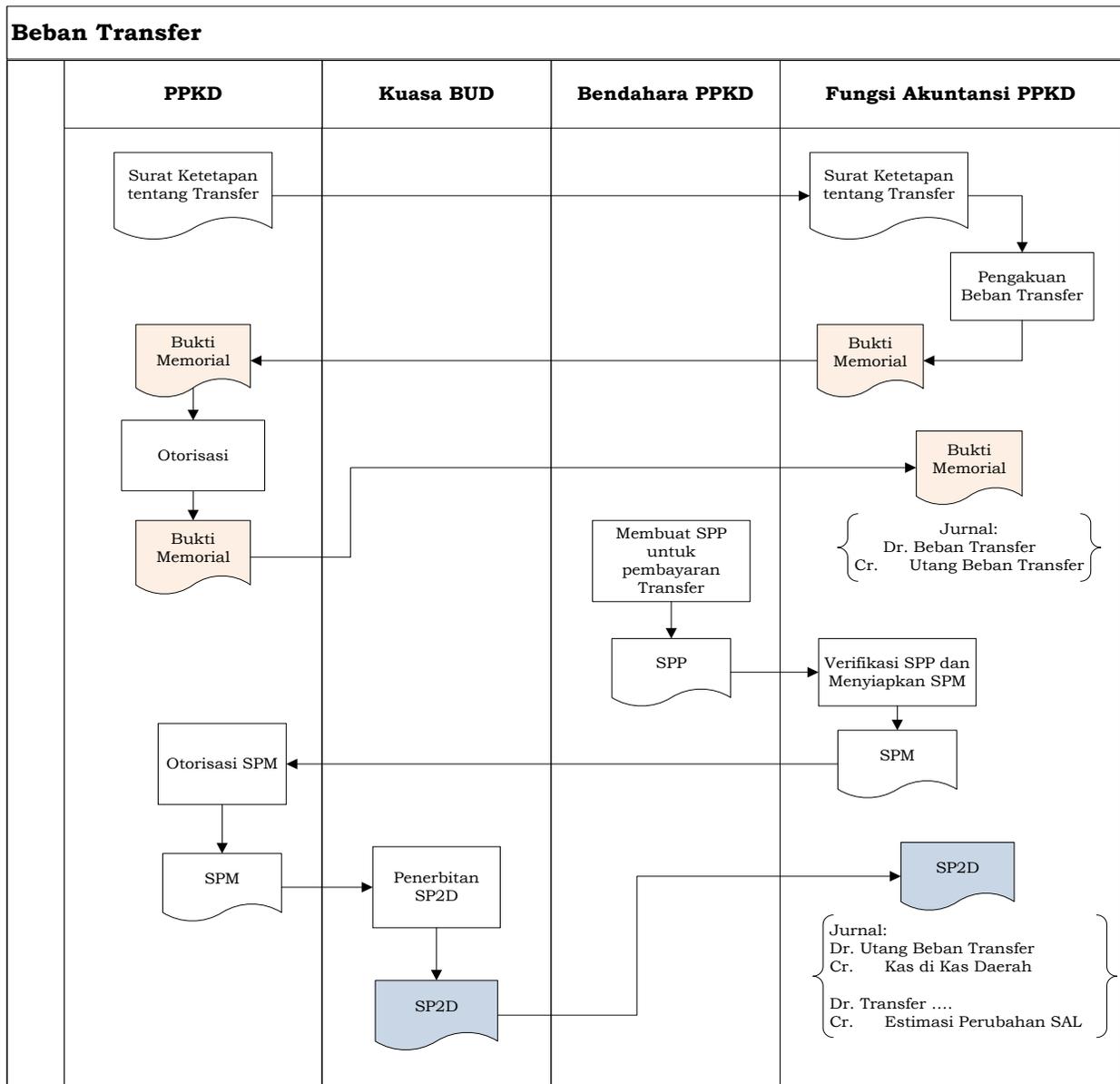
Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal “Beban Bantuan Sosial” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Beban Bantuan Sosial	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Bantuan Sosial” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Bantuan Sosial	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

### 5. Beban Transfer



- a. Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit dan “Utang beban transfer” di kredit.

Beban Transfer	xxx
Utang Beban Transfer	xxx

- b. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi

PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Utang Beban Transfer	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Transfer” di debit dan “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Transfer	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

#### **D. CONTOH PENJURNALAN**

1. Pada tanggal 7 Januari 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Serang mengajukan SPP untuk belanja bantuan sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 680.000.000. Atas pengajuan SPP ini, diterbitkan SPM pada tanggal 8 Januari 2011, dan diterbitkan SP2D pada tanggal 9 Januari 2015.
  2. Pada tanggal 10 Januari 2015, terjadi penandatanganan Nota Perjanjian Hibah (NPH) antara PPKD dengan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp 300.000.000.
  3. Pada tanggal 10 Februari 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Serang mengajukan SPP untuk belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp 300.000.000. Atas pengajuan SPP ini, diterbitkan SPM pada tanggal 11 Februari 2015, dan diterbitkan SP2D pada tanggal 12 Februari 2015.
  4. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, diketahui bahwa pada 31 Desember 2015 PPKD memiliki utang bunga sebesar Rp 9.000.000
- Atas transaksi-transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal sebagai berikut:

## BUKU JURNAL

Halaman:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	3	4	6	7
9-Jan-15	9.1.6.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	680.000.000	
	1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		680.000.000
	5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	680.000.000	
	3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL		680.000.000
10-Jan-15	9.1.5.06	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000	
	2.1.5.05	Utang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		300.000.000
12-Feb-15	2.1.5.05	Utang Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000	
	1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		300.000.000
	5.1.5.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000	
	3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL		300.000.000
31-Des-15	9.1.3.01	Beban Bunga	9.000.000	
	2.1.5.03	Utang Bunga		9.000.000

---

**Fungsi Akuntansi PPKD**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Bukti Memorial
2. Surat Ketetapan Belanja Subsidi
3. Naskah Perjanjian Hibah
4. Surat Ketetapan Transfer
5. Naskah Pernjanjian Hibah
6. Surat Perintah Pembayaran
7. Surat Perintah Membayar
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

## **AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pencatatan Pendapatan-LRA ini merupakan realisasi dari anggaran pendapatan.

Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dimunculkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Sehingga, pendapatan-LRA dicatat dan diakui ketika ada kas yang diterima oleh SKPD.

Sama seperti pendapatan-LO, Akuntansi Pendapatan-LRA pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.

### **B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LRA adalah:

1. Pemerintah pusat
2. PPKD Kabupaten Serang
3. Bendahara Penerimaan PPKD Kabupaten Serang
4. Fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Serang

### **C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Seperti yang telah tergambar dalam semua flowchart kelompok pendapatan di bagian 2 (Akuntansi Pendapatan-LO), Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui pendapatan-LRA ketika terjadi realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Hal ini berlaku untuk semua kelompok pendapatan. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di sisi debit dan “Pendapatan LRA (sesuai rincian objek)” di sisi kredit setiap ada realisasi pendapatan.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ..... -LRA	xxx

## AKUNTANSI BELANJA

### A. KETENTUAN UMUM

Belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pencatatan belanja merupakan realisasi dari anggaran belanja sehingga akan masuk ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dan disajikan dengan basis kas. Belanja akan diakui ketika kas sudah keluar.

### B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi belanja adalah:

1. Fungsi Akuntansi PPKD
2. Bendahara Pengeluaran PPKD
3. PPKD
4. Kuasa BUD
5. Pemda Lain/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Ormas

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Seperti yang telah tergambar dalam semua *flowchart* kelompok beban di Bab 3 (Akuntansi Beban), Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui belanja ketika terjadi realisasi belanja yang ditandai dengan adanya pengeluaran kas baik itu yang berasal dari Bendahara Pengeluaran (belanja dengan menggunakan Uang Persediaan) maupun dari kas daerah (belanja dengan mekanisme LS). Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui adanya belanja dengan menjurnal “Belanja..... (sesuai rincian objek belanja)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja .....	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

## AKUNTANSI ASET

### A. KETENTUAN UMUM

Akuntansi aset akan membahas perlakuan akuntansi untuk aset yang dimiliki PPKD, yaitu dalam bentuk investasi. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua:

1. Investasi Jangka Pendek
2. Investasi Jangka Panjang

#### **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

#### **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.

##### Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terkadang juga dilakukan untuk menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Dalam akuntansi pemerintahan, terdapat 3 metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian investasi jangka panjang yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang direalisasikan. Pemilihan metode penilaian ini ditentukan oleh porsi kepemilikan dalam badan usaha *investee*. Kepemilikan kurang dari 20% dinilai menggunakan metode biaya. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Dan kepemilikan lebih dari 50% dinilai menggunakan metode ekuitas. Sedangkan kepemilikan investasi yang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

**a. Metode Biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode Ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan kemudian ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

**B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

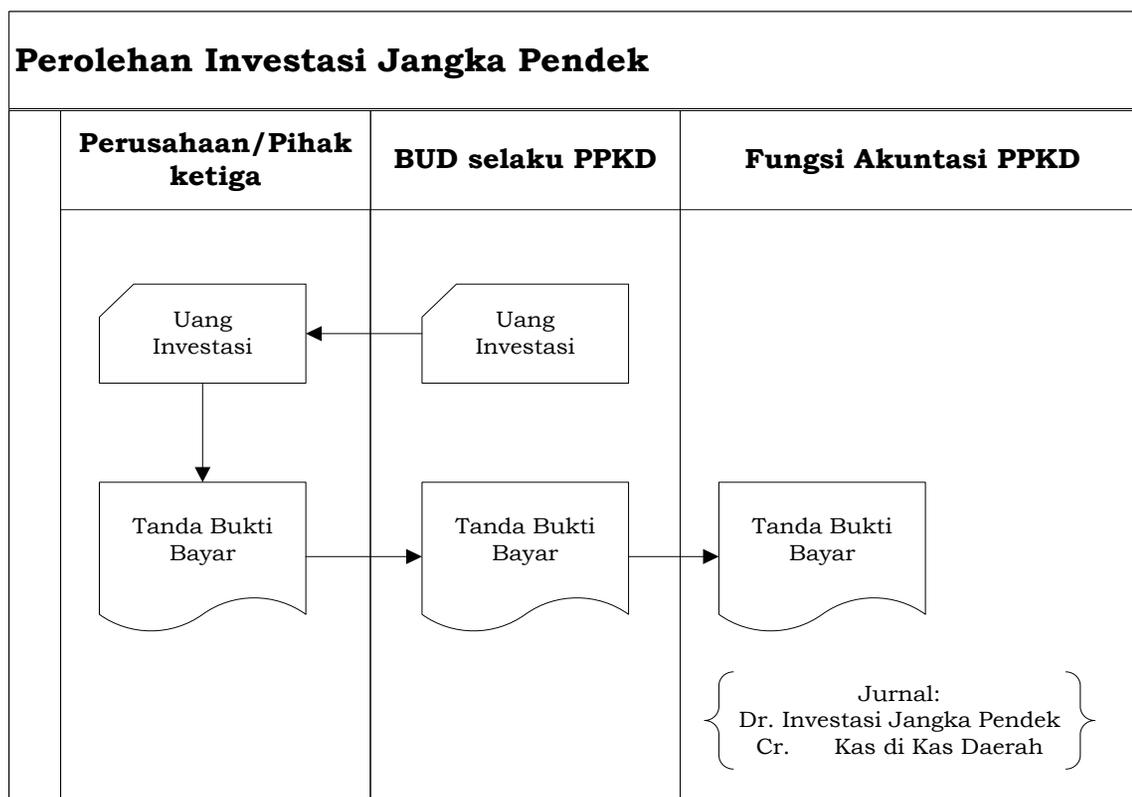
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset adalah:

1. Fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Serang
2. Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Serang
3. PPKD Kabupaten Serang
4. Kuasa BUD Kabupaten Serang
5. Perusahaan/Pihak Ketiga

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dalam melakukan pencatatan transaksi terkait investasi. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan terlebih dahulu *flowchart* yang menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya.

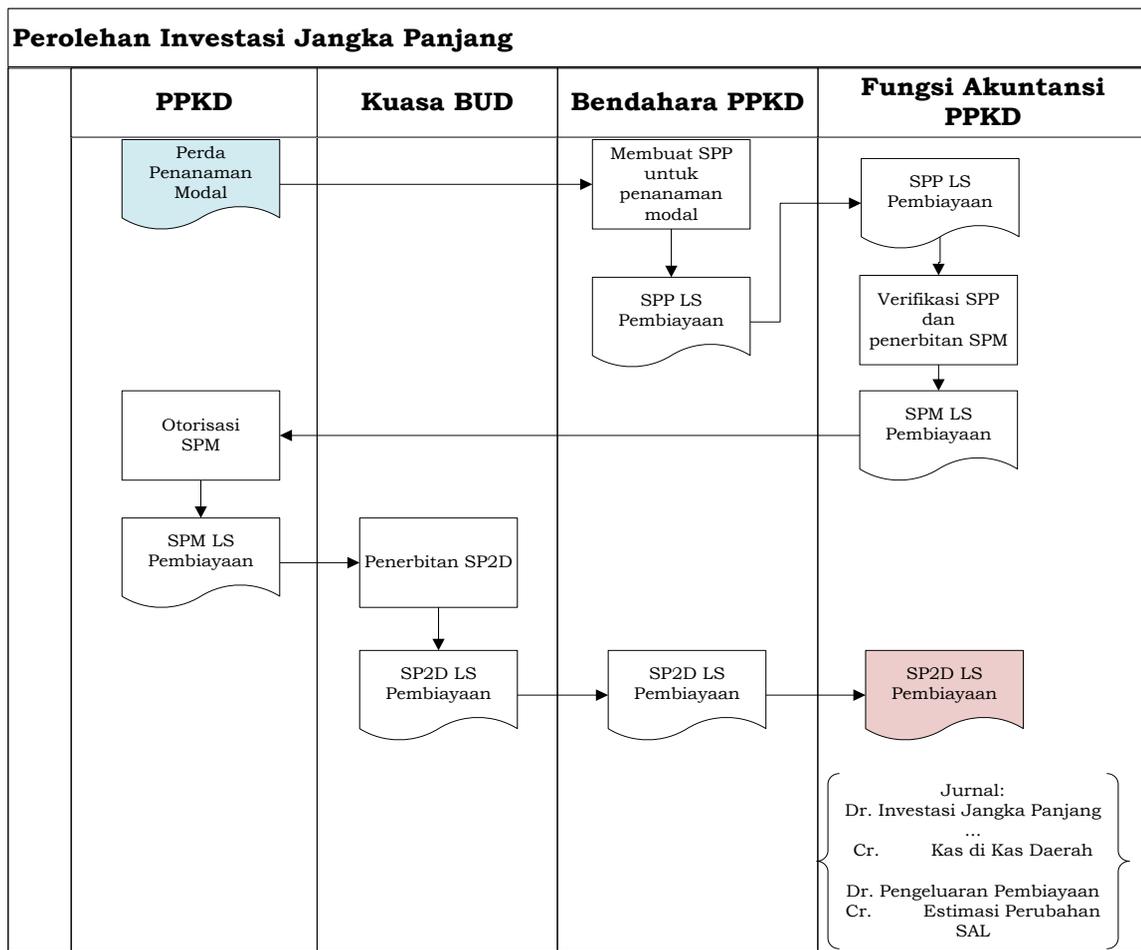
### 1. Perolehan Investasi Jangka Pendek



Ketika Pemerintah Kabupaten Serang melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal "Investasi Jangka Pendek" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Investasi Jangka Pendek .....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

**2. Perolehan Investasi Jangka Panjang**



Perolehan investasi dicatat ketika Perda penyertaan modal dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal "Investasi Jangka Panjang" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit.

Investasi Jangka Panjang .....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran Pembiayaan" di debit dan "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

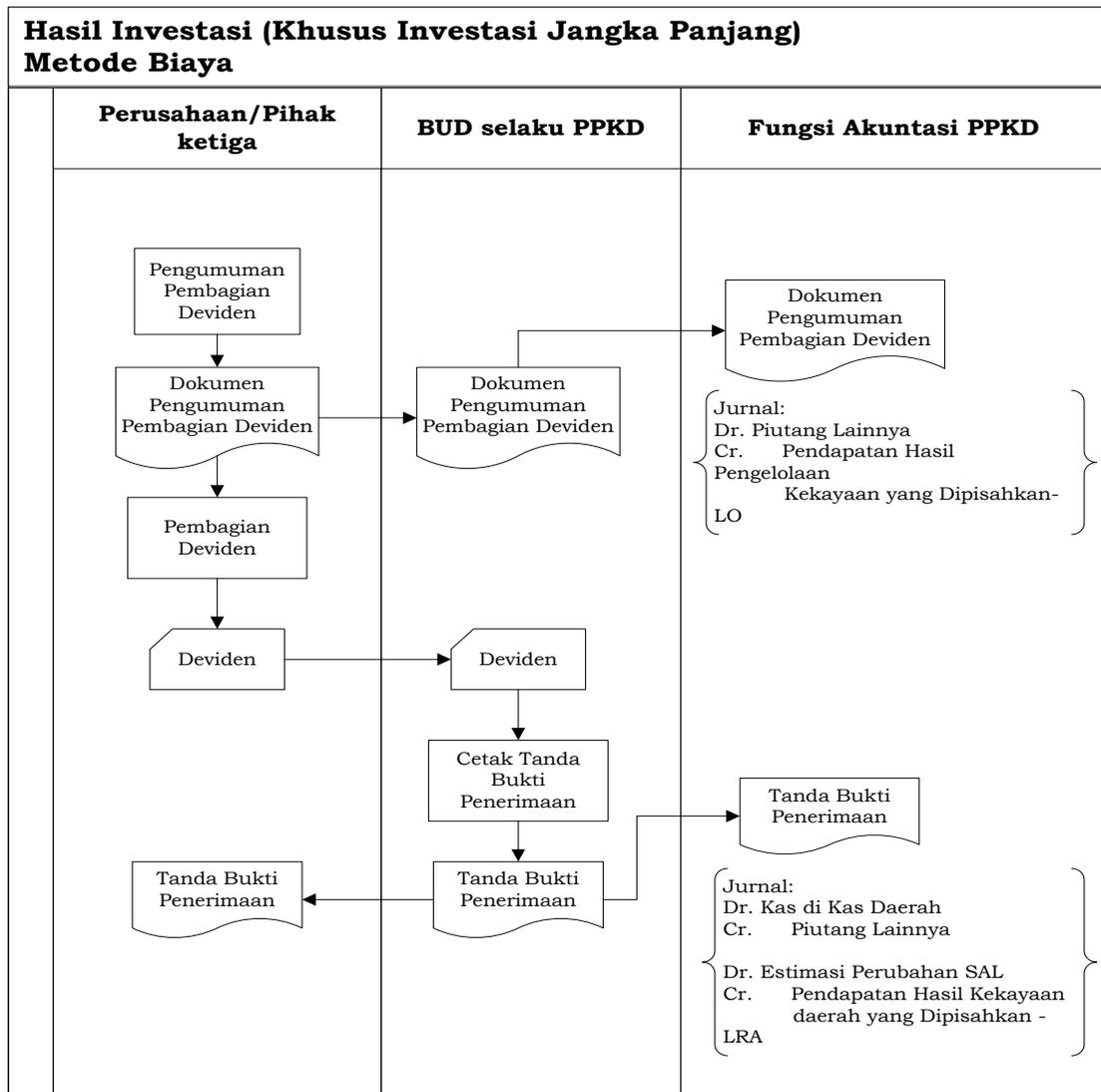
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx

**3. Hasil Investasi**

**a. Hasil Investasi Jangka Pendek**

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut sehingga pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.

**b. Hasil Investasi Jangka Panjang**



Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal pengakuan dividen yang akan

diterima dengan mencatat "Piutang Lainnya" di debit dan "Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO" di kredit.

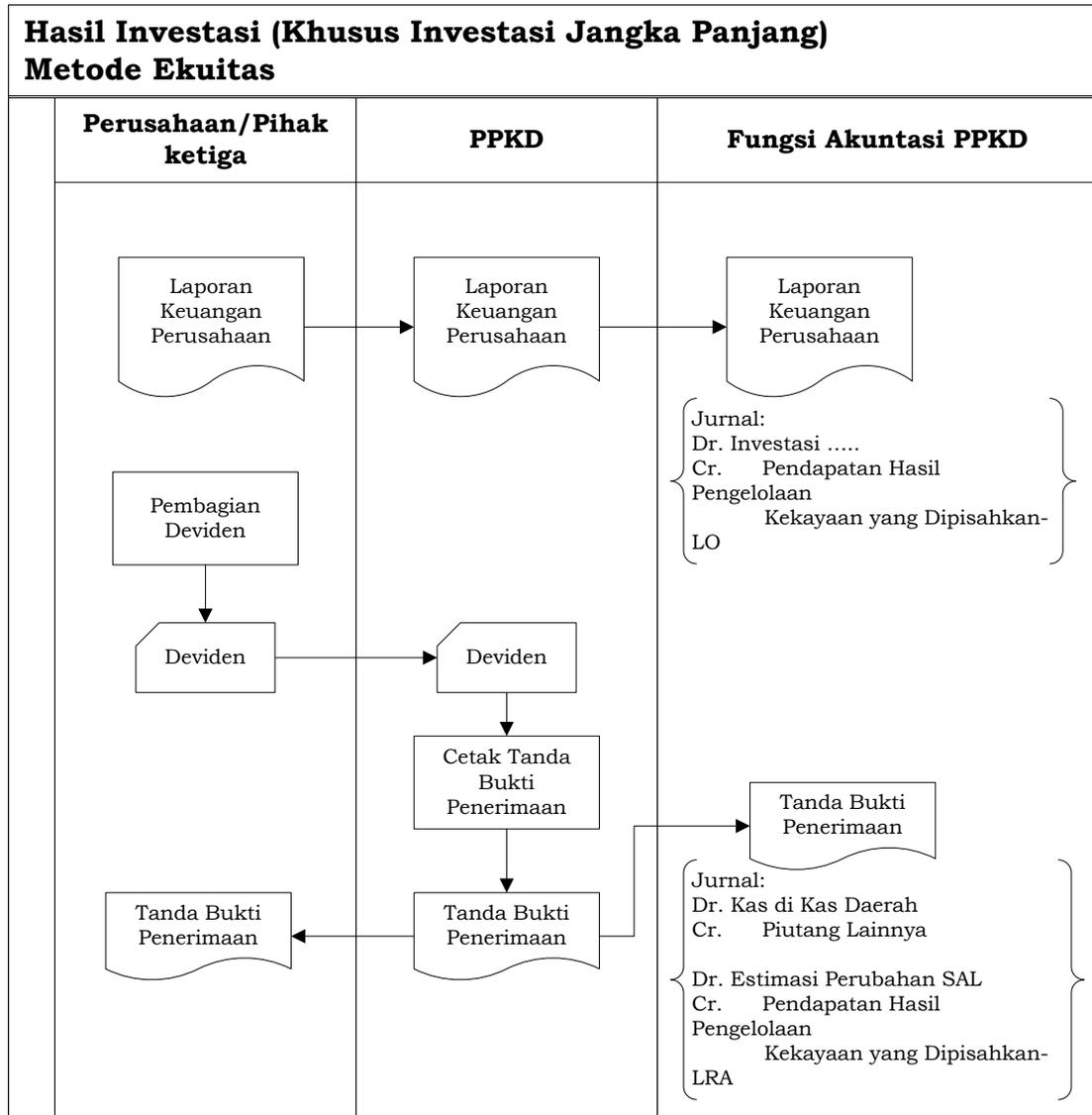
Piutang Lainnya	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah– LO	xxx

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Serang, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat

Kas di Kas Daerah	xxx
Piutang Lainnya	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal "Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA" di kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah– LRA	xxx



Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serang. Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal keuntungan dengan mencatat "Investasi" di debit dan " Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO" di kredit.

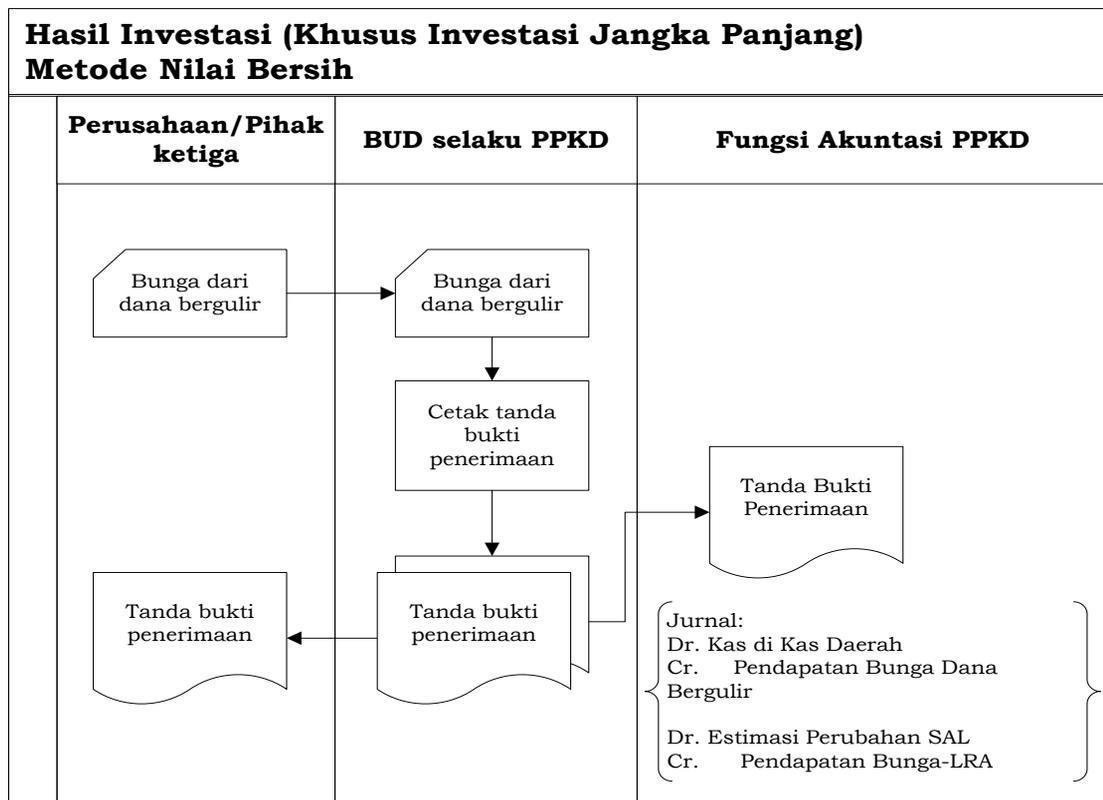
Investasi .....	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah- LO	xxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Investasi" di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Investasi .....	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA”.

Ekuitas SAL- Estimasi Perubahan SAL	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah- LRA	xxx



Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

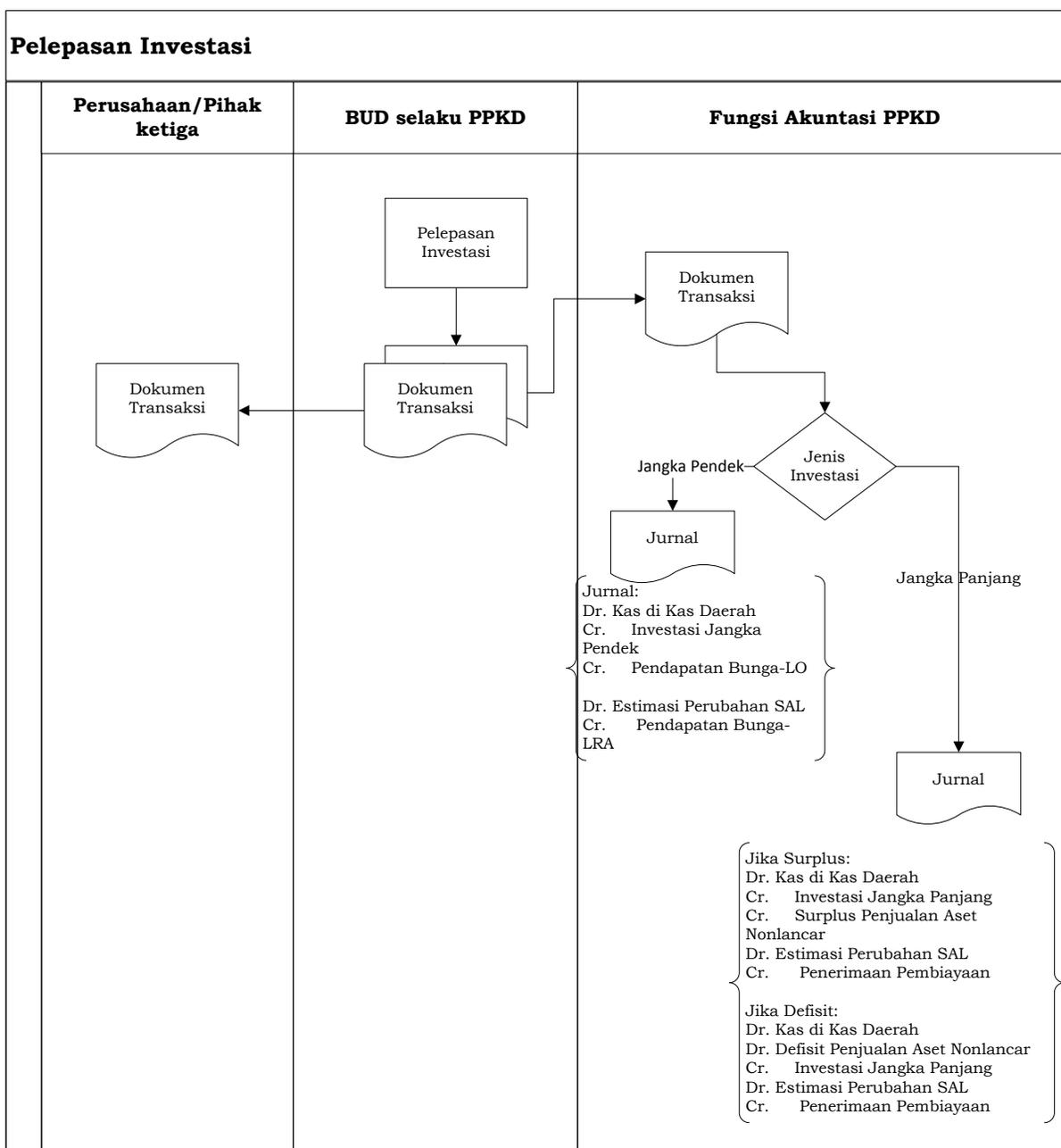
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan Bunga - LO" di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Bunga – LO	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA”.

Ekuitas SAL- Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Bunga – LRA	xxx

#### 4. Pelepasan Investasi



**a. Pelepasan Investasi Jangka Pendek**

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan Bunga” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan bunga – LO	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga” di kredit.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan bunga – LRA	xxx

**b. Pelepasan Investasi Jangka Panjang**

Dalam pelepasan investasi jangka panjang, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar dari nilai perolehan investasi, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal “Kas di Kas Daerah” serta “Surplus Penjualan Aset Nonlancar” di kredit dan “Investasi Jangka Panjang” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx
Investasi Jangka Panjang	xxx

Sedangkan jika nilai kas yang diterima lebih kecil dari nilai investasi, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pelepasan investasi dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” dan “Defisit Penjualan Aset Nonlancar” di debit dan “Investasi Jangka Panjang” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx
Investasi Jangka Panjang	xxx

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Estimasi Perubahan SAL melalui jurnal “Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang diterima.

Ekuitas SAL - Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

#### D. CONTOH PENJURNALAN

##### Perolehan Investasi

1. Pada tanggal 19 Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Serang melakukan penyertaan modal kepada BUMD Segar sebesar Rp. 200.000.000. SP2D LS PPKD atas penyertaan modal ini terbit pada tanggal 21 Januari 2013.

Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki kepemilikan sebesar 10% pada BUMD Segar.

2. Pada tanggal 2 Februari 2013, Pemerintah Kabupaten Serang menempatkan dananya sebesar Rp. 70.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Ceria dengan tingkat bunga 6%.

3. Pada tanggal 15 Maret 2013, Pemerintah Kabupaten Serang menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Terang Terus senilai Rp. 300.000.000. Untuk kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Serang membayar biaya broker dan komisi sebesar Rp. 500.000. SP2D LS PPKD untuk penanaman modal ini terbit pada tanggal 17 Maret 2013.

Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki porsi kepemilikan sebesar 25% pada Perusahaan Daerah Terang Terus.

##### Hasil Investasi

4. Pada tanggal 1 April 2013, Pemerintah Kabupaten Serang menerima bunga deposito dari Bank Ceria.
5. Pada tanggal 20 April 2013, BUMD Segar mengumumkan perolehan laba kuartal I tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa 25% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 22 April 2013.

6. Pada tanggal 25 April 2013, Perusahaan Daerah Terang Terus mengumumkan perolehan laba Perusahaan kuartal I Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa bagian laba perusahaan sebesar Rp. 100.000.000 akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 30 April 2013.

**Pelepasan Investasi**

7. Pada tanggal 31 Juli 2013, Pemerintah Kabupaten Serang memutuskan untuk mencairkan seluruh depositonya pada Bank Ceria.
8. Pada tanggal 7 September 2013, Pemerintah Kabupaten Serang memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Global yang bernilai Rp. 100.000.000. Saham tersebut terjual dengan harga Rp. 110.000.000 pada tanggal 10 September 2011.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU JURNAL**

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	21-Jan-13	9/KK/I/13	1.2.1.01.02	Investasi kpd BUMD	200,000,000	
			1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		200,000,000
			7.2.2.02.01	Penyertaan Modal kpd BUMD	200,000,000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		200,000,000
2	2-Feb-13	13/KK/II/13	1.1.2.02.01	Deposito Jangka Pendek	70,000,000	
			1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		70,000,000
3	17-Mar-13	15/KK/III/13	1.2.2.01.02	Penyertaan Modal kpd BUMD	300,500,000	
			1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		300,500,000
			7.2.2.02.01	Penyertaan Modal kpd BUMD	300,500,000	
4	1-Apr-13	17/KM/IV/13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	700,000	
			8.1.4.04.01	Pendapatan Bunga Deposito - LO		700,000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	700,000	
			4.1.4.04.01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA		700,000
5	20-Apr-13	18/BA/IV/13	1.1.3.03.01	Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD	2,500,000	
			8.1.3.01.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pd BUMD - LO		2,500,000
	22-Apr-13	21/KM/IV/13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	2,500,000	
			1.1.3.03.01	Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD		2,500,000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	2,500,000	
			4.1.3.01.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pd BUMD - LRA		2,500,000
6	25-Apr-13	22/BA/IV/13	1.2.2.01.02	Penyertaan Modal kpd BUMD	62,500,000	
			8.1.3.01.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pd PD		62,500,000
			1.1.3.03.01	Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD	25,000,000	
			1.2.2.01.02	Penyertaan Modal kpd BUMD		25,000,000
	30-Apr-13	25/KM/IV/13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	25,000,000	
			1.1.3.03.01	Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD		25,000,000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	25,000,000	
			8.1.3.01.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pd PD		25,000,000
7	31-Jul-13	31/KM/VII/13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	70,000,000	
			1.1.2.02.01	Deposito Jangka Pendek		70,000,000
			1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	1,400,000	
			8.1.4.04.01	Pendapatan Bunga Deposito - LO		1,400,000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	1,400,000	
			4.1.4.04.01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA		1,400,000
8	10-Sep-13	59/KM/9/13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	110,000,000	
			8.4.1.01.06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka		10,000,000
			1.2.2.01.02	Penyertaan Modal kpd BUMD		100,000,000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	110,000,000	
			7.1.3.01.02	Hasil Penjualan Penyertaan Modal pd BUMD		110,000,000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Tanda Bukti Pembayaran
2. Perda Penanaman Modal
3. Surat Perintah Pembayaran
4. Surat Perintah Pembayar
5. Surat Perintah Pencairan Dana
6. Dokumen Pengumuman Pembagian Deviden
7. Tanda Bukti Penerimaan
8. Laporan Keuangan Perusahaan
9. Dokumen Transaksi

## **AKUNTANSI KEWAJIBAN**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Akuntansi Kewajiban pada PPKD Kabupaten dilakukan oleh fungsi Akuntansi PPKD. Sistem dan prosedur Akuntansi Kewajiban ini meliputi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

### **B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

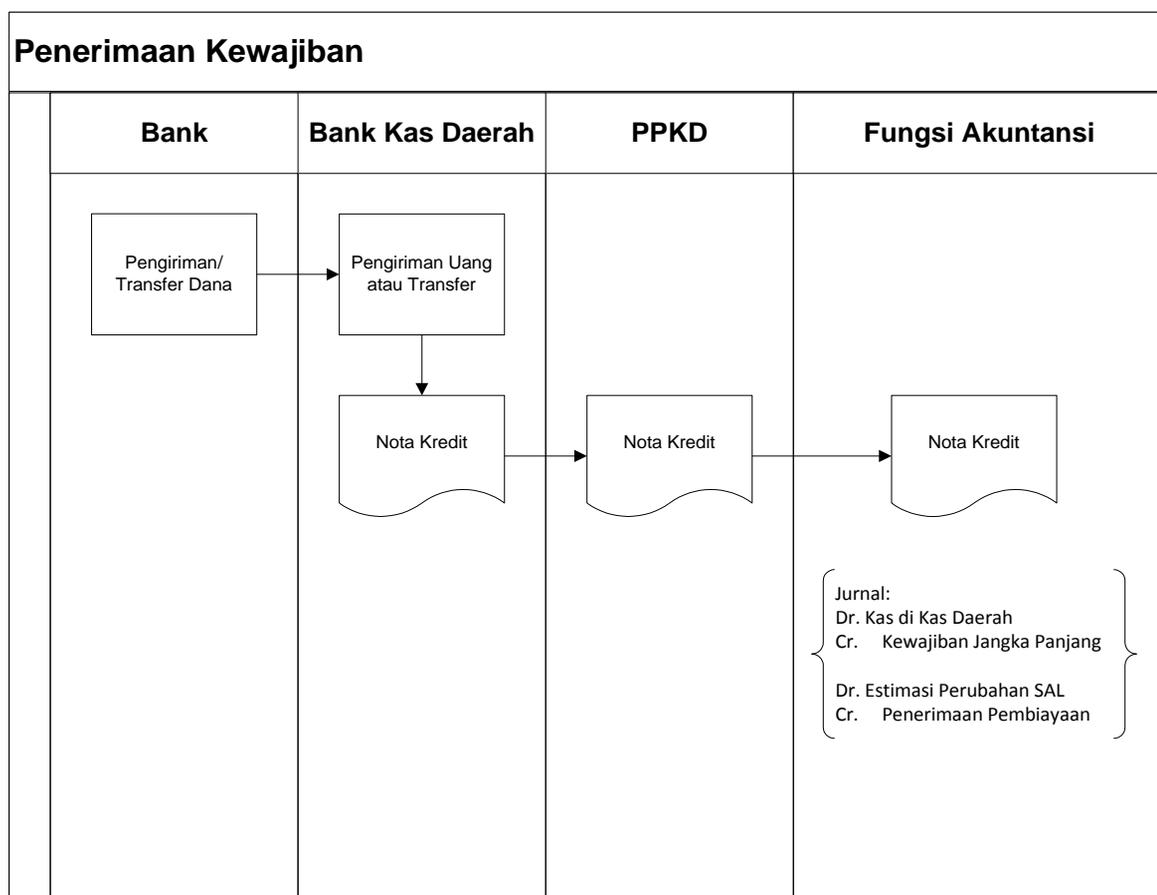
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban adalah:

1. Fungsi Akuntansi PPKD Kabupaten Serang
2. Bendahara PPKD Kabupaten Serang
3. PPKD Kabupaten Serang
4. Kuasa BUD Kabupaten Serang
5. Pihak Ketiga/Bank dll.

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Pencatatan beban level PPKD dapat dilihat dalam *flowchart* berikut ini:

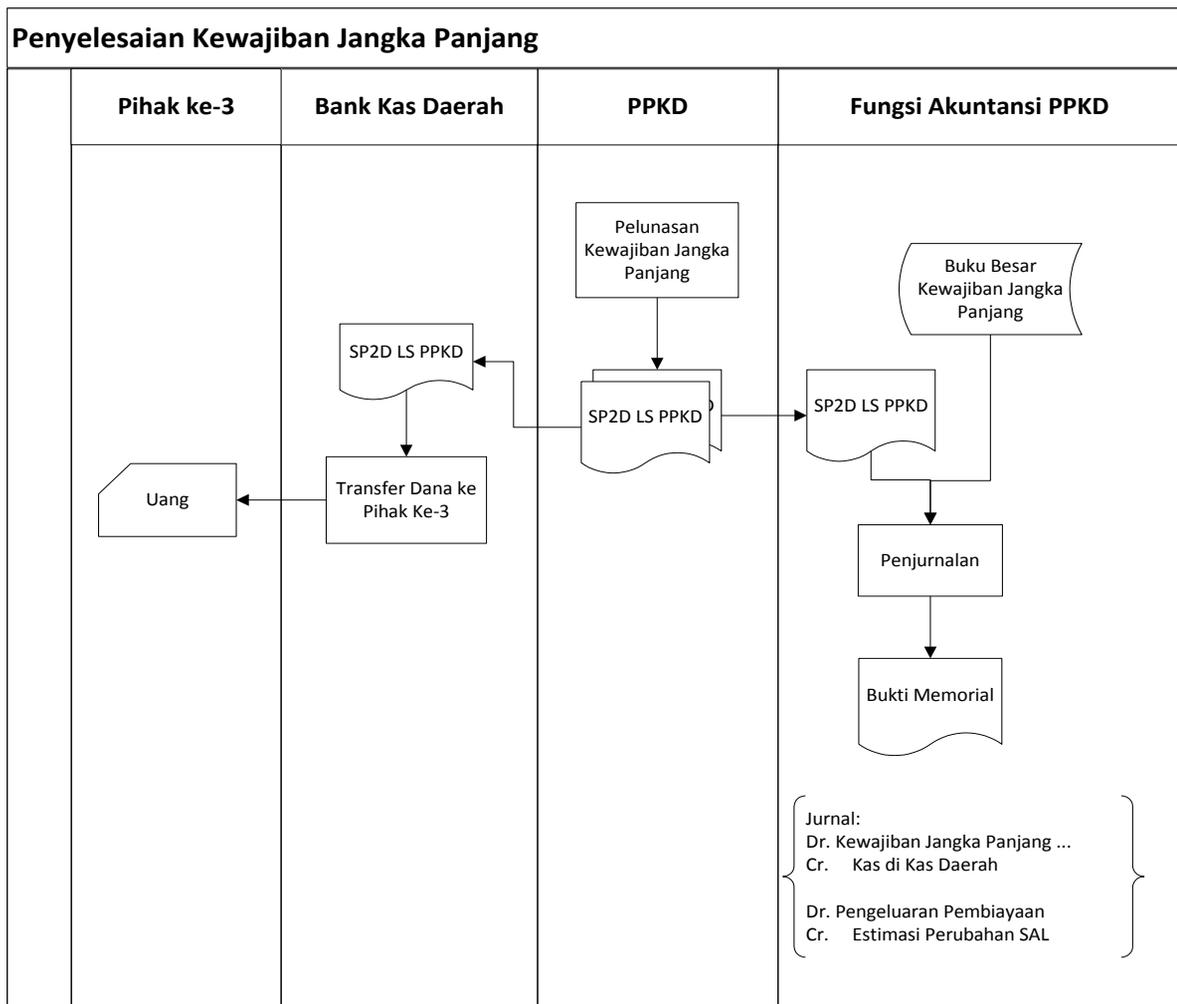
**1. Penerimaan Kewajiban**



Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx
Kewajiban Jangka Panjang .....	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx

## 2. Penyelesaian Kewajiban



Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang.....	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

## 3. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat “Kewajiban

Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang				xxx
Bagian Lancar Panjang	Utang Jangka Panjang			xxx

#### D. CONTOH PENJURNALAN

##### Penerimaan Kewajiban

1. Pada tanggal 7 Januari 2013, Pemerintah Kabupaten Serang menerima pinjaman dari Bank Central senilai Rp. 250.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12%, yang dibayarkan setiap tanggal 7 Januari. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Januari 2018.
2. Pada tanggal 28 Februari 2013, Pemerintah Kabupaten Serang menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 100.000.000 dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Bunga dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret.
3. Pada tanggal 31 Maret 2013, Pemerintah Kabupaten Serang menerima pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank senilai Rp 150.000.000 dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan setahun dua kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pinjaman ini jatuh tempo dalam lima tahun mendatang.

##### Pembayaran Bunga Kewajiban

4. Pada tanggal 1 Oktober 2013, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank.

##### Pelunasan Kewajiban

5. Pemerintah Kabupaten Serang melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 75.000.000. SP2D LS untuk pelunasan kewajiban jangka panjang ini terbit pada tanggal 10 November 2013.

##### Reklasifikasi Kewajiban

6. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Kabupaten Serang melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank PQR atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp 50.000.000.

**Penyesuaian Bunga**

7. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Kabupaten Serang mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Central, Pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non Bank.

Atas transaksi-transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU JURNAL PPKD**

Halaman :

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	07-Jan-13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
		2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		250.000.000
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	250.000.000	
		7.1.4.01.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank Central		250.000.000
2	28-Feb-13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
		2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Pusat		100.000.000
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	100.000.000	
		7.1.4.04.01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		100.000.000
3	31-Mar-13	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	150.000.000	
		2.2.1.02.01	Utang dari LKBB		150.000.000
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	150.000.000	
		7.1.4.02.01	Pinjaman Dalam Negeri dari LKBB		150.000.000
4	01-Oct-13	9.1.3.01.04	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB	9.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		9.000.000
		5.1.3.01.04	Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB	9.000.000	
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		9.000.000
5	10-Nov-13	2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000	
		1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		75.000.000
		7.2.3.06.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pmerintah Kab/Kota	75.000.000	
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		75.000.000
6	31-Dec-13	2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	50.000.000	
		2.1.3.01.03	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank PQR		50.000.000
7	31-Dec-13	9.1.3.01.03	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Bank	30.000.000	
		2.1.2.04.01	Utang Bunga kpd Bank		30.000.000
	31-Dec-13	9.1.3.01.01	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Pemerintah Pusat	8.333.333	

	2.1.2.01.01	Utang Bunga kpd Pemerintah Pusat		8.333.333
31-Dec-13	9.1.3.01.04	Beban Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB	4.500.000	
	2.1.2.04.02	Utang Bunga kpd LKBB		4.500.000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Nota Kredit
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3. Perjanjian Pinjaman

## JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

### A. JURNAL

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

#### BUKU JURNAL PPKD

Halaman:

Tgl	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	6	7

.....  
**Fungsi Akuntansi PPKD**

(nama lengkap)

NIP.

Cara pengisian:

1. **Tanggal** diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam bukti transaksi.
2. **Nomor Bukti** diisi dengan nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.
3. **Kode Rekening** diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja subsidi adalah :

1.20.1.20.00.00.00.5.1.3.01.01

1.20	Kode urusan
1.20.00	Kode organisasi
00.00	Kode Program & Kegiatan
5.1.3.01.01	Rincian obyek belanja

4. **Uraian** diisi dengan dengan uraian kode rekening, misalnya “Belanja Subsidi”.

5. **Debit** diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di debit.
6. **Kredit** diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di kredit.

## B. BUKU BESAR

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi pada jurnal adalah *posting* ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-*posting* atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU BESAR PPKD**

KODE REKENING : .....  
 NAMA REKENING : .....  
 PAGU APBD : .....  
 PAGU PERUBAHAN APBD : .....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6

.....  
**Fungsi Akuntansi PPKD**

NIP.

Cara pengisian:

1. **Kode Rekening** diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya.  
Misalnya
2. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.2.03.01

1.07	Kode urusan
1.07.01	Kode organisasi
01.02	Kode Program & Kegiatan
5.1.2.03.01	Rincian obyek belanja

3. **Nama Rekening** diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya.

4. **Pagu APBD** diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA PPKD. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan.
5. **Pagu Perubahan APBD** diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan PPKD. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan.
6. **Tanggal** diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam jurnal yang bersangkutan.
7. **Uraian** diisi dengan dengan penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang diposting.
8. **Ref** diisi dengan referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa jurnal yang diposting tersebut.
9. **Debit** diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom debit.
10. **Kredit** diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom kredit.
11. **Saldo** diisi dengan saldo akumulasi.

Berikut akan diberikan contoh posting untuk salah satu jurnal, yaitu jurnal beban:

<b>Tgl</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
17 Mei	1.20.1.20.00.9.1.4.0 3.01	Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa	60.000.000	
	1.20.1.20.00.1.1.1.0 1.01	Kas di Kas Daerah		60.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU BESAR**

SKPD : PPKD  
 KODE REKENING : 1.20.1.20.00.9.1.4.03.01  
 NAMA REKENING : Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa  
 PAGU APBD : Rp. 60.000.000  
 PAGU PERUBAHAN APBD : -

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
1	2	3	4	5	6
17 Mei	Pembayaran hibah	JU hal. 2*	60.000.000		60.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU BESAR**

SKPD : PPKD  
 KODE REKENING : 1.20.1.20.00.1.1.1.01.01  
 NAMA REKENING : Kas di Kas Daerah  
 PAGU APBD : -  
 PAGU PERUBAHAN APBD : -

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ref</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
1	2	3	4	5	6
17 Mei	Pembayaran hibah	JU hal. 2*	60.000.000		60.000.000

### C. NERACA SALDO

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU BESAR PPKD**

**KoRek :** 1.20.1.20.00.1.1.11.01.01

**Nama :** RK Dinas Pendidikan

<b>Tgl</b>	<b>Ref</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
SA			0	
05-Jan		Gaji dan Tunjangan Januari	16.000.000	
06-Jan		UP	30.000.000	
05-Feb		Gaji dan Tunjangan Februari	16.000.000	
05-Mar		Gaji dan Tunjangan Maret	16.000.000	
06-Apr		Gaji dan Tunjangan April	16.000.000	
18-Apr		GU	22.000.000	
05-Mei		Gaji dan Tunjangan Mei	16.000.000	
04-Jun		Gaji dan Tunjangan Juni	16.000.000	
05-Jul		Gaji dan Tunjangan Juli	16.000.000	
05- Agust		Gaji dan Tunjangan Agustus	16.000.000	
05-Sep		Gaji dan Tunjangan September	16.000.000	
07-Sep		GU	25.000.000	
05-Okt		Gaji dan Tunjangan Oktober	16.000.000	
05-Nop		Gaji dan Tunjangan November	16.000.000	
04-Des		Gaji dan Tunjangan Desember	16.000.000	
31-Des	<b>Saldo</b>		<b>269.000.000</b>	

Saldo akhir (tanggal 31 Desember 2014) rekening RK Dinas Pendidikan sebesar Rp. 269.000.000 tersebut dicatat di neraca saldo pada baris rekening RK Dinas Pendidikan di kolom debit.

**PPKD KABUPATEN SERANG  
Neraca Saldo Setelah Disesuaikan per 31 Desember 2014**

<b>No</b>	<b>Kode Rek.</b>	<b>Uraian</b>	<b>NS Setelah Penyesuaian</b>	
			<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
1	1.1.01	Kas di Kas Daerah	5.298.000.000	
2	1.2.01	Estimasi Pendapatan	75.000.000.000	
3	1.3.01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	
4	1.4.01	Piutang DAU	50.000.000.000	
5	1.4.02	Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000	
6	1.5.01	Investasi Jangka Pendek	300.000.000	
7	1.5.02	Investasi Jangka Panjang	2.070.000.000	
8	1.10.01	RK Dinas Perhubungan	73.000.000	
9	1.10.02	RK Dinas Pendidikan	269.000.000	
10	2.1.01	Apropriasi Belanja		77.500.000.000
11	2.2.01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		7.500.000.000
12	2.4.01	Kewajiban Jangka Panjang		3.000.000.000
13	3.1.01	Ekuitas		4.070.000.000

*SAPD Kabupaten Serang*

14	3.2.01	Estimasi Perubahan SAL	1.640.000.000	
15	4.2.01	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA		1.000.000.000
16	5.1.13	Belanja Hibah	60.000.000	
20	7.1.01	Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000	
21	7.2.01	Penerimaan Pembiayaan		3.000.000.000
17	8.1.01	Pendapatan DAU - LO		50.000.000.000
18	8.2.01	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO		3.000.000.000
19	9.2.13	Beban Hibah	60.000.000	
<b>Total</b>			<b>149.070.000.000</b>	<b>149.070.000.000</b>

....., tanggal.....

**Fungsi Akuntansi PPKD**

(nama lengkap)  
NIP.

## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

### A. KETENTUAN UMUM

Laporan Keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut PP 71/2010, terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD:



### B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

#### 1. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- Membuat laporan keuangan PPKD

## 2. PPKD

Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas:

- Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum melakukan proses konsolidasi dengan laporan keuangan SKPD
- Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

#### **Langkah 1 (Penyiapan Kertas Kerja)**

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) 6 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

#### **Format dokumen kertas kerja (worksheet)**

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada disetiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo (NS)		Penyesuaian		NS Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	D

#### **Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo)**

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut:

<b>Ilustrasi Kertas Kerja PPKD Setelah Neraca Saldo</b>
---

No.	Uraian	NS PPKD		Jurnal Penyesuaian		NS PPKD Setelah Penyesuaian	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Kas di Kas Daerah	5.298.000.000					
2	Estimasi Pendapatan	75.000.000.000					
3	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000					
4	Piutang DAU	50.000.000.000					
5	Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000					
6	Investasi Jangka Pendek	300.000.000					
7	Investasi Jangka Panjang	2.070.000.000					
8	RK SKPD A	73.000.000					
9	RK SKPD B	269.000.000					
10	Apropriasi Belanja		77.500.000.000				
11	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		7.500.000.000				
12	Utang Bunga						
13	Kewajiban Jangka Panjang		3.000.000.000				
14	Ekuitas		4.070.000.000				
15	Estimasi Perubahan SAL	1.640.000.000					
16	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA		1.000.000.000				
17	Belanja Hibah	60.000.000					
18	Penerimaan Pembiayaan		3.000.000.000				
19	Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000					
20	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO		3.000.000.000				
21	Pendapatan DAU - LO		50.000.000.000				
22	Beban Bunga						
23	Beban Hibah	60.000.000					
	<b>TOTAL</b>	<b>149.070.000.000</b>	<b>149.070.000.000</b>				

**Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian)**

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- Koreksi kesalahan
- Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- Pemindahbukuan
- Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun

Contoh jurnal penyesuaian adalah:

<b>Pengakuan</b>	Beban Bunga	xxx
<b>Utang Bunga</b>	Utang Bunga	xxx

Berikut contoh proses di atas.

Pada tanggal 1 Januari 2011 Pemda memiliki utang bank senilai 120 Juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Atas obligasi tersebut Pemda harus membayar bunga sebesar 10% per tahun yang dibayar tiap tanggal 1 Januari. Pada tanggal 31 Desember, Basis AkruaI sudah mengakui adanya beban bunga atas bunga obligasi dari bulan Januari hingga Desember. Oleh karena itu, PPKD harus membuat jurnal penyesuaian dengan mencatat “Beban bunga” di sisi debit dan “Utang bunga” di sisi kredit.

1.20.1.20.00.	Beban Bunga	1.200.000	
1.20.1.20.00.	Utang Bunga		1.200.000

#### **Langkah 4 (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian)**

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

<b>Ilustrasi Kertas Kerja PPKD Setelah Penyesuaian</b>
--

**Kertas Kerja Setelah Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Serang**

No.	Uraian	NS PPKD		Jurnal Penyesuaian		NS PPKD Setelah Penyesuaian	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	Kas di Kas Daerah	5.298.000.000				5.298.000.000	
2	Estimasi Pendapatan	75.000.000.000				75.000.000.000	
3	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000				10.000.000.000	
4	Piutang DAU	50.000.000.000				50.000.000.000	
5	Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000				2.000.000.000	
6	Investasi Jangka Pendek	300.000.000				300.000.000	
7	Investasi Jangka Panjang	2.070.000.000				2.070.000.000	
8	RK SKPD A	73.000.000				73.000.000	
9	RK SKPD B	269.000.000				269.000.000	
10	Apropriasi Belanja		77.500.000.000				77.500.000.000
11	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		7.500.000.000				7.500.000.000
12	Utang Bunga				1.200.000		1.200.000
13	Kewajiban Jangka Panjang		3.000.000.000				3.000.000.000
14	Ekuitas		4.070.000.000				4.070.000.000
15	Estimasi Perubahan SAL	1.640.000.000				1.640.000.000	
16	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA		1.000.000.000				1.000.000.000
17	Belanja Hibah	60.000.000				60.000.000	
18	Penerimaan Pembiayaan		3.000.000.000				3.000.000.000
19	Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000				2.300.000.000	
20	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO		3.000.000.000				3.000.000.000
21	Pendapatan DAU - LO		50.000.000.000				50.000.000.000
22	Beban Bunga			1.200.000		1.200.000	
23	Beban Hibah	60.000.000				60.000.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>149.070.000.000</b>	<b>149.070.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>149.071.200.000</b>	<b>149.071.200.000</b>

**Langkah 5 (Membuat LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA)**

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, 6 dan 7) dan kemudian membuat "Laporan Realisasi Anggaran".

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom "Laporan Realisasi Anggaran" dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom (tidak *balance*). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai "SILPA tahun berjalan". Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja	xxx
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx
<b>Estimasi Perubahan SAL</b>	<b>xxx</b>
Estimasi Pendapatan	xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx

**atau**

Apropriasi Belanja	xxx
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx
<b>Estimasi Perubahan SAL</b>	<b>xxx</b>
Estimasi Pendapatan	xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan - LRA	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
<b>Surplus - LRA</b>	<b>xxx</b>

**atau**

Pendapatan – LRA	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
<b>Defisit – LRA</b>	<b>xxx</b>
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx

- c. Jurnal Penutup untuk menutupakun surplus/defisit – LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus- LRA	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

**atau**

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Defisit – LRA	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Dari contoh di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh LRA, jurnal penutupan LRA dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD
---

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**Laporan Realisasi Anggaran PPKD**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014**

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA		1.000.000.000
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>1.000.000.000</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.000.000.000</b>
<b>BELANJA</b>		
<b>BELANJA OPERASI</b>		
Belanja Hibah		60.000.000
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>60.000.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>60.000.000</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>940.000.000</b>
<b>PEM BIAYAAN</b>		
<b>PENERIMAAN PEM BIAYAAN</b>		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		3.000.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>3.000.000.000</b>
<b>PENGELUARAN PEM BIAYAAN</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.300.000.000
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>2.300.000.000</b>
<b>PEM BIAYAAN NETO</b>		<b>700.000.000</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>		<b>1.640.000.000</b>

<b>Jurnal Penutup LRA</b>			
	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA	1.000.000.000	
	Apropriasi Belanja	77.500.000.000	
	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000	
	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000.000	
	Belanja Hibah		60.000.000
	Estimasi Pendapatan		75.000.000.000
	Estimasi Penerimaan Pendapatan		10.000.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan		2.300.000.000
	Estiamsi Perubahan SAL		1.640.000.000

NS setelah Penutupan LRA			
No.	Uraian	Debet	Kredit
1	Kas di Kas Daerah	5.298.000.000	
2	Piutang DAU	50.000.000.000	
3	Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000	
6	Investasi Jangka Pendek	300.000.000	
7	Investasi Jangka Panjang	2.070.000.000	
4	RK Dinas Perhubungan	73.000.000	
5	RK Dinas Pendidikan	269.000.000	
8	Utang Bunga		1.200.000
9	Kewajiban Jangka Panjang		3.000.000.000
10	Ekuitas		4.070.000.000
11	SiLPA		
13	Pendapatan DAU - LO		50.000.000.000
12	Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO		3.000.000.000
14	Beban Bunga	1.200.000	
15	Beban Hibah	60.000.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>60.071.200.000</b>	<b>60.071.200.000</b>

**Langkah6 (Membuat LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO)**

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional (kode akun 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

<b>Penutupan LO</b>	Pendapatan _____ - LO	xxx	
	Pendapatan _____ - LO	xxx	
	Surplus (Defisit) - LO		xxx
	Beban _____		xxx
	Beban _____		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Dari contoh Neraca Saldo setelah Penutupan LO di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh LO, jurnal penutupan LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Ilustrasi Laporan Operasional PPKD
------------------------------------

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**Laporan Operasional PPKD**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014**

URAIAN	2014
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0</b>
PENDAPATAN TRANSFER	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	
Dana Bagi Hasil Pajak	3.000.000.000
Dana Alokasi Umum	50.000.000.000
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>53.000.000.000</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>53.000.000.000</b>
<b>BEBAN</b>	
Beban Bunga	1.200.000
Beban Hibah	60.000.000
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>61.200.000</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) - LO</b>	<b>52.938.800.000</b>

**Jurnal Penutup LO**

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO	3.000.000.000	
Pendapatan DAU - LO	50.000.000.000	
Surplus (Defisit) - LO		52.938.800.000
Beban Bunga		1.200.000
Beban Hibah		60.000.000

NS setelah Penutupan LO

No.	Uraian	Debet	Kredit
1	Kas di Kas Daerah	5.298.000.000	
2	Piutang DAU	50.000.000.000	
3	Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000	
4	Investasi Jangka Pendek	300.000.000	
5	Investasi Jangka Panjang	2.070.000.000	
6	RK Dinas Perhubungan	73.000.000	
7	RK Dinas Pendidikan	269.000.000	
8	Utang Bunga		1.200.000
9	Kewajiban Jangka Panjang		3.000.000.000
10	Surplus (Defisit) -LO		52.938.800.000
11	Ekuitas		4.070.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>60.010.000.000</b>	<b>60.010.000.000</b>

**Langkah 7 (Membuat Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir)**

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas.

<b>Penutupan akhir</b>	Surplus (Defisit)– LO	xxx
	Ekuitas	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Dari contoh di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh Neraca, jurnal penutupan akhir dan Neraca Saldo Akhir.

Ilustrasi Neraca PPKD
-----------------------

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**Neraca PPKD**  
**Per 31 Desember 2014**

URAIAN	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Kas Daerah	5.298.000.000
Investasi Jangka Pendek	300.000.000
Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000
Piutang DAU	50.000.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>57.598.000.000</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	
Investasi Nonpermanen	
<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>0</b>
Investasi Permanen	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.070.000.000
RK Dinas Perhubungan	73.000.000
RK Dinas Pendidikan	269.000.000
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>2.412.000.000</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>2.412.000.000</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	
Dana Cadangan	0
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>60.010.000.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bunga	1.200.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>1.200.000</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	3.000.000.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.001.200.000</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>57.008.800.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>60.010.000.000</b>

<b>Jurnal Penutup Akhir</b>
-----------------------------

Surplus (Defisit) - LO	52.938.800.000	
Ekuitas		52.938.800.000

NS Akhir			
No.	Uraian	Debet	Kredit
1	Kas di Kas Daerah	5.298.000.000	
2	Piutang DAU	50.000.000.000	
3	Piutang Bagi Hasil PPh 21	2.000.000.000	
4	Investasi Jangka Pendek	300.000.000	
5	Investasi Jangka Panjang	2.070.000.000	
6	RK Dinas Perhubungan	73.000.000	
7	RK Dinas Pendidikan	269.000.000	
8	Utang Bunga		1.200.000
9	Kewajiban Jangka Panjang		3.000.000.000
10	Ekuitas		57.008.800.000
	<b>TOTAL</b>	<b>60.010.000.000</b>	<b>60.010.000.000</b>

### **Langkah 8 (Membuat Laporan Perubahan Ekuitas)**

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**Laporan Perubahan Ekuitas PPKD**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Januari 2014**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	4.070.000.000
SURPLUS (DEFISIT) - LO	52.938.800.000
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0
LAIN-LAIN	0
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>57.008.800.000</b>

### **Langkah 9 (Membuat Catatan atas Laporan Keuangan)**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PPKD**

<b>PENDAHULUAN</b>		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah PPKD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD
	5.1.1	Pendapatan- LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Transfer
	5.1.4	Pembiayaan
	5.1.5	Pendapatan - LO
	5.1.6	Beban
	5.1.7	Aset
	5.1.8	Kewajiban
	5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada PPKD.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan PPKD	
Bab VII	Penutup	

Surat Pertanyaan Tanggung Jawab

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

**PPKD KABUPATEN SERANG**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan PPKD Kabupaten Serang Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

PPKD

(.....)

NIP.

  
BUPATI SERANG,  
A. TAUFIK NURIMAN

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERANG**

Nomor : 56 Tahun 2014

Tanggal : 15 Desember 2014

Tentang: Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah  
Kabupaten Serang**PENDAHULUAN****C. SKPD SEBAGAI ENTITAS AKUNTANSI**

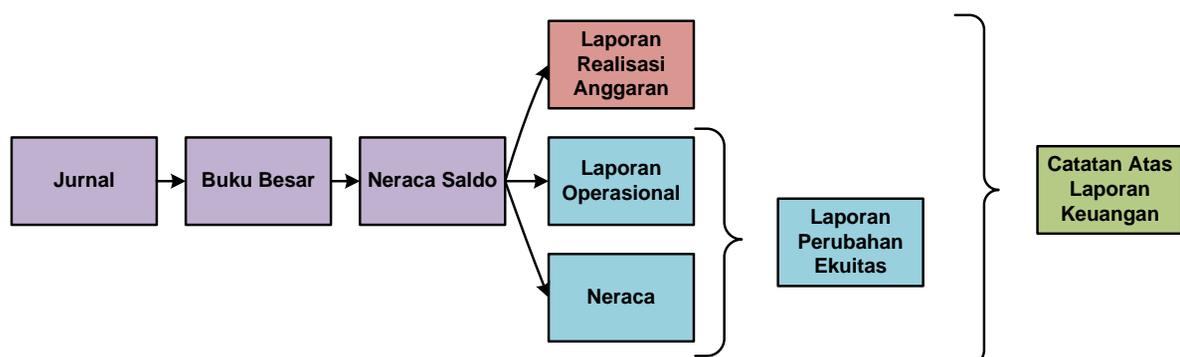
Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada tahap berikutnya, laporan keuangan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan menjadi Laporan Keuangan Konsolidasian.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi ini dapat berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, atau unit pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan daerah tentang struktur organisasi.

**D. SIKLUS AKUNTANSI SKPD**

Kegiatan akuntansi pada SKPD dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Proses tersebut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Identifikasi transaksi adalah proses meneliti kejadian atau peristiwa mana saja kejadian yang memiliki dampak pada posisi keuangan. Transaksi tersebut dapat berupa pendapatan-LO atau pendapatan-LRA, beban atau belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Transaksi tersebut harus dipastikan memiliki dokumen sumber yang jelas dan spesifik sebagai dasar pencatatan di tahap berikutnya.

Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi secara kronologis pada sebuah buku yang disebut buku jurnal. Pencatatan tersebut harus berdasarkan dokumen sumber yang didapat oleh PPK dari pihak yang terkait. Penjurnalan menjadi fase yang sangat penting dan krusial karena pada tahap ini ditentukan posisi Debit atau Kredit atas setiap akun yang terlibat.

Penjurnalan yang dilakukan merepresentasikan basis akuntansi yang digunakan. Seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Namun dalam tahap awal penerapannya, Pemerintah Kabupaten Serang menerapkan basis akrual dengan kebijakan pengakuan masih berdasarkan basis kas, sedangkan pengukuran dan pengungkapan sudah mengikuti kaidah basis akrual.

Namun, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, dibuat pula jurnal-jurnal berbasis kas untuk transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penjurnalan pun akan dilakukan dua kali untuk setiap transaksi, yakni penjurnalan dengan basis akrual dan dengan basis kas.

Di tahap selanjutnya, PPK melakukan posting. Proses tersebut bertujuan untuk melakukan update pada buku besar secara periodik dengan cara menyalin informasi transaksi dalam buku jurnal ke buku besar. Transaksi yang sebelumnya dicatat secara kronologis dalam buku jurnal disalin ke dalam format buku besar yang sudah terpilah-pilah berdasarkan akun atau kode rekeningnya. Jadi, setiap akun atau kode rekening memiliki satu buku besar tersendiri.

Selanjutnya, PPK menyusun Neraca Saldo di akhir periode tertentu. Neraca Saldo merupakan sebuah tabel yang menampilkan saldo akhir dari setiap buku besar. Neraca Saldo disusun sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Bagan 1, kita dapat melihat bahwa ada 3 laporan keuangan yang bisa langsung disusun dari Neraca Saldo, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca. Selain ketiga laporan keuangan tersebut, PPK juga menyusun 2 laporan keuangan lainnya, yakni Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan turunan dari tiga laporan keuangan sebelumnya.

## PENCATATAN ANGGARAN

### A. KETENTUAN UMUM

Persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dengan melakukan pencatatan anggaran SKPD. Pada tahap ini dilakukan pencatatan terhadap anggaran yang nantinya akan membentuk estimasi perubahan SAL. Akun estimasi perubahan SAL merupakan akun perantara untuk mencatat transaksi realisasi anggaran. Estimasi perubahan SAL merupakan penghubung antara akun anggaran dan realisasinya.

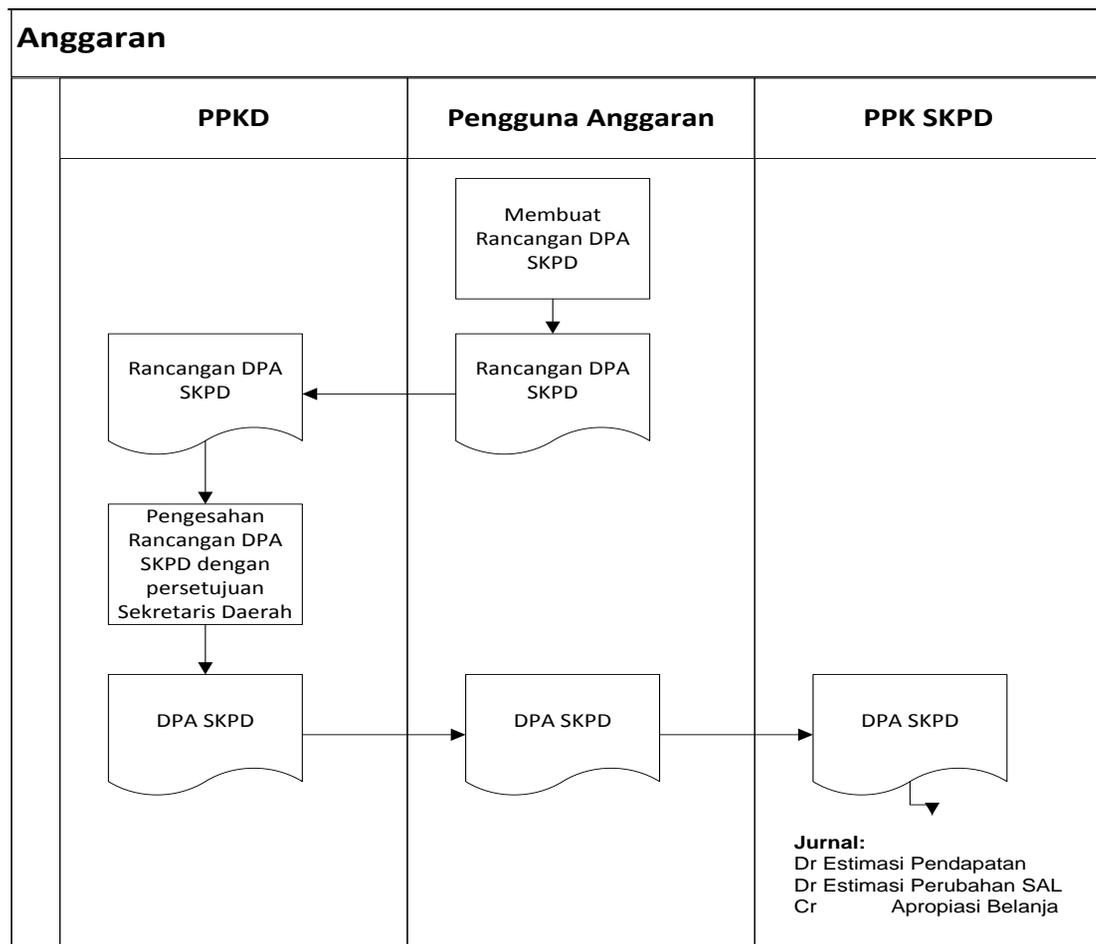
### B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak yang terlibat dalam pencatatan anggaran SKPD adalah

1. Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Serang
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) Kabupaten Serang

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan anggaran. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan terlebih dahulu *flowchart* yang menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya.



Ketika anggaran sudah ditetapkan, berdasarkan dokumen Pelaksana Anggaran SKPD (DPA-SKSP), PPK-SKPD melakukan penjurnalan atas anggaran tersebut dengan mencatat akun Estimasi Pendapatan dan Estimasi Penerimaan Pembiayaan di sisi debit sebesar nilai anggarannya, akun Apropriasi Belanja dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan di sisi kredit sebesar nilai anggarannya, dan akun Estimasi Perubahan SAL pencatatannya akan menjadi penyeimbang sisi debit atau sisi kredit. Apabila anggaran surplus, maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Namun, apabila anggaran defisit, maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi debit. Tabel berikut menunjukkan saldo normal akun-akun yang digunakan dalam pencatatan anggaran.

Akun	Debit	Kredit
Estimasi Pendapatan	√	
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	√	
Apropriasi Belanja		√
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		√
Estimasi Perubahan SAL	menyesuaikan	
Pendapatan-LRA		√
Penerimaan Pembiayaan		√
Belanja	√	
Pengeluaran Pembiayaan	√	

#### D. CONTOH PENJURNALAN

SKPD Kabupaten Serang menganggarkan pendapatannya sebesar Rp 600.000.000 dan menganggarkan belanjanya sebesar Rp 800.000.000

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	1-Jan-13	3.1.2.01.01	Estimasi Pendapatan	600,000,000	
		3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	200,000,000	
		3.1.2.03.01	Apropriasi Belanja		800,000,000

#### E. DOKUMEN TERKAIT

1. DPA SKPD

## **AKUNTANSI PENDAPATAN**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah menjadikan pencatatan pendapatan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan-LO dan pendapatan-LRA

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan pendapatan-LO sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencatatan akuntansi ini melekat pada siklus pendapatan Pemerintah Daerah. Berdasarkan sifatnya, pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori.

Kategori pertama adalah Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Air Permukaan.

Kategori kedua adalah Pendapatan Pajak Tipe B. Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya,

dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kategori ketiga adalah Pendapatan Retribusi Tipe A. Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Contoh pendapatan retribusi tipe A adalah retribusi jasa umum.

Kategori keempat adalah Pendapatan Retribusi Tipe B. Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKR terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sedangkan Pendapatan-LRA didefinisikan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pencatatan Pendapatan-LRA ini merupakan realisasi dari anggaran pendapatan.

Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dimunculkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Sehingga, pendapatan-LRA dicatat dan diakui ketika ada kas yang diterima oleh SKPD.

Sama dengan Pendapatan-LO, pendapatan-LRA juga dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori, yakni Pendapatan Pajak Tipe A, Pendapatan Pajak Tipe B, Pendapatan Retribusi Tipe A, dan Pendapatan Retribusi Tipe B.

## **B. PIHAK TERKAIT**

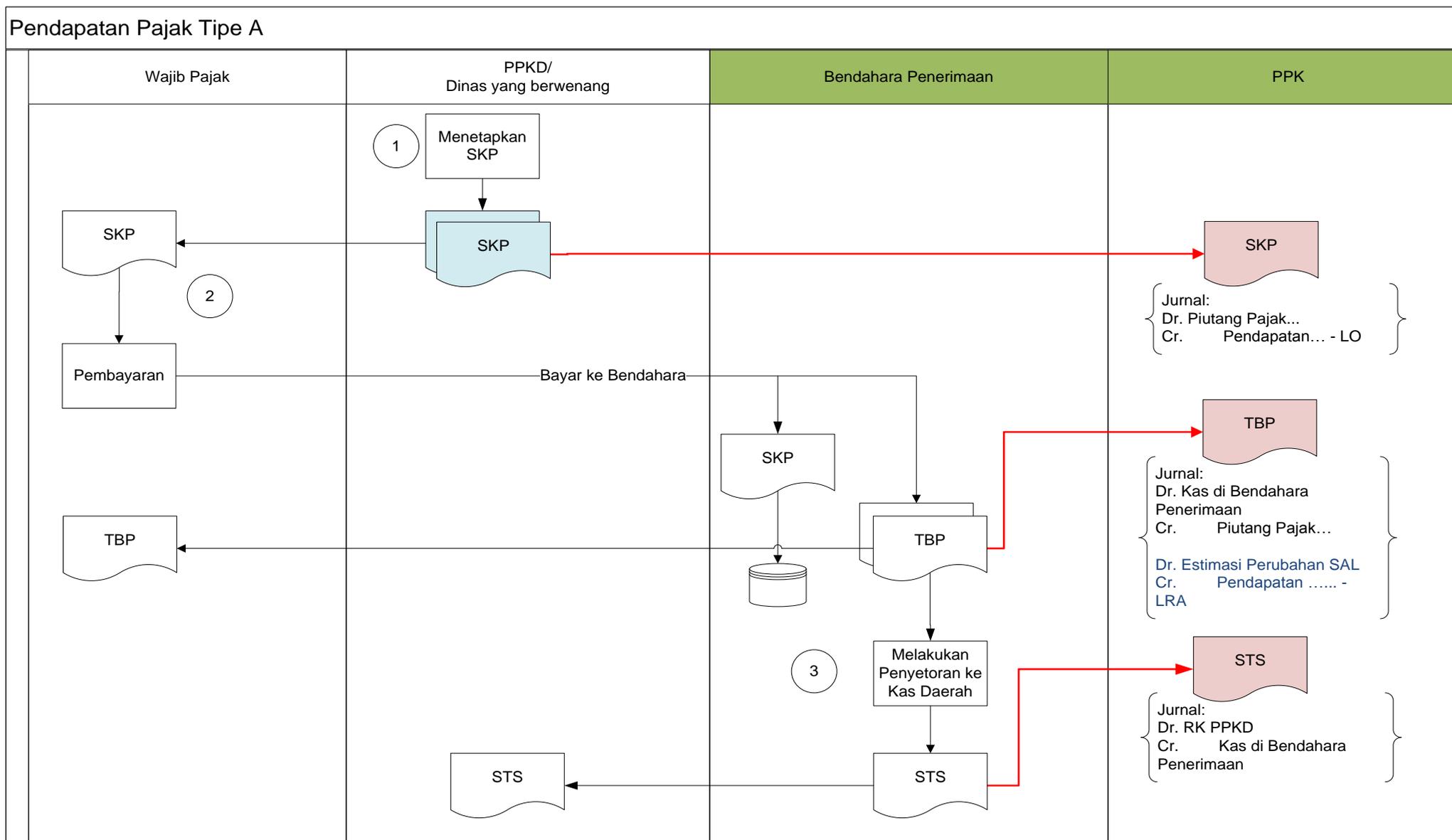
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan-LO adalah:

5. Wajib Pajak atau Retribusi
6. PPKD Kabupaten Serang
7. Bendahara Penerimaan SKPD Kabupaten Serang
8. PPK SKPD Kabupaten Serang

### **C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan-LO. Untuk mempermudah pemahaman, akan disajikan terlebih dahulu flowchart yang menggambarkan hubungan pihak-pihak terkait beserta aliran dokumennya.

### 5. Pendapatan Pajak Tipe A



- a. PPKD ataupun Dinas yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan rekapan SKP. Selanjutnya akan didistribusikan kepada PPK SKPD dan akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah. PPK SKPD akan mencatat “Piutang Pajak (sesuai rincian objek)” di sisi debit dan “Pendapatan – LO (sesuai rincian objek)” di sisi kredit.

Piutang Pajak ....	xxx
Pendapatan ...- LO	xxx

- b. Berdasarkan SKP tersebut, WP akan melakukan pembayaran pajak kepada Bendahara Penerimaan dengan menyerahkan SKP yang sebelumnya diberikan oleh dinas yang berwenang. Bendahara penerimaan kemudian akan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Salinan TBP dari Bendahara Penerimaan, PPK SKPD akan mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” pada sisi debit dan “Piutang Pajak (sesuai rincian objek)” di sisi kredit.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang Pajak...	xxx

- c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat transaksi penerimaan pembayaran pajak tersebut secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan-LRA (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ..... -LRA	xxx

- d. Atas pajak yang diterima tersebut, Bendahara Penerimaan akan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

RK PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx



- a. Wajib Pajak (WP) melakukan perhitungan terhadap pajak terhutang dilanjutkan dengan melakukan pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan menyerahkan salinannya kepada PPKD/Dinas yang berwenang, PPK SKPD, dan WP. PPK SKPD kemudian akan mencatat pengakuan pendapatan dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan-LO” di kredit sesuai dengan jenis pendapatan yang bersangkutan.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan .... -LO	xxx

Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat transaksi penerimaan pendapatan tersebut secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan-LRA (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ..... -LRA	xxx

- b. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan yang telah diterima ke rekening kas daerah. PPK SKPD akan mencatat transaksi penyetoran pendapatan di buku jurnal dengan “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

RK PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

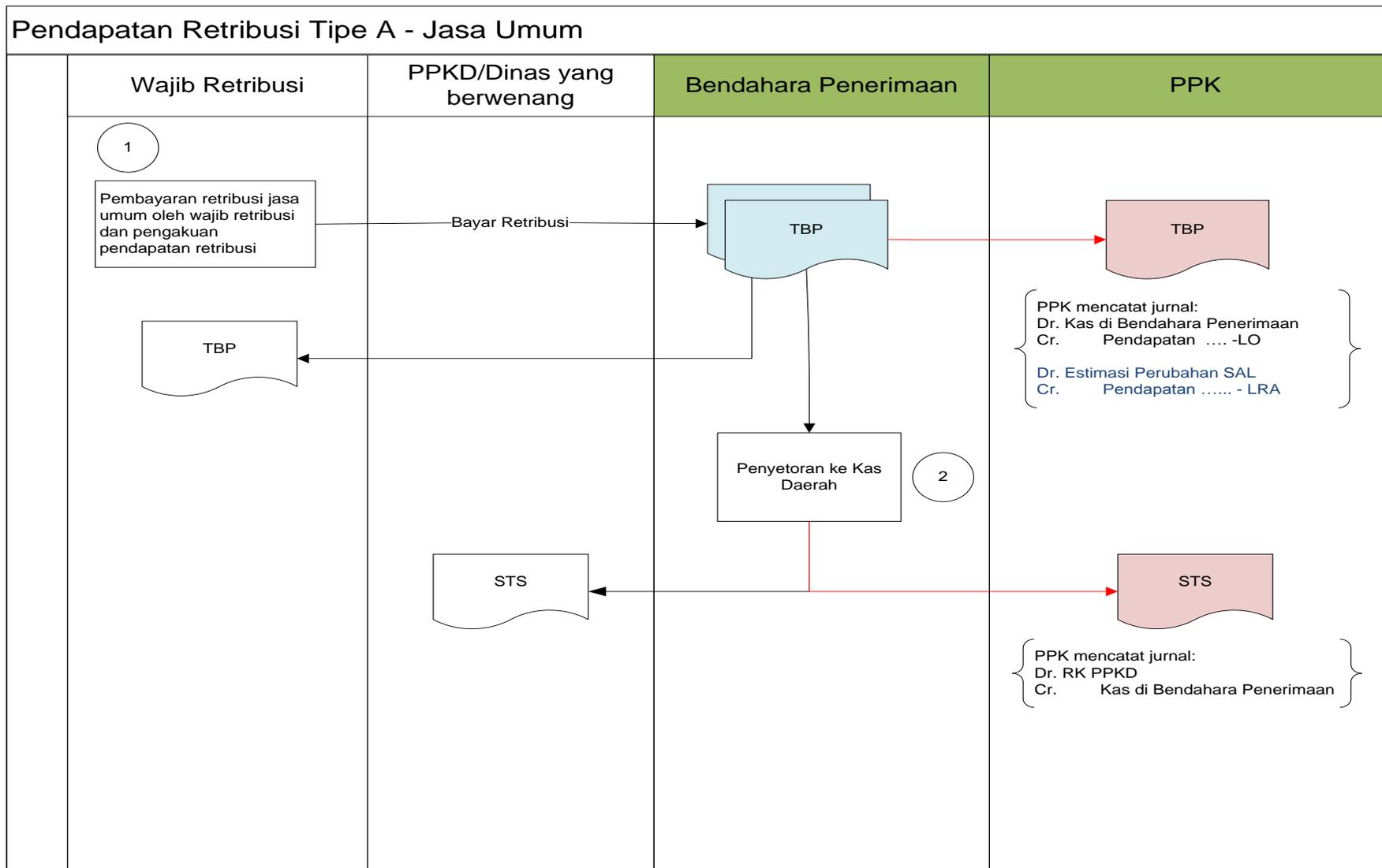
- c. Berdasarkan TBP, PPKD/Dinas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan dan kemudian akan menerbitkan surat ketetapan. Jika terdapat lebih bayar, maka PPK SKPD akan mengakui adanya utang kepada wajib pajak. PPK SKPD akan menjurnal “Pendapatan...-LO” di debit dan “Utang” di kredit.

Pendapatan .....-LO	xxx
Utang	xxx

- d. Namun, jika terdapat kurang bayar maka PPK SKPD akan mengakui adanya piutang pendapatan pajak. PPK akan menjurnal “Piutang Pendapatan ....” di debit dan “Pendapatan...-LO” di kredit.

Piutang Pendapatan .....	xxx
Pendapatan .....-LO	xxx

### 7. Pendapatan Retribusi Tipe A



- a. Pada saat Wajib Retribusi (WR) melakukan pembayaran, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang akan diserahkan PPK SKPD serta WP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan mencatat pengakuan pendapatan dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan-LO” di kredit sesuai dengan jenis pendapatan yang bersangkutan.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan .... -LO	xxx

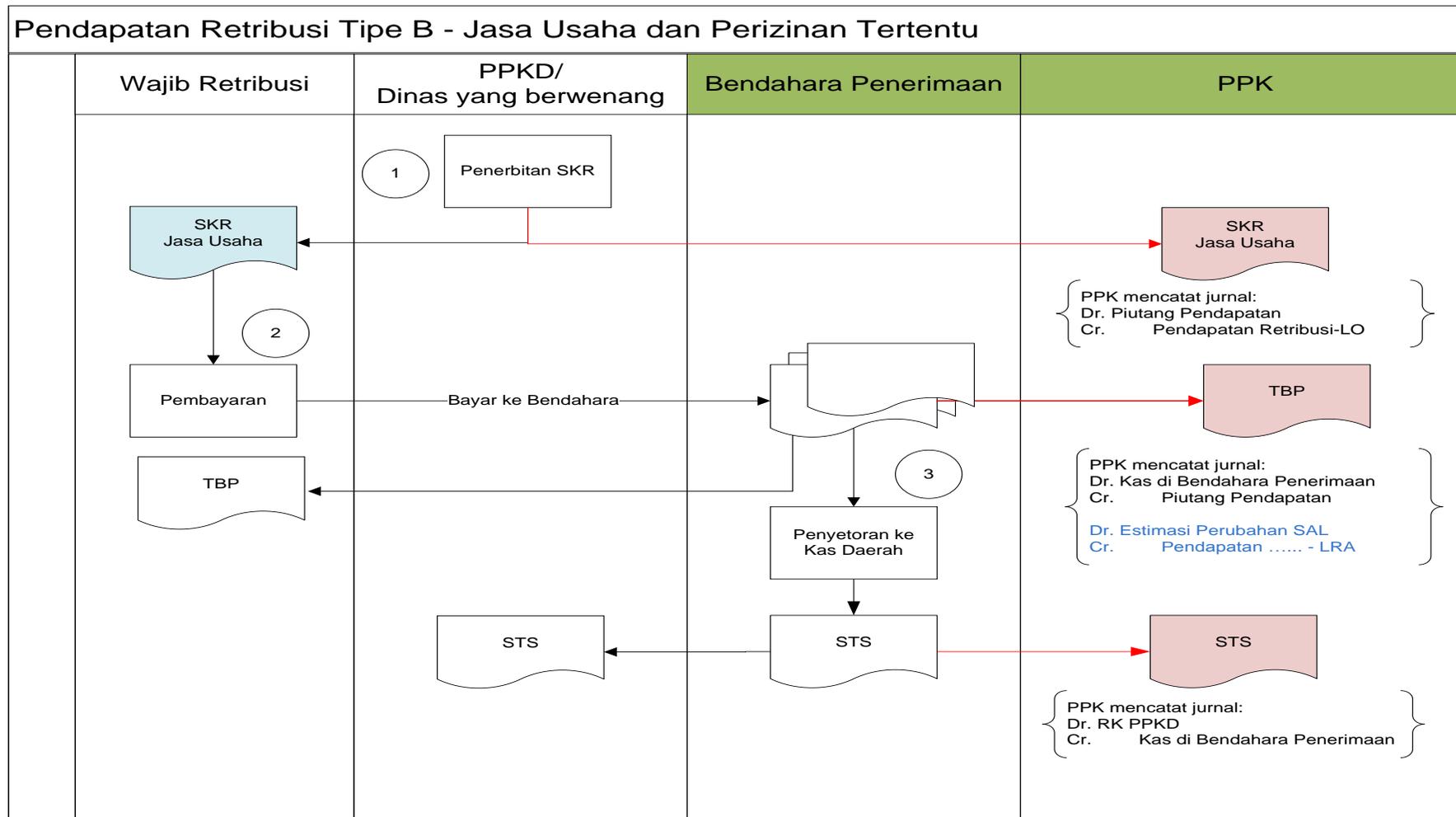
Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat transaksi penerimaan pendapatan tersebut secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan-LRA (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan..... -LRA	xxx

- b. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan yang telah diterima ke rekening kas daerah dengan mengisi STS dan menyerahkannya saat setor ke Kas Daerah. PPK SKPD akan menerima salinan STS sebagai dasar melakukan pencatatan akuntansi. Kemudian, PPK SKPD akan mencatat transaksi penyetoran pendapatan di buku jurnal dengan mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

RK PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

**8. Pendapatan Retribusi Tipe B**



- a. PPKD ataupun Dinas yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) untuk masa satu periode yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR). SKR tersebut kemudian diserahkan kepada WR dan salinannya didistribusikan kepada PPK SKPD sebagai dasar pencatatan piutang. Berdasarkan SKR tersebut, PPK SKPD akan mencatat “Piutang Pendapatan” di debit dan “Pendapatan Retribusi-LO” di kredit.

Piutang Pendapatan	xxx
Pendapatan Retribusi-LO	xxx

- b. Berdasarkan SKR yang telah diterima, WR akan langsung melakukan pembayaran retribusi dimuka untuk periode tertentu kepada Bendahara Penerimaan. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dan mendistribusikannya ke PPK serta WR. PPK SKPD akan mencatat penerimaan pembayaran retribusi dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” pada sisi debit dan “Pendapatan Retribusi-LO” di sisi kredit.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan Retribusi-LO	xxx

Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat transaksi penerimaan pembayaran retribusi tersebut secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan-LRA (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan ..... -LRA	xxx

- c. Atas retribusi yang diterima tersebut, Bendahara Penerimaan akan melakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran. Berdasarkan STS yang dilampiri dengan SKR terkait, PPK SKPD mencatat penyetoran pendapatan dengan menjurnal “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

RK PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

#### D. CONTOH PENJURNALAN

1. Tanggal 20 Februari 2014, Bendahara Penerimaan SKPD Kabupaten Serang menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp. 3.500.000. Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 2014.
2. Tanggal 5 Maret 2014, Bendahara Penerimaan SKPD Kabupaten Serang menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 5.000.000. Bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai Rp 500.000 atas pajak Hotel Samara. SKPKB atas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2014. Hotel Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 Maret 2014. Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28 Maret 2014.
4. Tanggal 31 Desember 2014, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp 7.500.000. Atas jumlah yang belum dibayar ini, SKPD Sentosa akan mengakuinya sebagai piutang retribusi.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BUKU JURNAL SKPD**

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	20-Feb-14	TBP 01/14	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	3.500.000	
			8.1.1.06.01	Pendapatan Pajak Hotel-LO		3.500.000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	3.500.000	
			4.1.1.06.01	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		3.500.000
	21-Feb-14	STS 01/14	3.1.3.01.01	RK PPKD	3.500.000	
			1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		3.500.000
2	05-Mar-14	TBP 02/14	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000	
			1.1.3.01.15	Piutang PBB		5.000.000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	5.000.000	
			4.1.1.15.01	Pendapatan PBB-LRA		5.000.000
	05-Mar-14	STS 02/14	3.1.3.01.01	RK PPKD	5.000.000	
			1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		5.000.000
3	22-Mar-14	SKPKB 01/14	1.1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	500.000	
			8.1.1.06.01	Pendapatan Pajak Hotel-LO		500.000
	27-Mar-14	TBP 03/14	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	500.000	
			1.1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel		500.000
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	500.000	
			4.1.1.06.01	Pendapatan PBB-LRA		500.000
	28-Mar-14	STS 03/14	3.1.3.01.01	RK PPKD	500.000	
			1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		500.000
4	31-Des-14	BM 01/14	1.1.3.02.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.500.000	
			8.1.2.01.05	Retibusi Yankes RSUD - LO		7.500.000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Surat Ketetapan Pajak
2. Tanda Bukti Pembayaran
3. Surat Tanda Setoran
4. Bukti Memorial

## **AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban akan belanja yang kita lakukan.

Akuntansi beban pada SKPD dilakukan oleh PPK SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi beban ini meliputi akuntansi beban pegawai dan beban barang.

#### **1. Beban Pegawai**

Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diterima oleh PPK. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

#### **2. Beban Barang**

Beban barang terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diterima

oleh PPK. Hal ini terjadi pada saat adanya pengajuan GU. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh PPK.

Khusus untuk beban persediaan, terdapat 2 (dua) alternatif pendekatan yang dapat digunakan sebagai metode pengakuan transaksi pembelian persediaan serta metode pencatatan persediaan.

Pengakuan persediaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Melalui pendekatan aset, setiap pembelian persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah langsung akan menambah aset yaitu pada akun persediaan. Melalui pendekatan beban, transaksi pembelian persediaan tidak secara langsung menambah akun persediaan, melainkan diakui sebagai beban.

Metode pencatatan persediaan terbagi dua, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Sedangkan penggunaan metode periodik dalam pencatatan persediaan hanya meminta pemutakhiran posisi akun persediaan di akhir periode (saat dilakukannya penyesuaian).

#### CONTOH JURNAL

	<b>Jurnal</b>
<b>Metode Perpetual</b>	<p><b>Pembelian persediaan:</b> Dr. Persediaan     Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p><b>Pemakaian persediaan:</b> Dr. Beban persediaan     Cr. Persediaan</p> <p><b>Di akhir periode/saat penyesuaian:</b> Tidak dilakukan penjurnalan</p>
<b>Metode Periodik</b>	<p><b>Pembelian persediaan:</b> Dr. Beban Persediaan     Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p><b>Pemakaian persediaan:</b> Tidak dilakukan penjurnalan</p> <p><b>Di akhir periode/saat penyesuaian:</b> Dr. Persediaan     Cr. Beban Persediaan</p>

**B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban dan belanja adalah:

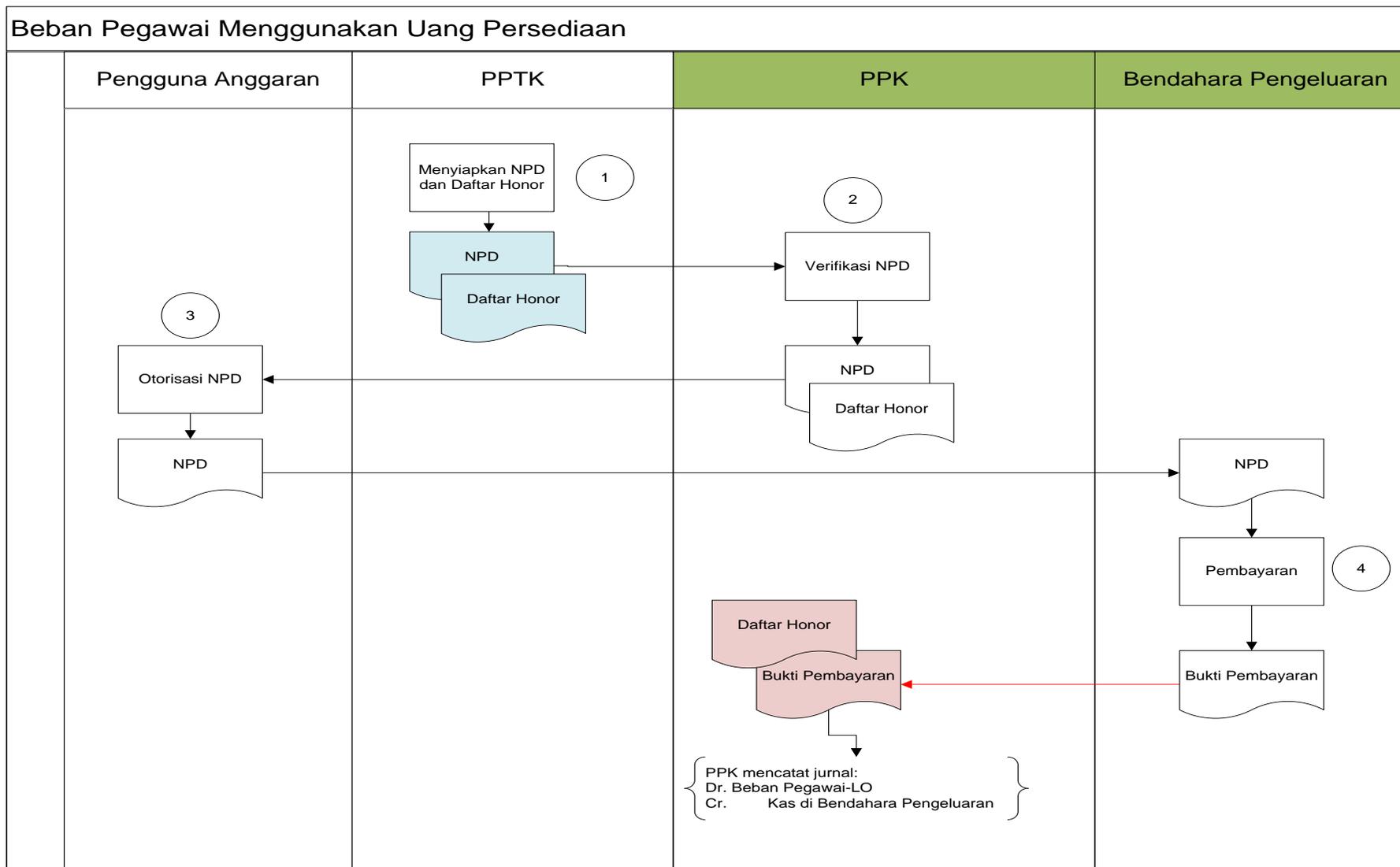
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kabupaten Serang
8. Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Serang
9. Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Serang
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Kabupaten Serang

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

Pencatatan beban pegawai baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS dapat dilihat dalam *flowchart* berikut ini:

**1. BEBAN PEGAWAI**

**a. Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan**



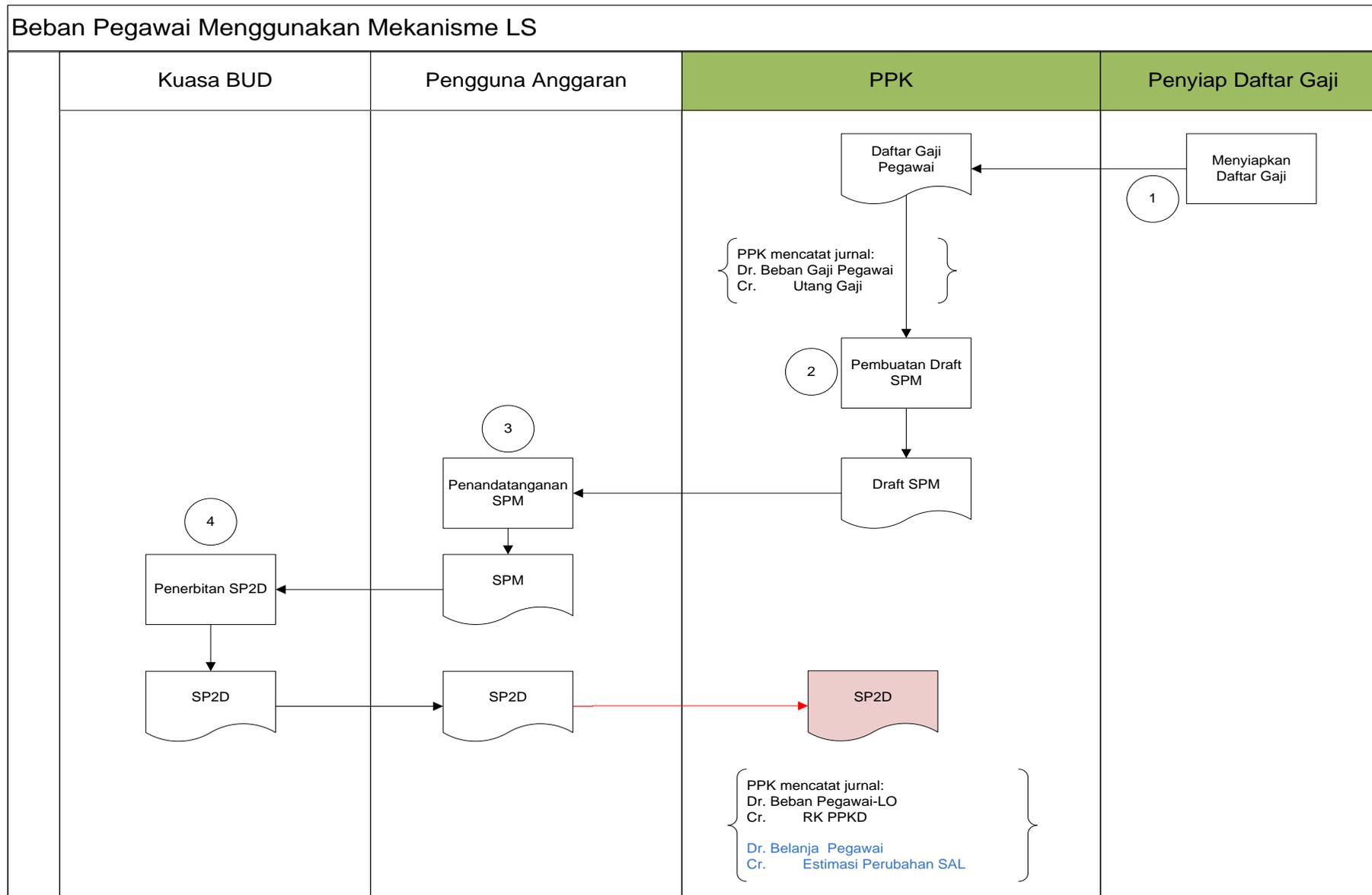
PPTK menyiapkan Nota Permintaan Dana (NPD) dan Daftar Honor kemudian mengajukannya kepada PPK SKPD untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh PPK SKPD, NPD tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran akan mengotorisasi NPD tersebut dan menyerahkannya ke Bendahara Pengeluaran. Atas dasar NPD yang telah diotorisasi, Bendahara Pengeluaran akan melakukan pembayaran atau transfer dana ke PPTK atau Pihak Ketiga. Bukti Pembayaran atas transaksi tersebut oleh Bendahara Pengeluaran akan diserahkan kepada PPK SKPD. Kemudian atas pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bagian Verifikasi dan akuntansi akan mencatat jurnal “Beban Pegawai-LO” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit dengan jurnal:

Beban Pegawai-LO	xxx
Kas di bendahara pengeluaran	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran belanja pegawai, PPK SKPD khususnya bagian verifikasi dan akuntansi mencatat “Belanja Pegawai” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Pegawai-LO	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

**b. Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS**



- a. Daftar gaji yang telah disiapkan disampaikan kepada PPK SKPD untuk diverifikasi. Kemudian, PPK membuat Draft SPM. Draft SPM tersebut selanjutnya didistribusikan ke Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani SPM lalu menyerahkannya ke Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D. Kuasa BUD kemudian menerbitkan SP2D dan mendistribusikannya kepada Penggunaan Anggaran dan PPK SKPD. Berdasarkan salinan SP2D LS Gaji tersebut, PPK SKPD akan mencatat transaksi belanja gaji dengan menjurnal “Beban Pegawai-LO” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Beban Pegawai-LO	xxx
RK PPKD	xxx

- b. Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Gaji Pegawai” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Gaji Pegawai	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

Belanja gaji tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

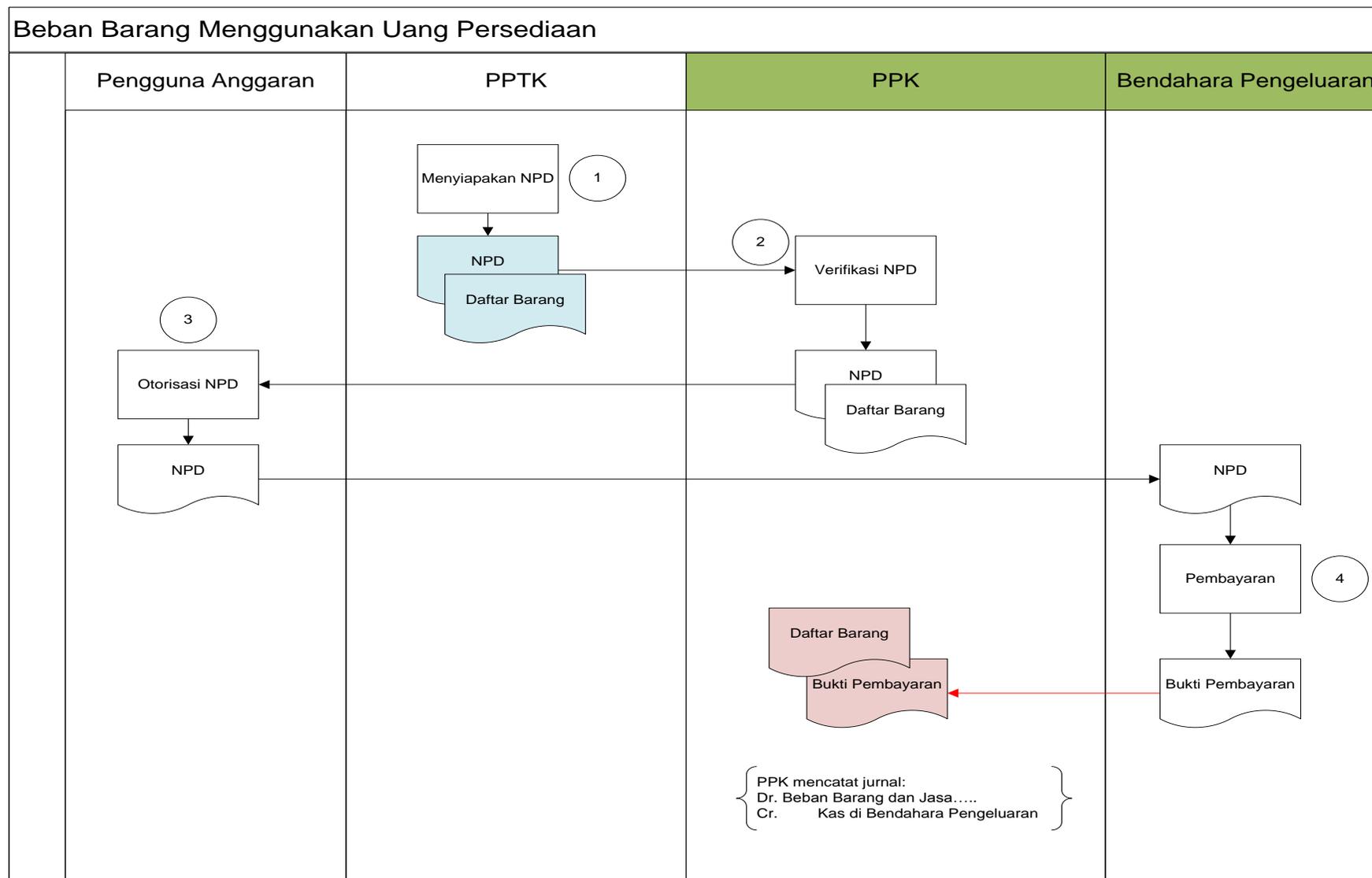
### c. Pengajuan Ganti Uang Persediaan

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK SKPD khususnya bagian Verifikasi dan akuntansi untuk mencatat “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendaharan Pengeluaran	xxx
RK PPKD	xxx

**2. BEBAN BARANG**

**a. Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan**



PPTK menyiapkan Nota Permintaan Dana (NPD) dan Daftar Barang kemudian mengajukannya kepada PPK SKPD untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, PPK SKPD akan mengajukan NPD tersebut kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi dan didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran. Atas dasar NPD yang telah diotorisasi, Bendahara Pengeluaran akan melakukan pembayaran atau transfer dana ke PPTK atau Pihak Ketiga. Bukti Pembayaran serta Daftar Barang atas transaksi tersebut oleh Bendahara Pengeluaran akan diserahkan kepada PPK SKPD. Kemudian atas pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK akan mencatat jurnal "Beban barang dan Jasa..." di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit.

Beban barang dan jasa	xxx
Kas di bendahara pengeluaran	xxx

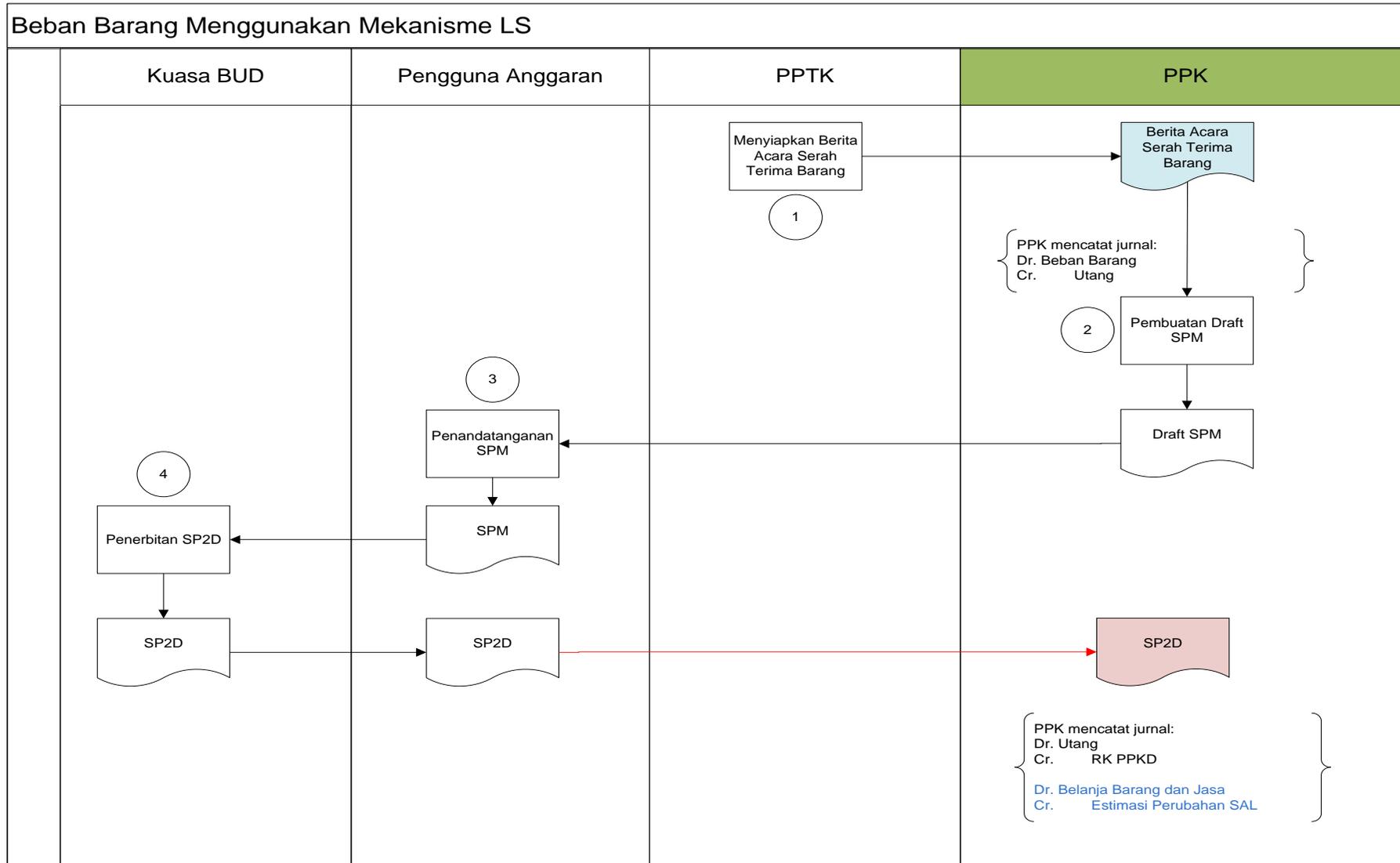
Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, bagian verifikasi dan akuntansi mencatat "Beban Persediaan" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit dengan jurnal :

Beban Persediaan	xxx
Kas di bendahara pengeluaran	xxx

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, bagian verifikasi dan akuntansi mencatat "Belanja Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa....	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

**b. Beban Barang Menggunakan Mekanisme LS**



- a. PPTK menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara tersebut selanjutnya disampaikan kepada PPK untuk diverifikasi. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, PPK SKPD mencatat pengakuan beban dengan jurnal "Beban Barang dan Jasa" di debit dan "Utang Beban Barang dan Jasa" di kredit.

Beban Barang dan Jasa	xxx
Utang Beban Barang dan Jasa	xxx

- b. Kemudian, PPK SKPD membuat Draft SPM yang selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani SPM lalu menyerahkannya ke Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D. Kuasa BUD kemudian menerbitkan SP2D dan mendistribusikannya kepada Penggunaan Anggaran dan PPK SKPD. Berdasarkan salinan SP2D LS Barang tersebut, PPK SKPD mencatat transaksi belanja gaji dengan menjurnal "Utang Beban Barang dan Jasa" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

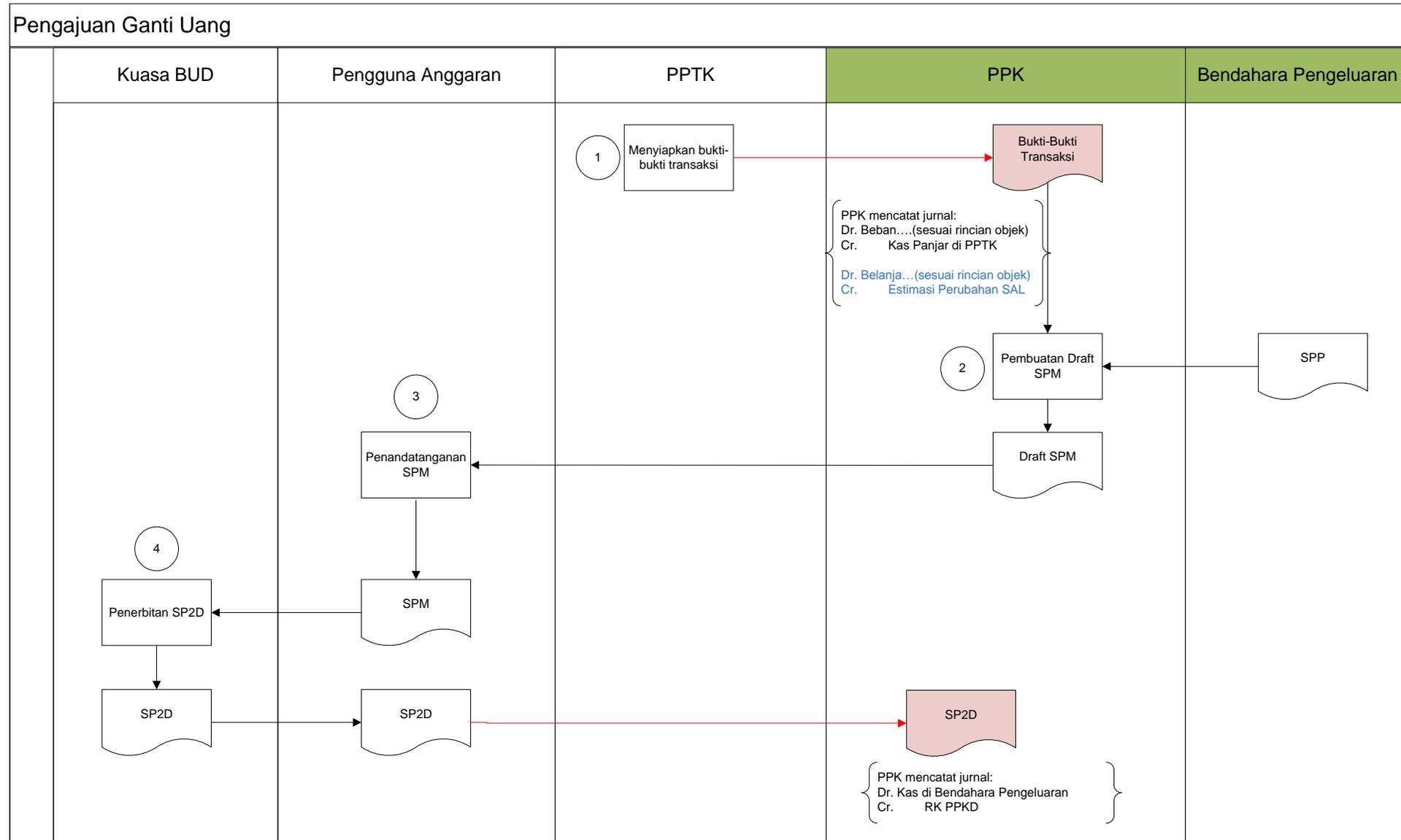
Utang Beban Baran g dan Jasa	xxx
RK PPKD	xxx

- c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Barang dan Jasa" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Belanja Barang dan Jasa	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

Belanja barang tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan.

**c. Pengajuan Ganti Uang**



PPTK akan menyiapkan bukti-bukti transaksi dan menyerahkannya kepada PPK SKPD. Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPP GU kepada PPK SKPD. Kemudian PPK SKPD akan membuat draft SPM berdasarkan SPP GU dari Bendahara Pengeluaran dan bukti-bukti transaksi dari PPTK. Draft tersebut akan diserahkan ke Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran kemudian akan menandatangani SPM GU dan menyerahkannya ke Kuasa BUD. Kuasa BUD kemudian akan menerbitkan SP2D GU dan menyerahkannya kembali kepada Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran akan mendistribusikannya ke PPK. PPK akan mencatat penerimaan GU dengan membuat jurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "RK PPKD" di kredit.

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
RK PPKD	xxx

**d. Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran**

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah, PPK-SKPD akan mencatat "Beban Sewa" untuk mencatat beban tahun berkenaan dan "Beban Sewa Dibayar di Muka" untuk mencatat sisanya di debit dan "RK PPKD" di kredit dengan jurnal:

Beban Sewa Dibayar di Muka	xxx
RK PPKD	xxx

**3. PENGEMBALIAN BEBAN**

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK SKPD melakukan pencatatan dengan menjurnal "Kas di Bendahara Pengeluaran" di debit dan "Beban (sesuai rincian obyek yang terkait)" di kredit.

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Beban_____	xxx

Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat koreksi belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA

dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Belanja (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Belanja_____	xxx

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di **periode sebelumnya** (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang.

Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, PPK SKPD melakukan pencatatan dengan menjurnal “RK PPKD” di debit dan “Beban (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

RK PPKD	xxx
Beban_____	xxx

Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat koreksi belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Belanja (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Belanja_____	xxx

Dalam hal *pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang*, PPK SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan lain-lain - LO” di kredit untuk basis akrual. Untuk basis kas, PPKD menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan lain-lain – LRA” di kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Lain-Lain-LRA	xxx

**D. CONTOH PENJURNALAN**

1. Pada tanggal 1 Februari 2014, BUD Kabupaten Serang menerbitkan SP2D LS Gaji sebesar Rp 150.000.000 dengan rincian Gaji Pokok sebesar Rp 100.000.000 dan Tunjangan Keluarga sebesar Rp 50.000.000
2. Pada tanggal 20 Maret 2013, SKPD Kabupaten Serang membayar pembelian makanan dan minuman rapat dengan uang UP sebesar Rp 2.000.000.
3. Pada tanggal 10 Juli 2013, BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar ATK sebesar Rp 850.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BUKU JURNAL SKPD**

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	01-Feb-13	SP2D 01/14	9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok	100.000.000	
			9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga	50.000.000	
			3.1.3.01.01	RK PPKD		150.000.000
			5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	100.000.000	
			5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	50.000.000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		150.000.000
2	20-Mar-13	SP2D 02/13	3.1.2.05.01	Beban Makan Minum Rapat	2.000.000	
			1.1.3.01.01	Kas di Bendaharan Pengeluaran		2.000.000
			3.1.2.05.01	Belanja Makan Minum Rapat	2.000.000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		2.000.000
3	10-Juli-13		9.1.2.01.01	Beban Alat Tulis Kantor	850.000.000	
			3.1.3.01.01	RK PPKD		850.000.000
			5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000.000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		850.000.000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Daftar barang/honor
2. Nota Permintaan Dana (NPD)
3. Bukti Pembayaran Gaji/ Barang/Jasa
4. Berita Serah Terima Barang
5. Surat Perintah Pembayaran (SPP)
6. Surat Perintah Membayar (SPM)
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

## AKUNTANSI ASET

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Akuntansi Aset Lancar

Prosedur akuntansi aset lancar pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai aset lancar yang dimiliki SKPD seperti kas dan piutang.

Ketika terjadi transaksi penerimaan kas dari suatu pendapatan, PPK akan mengakui adanya penambahan nilai kas yang dimiliki dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” pada sisi debit dan “Pendapatan....-LO (sesuai rincian objek)” di kredit.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Pendapatan ...-LO	xxx

Aset lancar lainnya, yakni piutang dipengaruhi oleh suatu transaksi dimana hak Pemda atas suatu pendapatan sudah dapat diakui namun kas belum diterima. Atas transaksi tersebut, PPK akan mencatat “Piutang ... (sesuai rincian objek)” di debit dan “Pendapatan...-LO (sesuai rincian objek)” di kredit.

Piutang....	xxx
Pendapatan ...-LO	xxx

Selanjutnya, ketika kas atas pendapatan yang telah diakui tersebut diterima, PPK akan menghapus piutang dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang... (sesuai rincian objek)” di kredit.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Piutang....	xxx

#### 2. Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset tetap pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap.

Untuk setiap transaksi yang menyebabkan penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap, PPK membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi yang berupa:

- a. Berita acara penerimaan barang, dan/atau
- b. Berita acara serah terima barang, dan/atau
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan

Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

1. Jenis/nama aset tetap
2. Kode rekening terkait
3. Klasifikasi aset tetap
4. Nilai aset tetap
5. Tanggal transaksi

Contoh format bukti memorial adalah sebagai berikut:

BUKTI MEMORIAL ASET TETAP					
SKPD :					
Tanggal Transaksi :		<i>Penambahan/Pengurangan Aset Tetap <sup>*)</sup></i>			
Kode Rekening	Jenis>Nama Aset Tetap	Klasifikasi Aset Tetap	Nilai (Rp.)	Bukti Transaksi	Keterangan

<sup>\*)</sup> coret salah satu

Berdasarkan bukti memorial tersebut, PPK akan membuat jurnal.

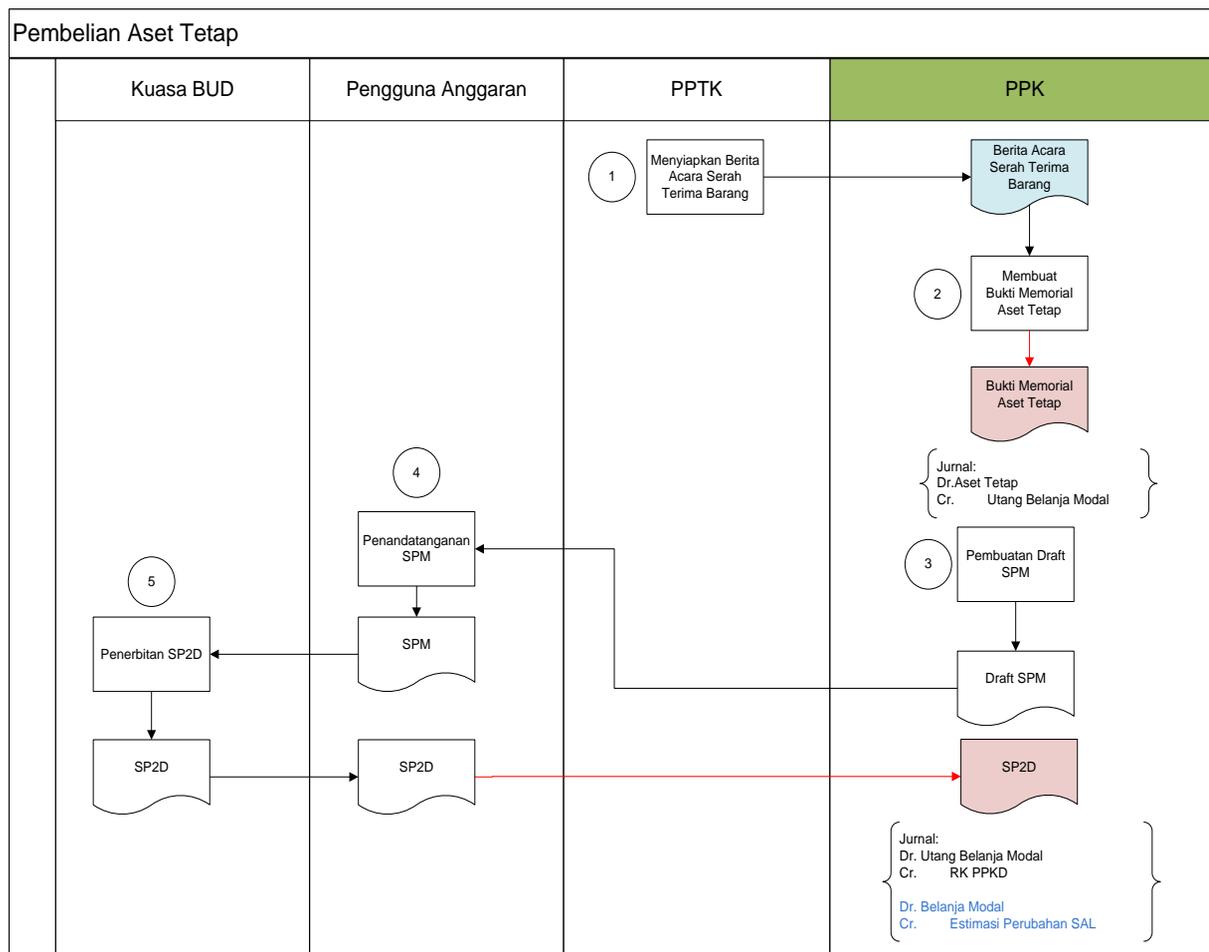
## B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset adalah:

1. Kuasa BUD Kabupaten Serang
2. PPKD Kabupaten Serang
3. Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Serang
4. Pengelola Barang SKPD Kabupaten Serang
5. PPTK SKPD Kabupaten Serang
6. Kepala Pejabat penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kabupaten Serang

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

**1. Pembelian Aset Tetap**



- a. Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap. Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal "Aset Tetap" di debit dan "Utang Belanja Modal" di kredit.

Aset Tetap_____	xxx
Utang	xxx

- b. Selanjutnya, PPK SKPD membuat draft SPM LS Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Berdasarkan SPM LS Barang dan Jasa yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS Barang dan Jasa. Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa tersebut, PPK SKPD akan menghapus utang atas

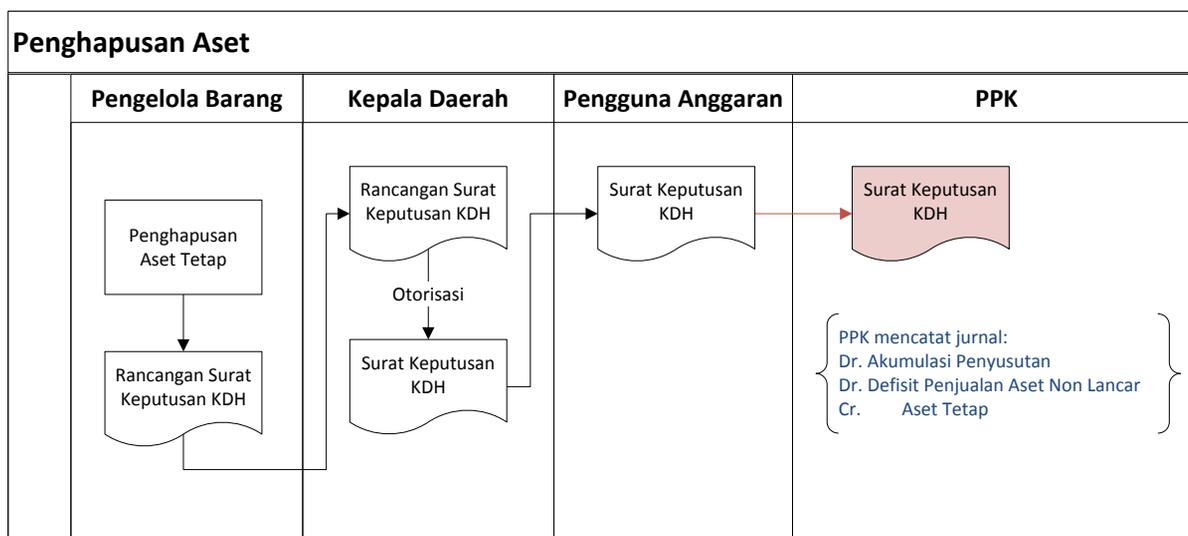
pembelian aset tetap dengan menjurnal "Utang Belanja Modal" di debit dan "RK PPKD" di kredit pada buku jurnal.

Utang	xxx
RK PPKD	xxx

- c. Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai jenisnya)" di debit dan "Estimasi Perubahan SAL" di kredit.

Belanja Modal _____	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

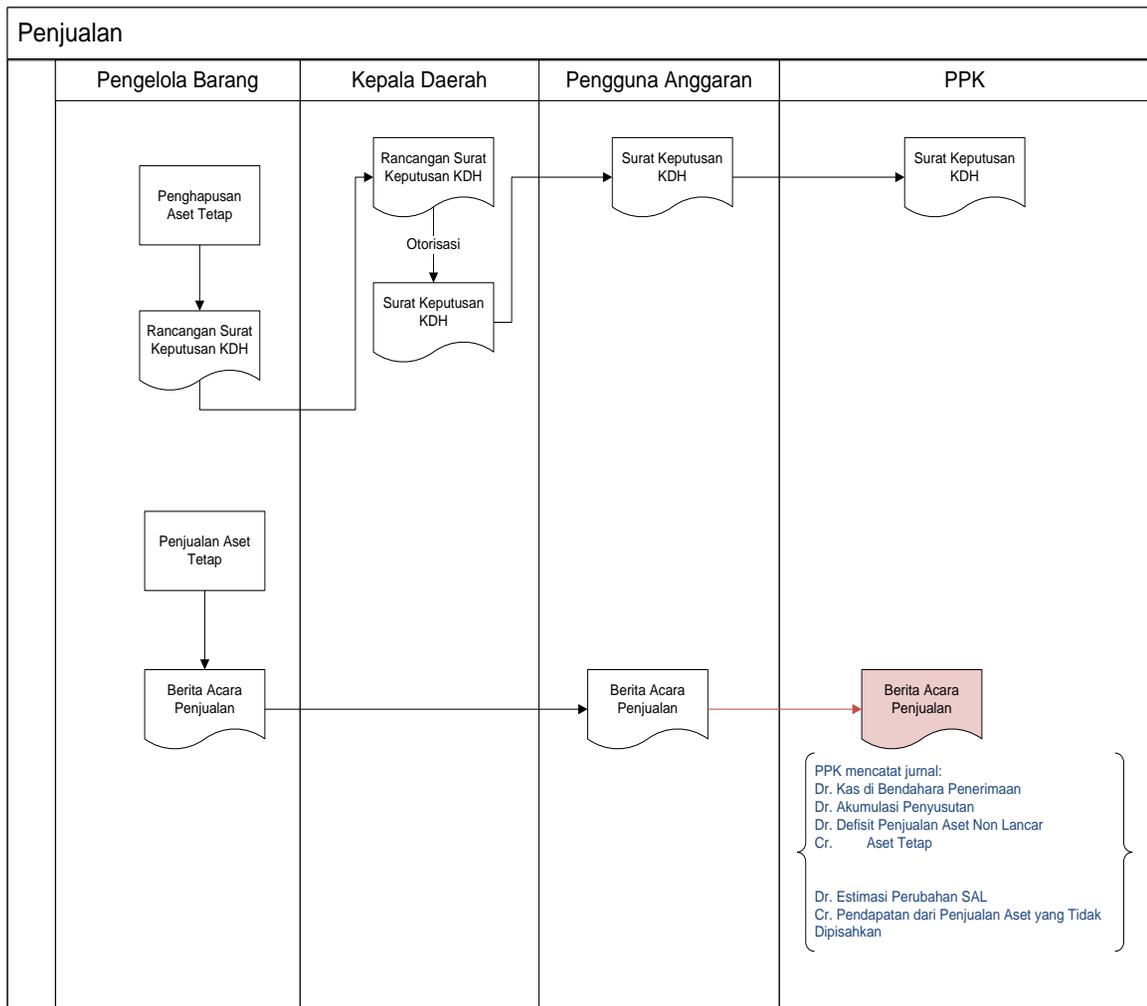
## 2. Penghapusan Aset Tetap



Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, Selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka PPK akan melakukan penghapusan aset tetap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan" dan "Defisit Penjualan Aset Non Lancar" di debit dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit.

Akumulasi Penyusutan	xxx
Defisit Penjualan Aset Non lancar	xxx
Aset _____	xxx

### 3. Penjualan Aset Tetap



Dalam kasus penjualan aset tetap, maka bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh PPK SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan", "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap", serta "Defisit Penjualan Aset Nonlancar" di debet dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx
Aset _____	xxx

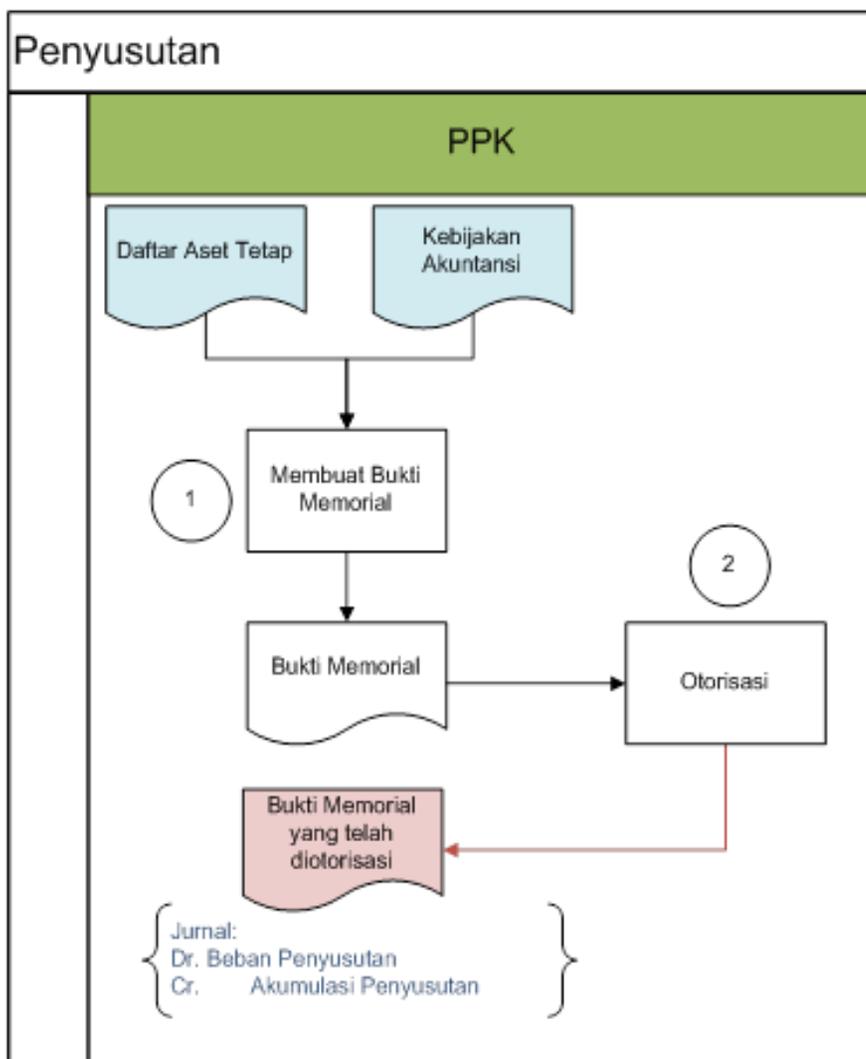
Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut maka PPK Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara Penerimaan" dan "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap" di debet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan "Aset sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal.

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx
Aset _____	xxx

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK SKPD perlu mencatat transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan Sal dengan menjurnal "Estimasi Perubahan SAL" pada sisi debet, dan "Pendapatan dari Aset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit.

Estimasi Perubahan SAL	xxx
Pendapatan dari Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	xxx

#### 4. Penyusutan Aset Tetap



Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal "Beban Penyusutan" di debit dan "Akumulasi penyusutan" di kredit di jurnal umum.

Beban penyusutan	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx

Ada beberapa kasus terkait penyusutan yang terjadi di lapangan, di antaranya:

a. Penyusutan untuk aset yang diperoleh pada periode berjalan

Pemerintah daerah sering kali membeli aset tetap di periode berjalan tahun anggaran. Terkait hal tersebut maka perhitungan penyusutan dimulai dengan menghitung penyusutan aset satu tahun penuh, kemudian beban penyusutan tersebut diprorata sesuai dengan waktu pembelian hingga berakhir tahun anggaran. Perhitungan ini hanya berlaku untuk tahun anggaran saat pembelian aset tersebut sehingga untuk tahun anggaran selanjutnya perhitungan penuh satu tahun. Berikut adalah contoh perhitungannya:

Pada tanggal 03 April 2014 Pemda Serang membeli kendaraan dinas seharga Rp 200.000.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Berapakah beban penyusutan pada tahun 2015?

$$\text{Beban penyusutan 1 tahun penuh} = \frac{200.000.000}{5} = 40.000.000$$

Jadi, beban penyusutan untuk tahun anggaran 2015 adalah Rp 40.000.000

b. Penyusutan untuk aset yang mengalami penambahan masa manfaat

Terkait dengan pengelolaan aset tetap, ada kalanya Pemerintah Daerah Serang melakukan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ada pengeluaran tersebut menambah nilai tercatat aset tetap yang dimaksud sehingga hal ini berpengaruh pada beban penyusutan atas aset tersebut.

Untuk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat maka beban penyusutan untuk aset tersebut adalah sebesar nilai tercatat aset dibagi masa manfaat aset yang belum digunakan. Berikut adalah contoh perhitungannya:

Awal tahun 2008 Pemda Serang membeli gedung seharga Rp 850.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun. Tahun 2015 Pemda Serang melakukan renovasi atas gedung tersebut sehingga menambah masa manfaat gedung menjadi 15 tahun. Berapakah beban penyusutan pada tahun 2015?

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai tercatat aset tahun 2015} &= \text{Nilai Perolehan} - \text{Beban Penyusutan selama tahun 2008-2014} \\
 &= 850.000.000 - \left( 7 \times \frac{850.000.000}{10} \right) \\
 &= 255.000.000 \\
 \text{Beban penyusutan tahun 2015} &= \frac{\text{Nilai tercatat aset tahun 2015}}{\text{Sisa Masa Manfaat yang belum digunakan}} \\
 &= \frac{255.000.000}{8} \\
 &= 31.875.000
 \end{aligned}$$

Jadi beban penyusutan pada tahun 2015 adalah Rp 31.875.000

c. Penyusutan untuk aset yang sudah lewat masa tahunnya

Kasus lain terkait beban penyusutan adalah penyusutan untuk aset yang sudah lewat masa tahunnya. Pada tahun 2015 Pemda serang memiliki beberapa aset tetap yang masa manfaatnya habis ditahun tersebut, maka untuk beban penyusutan sebelum tahun tersebut Pemda Serang harus mengakui sebagai akumulasi penyusutan. Berikut adalah contoh perhitungannya:

Pemda Serang pada tahun 2011 membeli mobil dinas seharga 200.000.000 dengan masa manfaat 5 tahun.

Maka, tahun 2015 pemda serang mengakui beban penyusutan sebesar 40.00.000 dengan jurnal sebagai berikut:

Beban penyusutan	40.000.0000
Akumulasi penyusutan	40.000.000

Sedangkan beban penyusutan 4 tahun yang sudah lewat diakui sebagai ekuitas degnan jurnal sebagai berikut:

Ekuitas	160.000.0000
Akumulasi Penyusutan	160.000.000

#### D. CONTOH PENJURNALAN

1. Pada tanggal 15 Januari 2013, PPK SKPD Kabupaten Serang menerima Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK atas pembelian sebuah mobil sedan dinas dengan perincian sebagai berikut:

- o Harga beli Rp 220 juta
- o Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp 2 juta
- o Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung Rp 3 juta

SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 2013.

2. Pada tanggal 10 April 2013, PPTK kegiatan Kabupaten Serang melakukan pembelian satu buah mesin fotokopi seharga Rp 15.000.000 menggunakan uang persediaan.

3. Pada tanggal 30 Desember 2013, dikeluarkan SK Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Di dalam SK tersebut, terdapat aset tetap SKPD Sentosa yang ikut dihapus, yaitu:

Jumlah	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan per unit	Akumulasi Penyusutan	Keterangan
2 unit	Komputer	2005	2.500.000	2.000.000	Dimusnahkan
1 unit	Mobil Kijang	2003	85.000.000	75.000.000	Akan Dijual

Transaksi-transaksi tersebut di atas akan dijurnal oleh PPK-SKPD sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BUKU JURNAL SKPD**

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	15-Jan-13	BAST 01/13	1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	225,000,000	
			2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		225,000,000
	21-Jan-13	SP2D LS 03/13	2.1.5.03.02	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225,000,000	
			3.1.3.01.01	RK PPKD		225,000,000
			5.2.2.04.01	Belanja modal pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	225,000,000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		225,000,000
2	10-Apr-13	Kuitansi 11/13	1.3.2.14.08	Mesin Fotocopy	15,000,000	
			1.1.1.03.01	Kas di Bend Pengeluaran		15,000,000
			5.2.2.14.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	15,000,000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		15,000,000
3a	30-Dec-13	SK KDH 11/13	1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	2,000,000	
			9.3.1.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	500,000	
			1.3.2.16.02	Personal Komputer		2,500,000
3b	30-Dec-13	SK KDH 11/13	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	75,000,000	
			3.1.3.01.01	RK PPKD	10,000,000	
			1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		85,000,000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Berita Acara Serah Terima Barang
2. Bukti Memorial
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Surat Keputusan KDH
6. Berita Acara Penjualan

## AKUNTANSI KEWAJIBAN

### A. KETENTUAN UMUM

Akuntansi kewajiban pada bagian ini meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban jangka pendek bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Kewajiban jangka pendek pada SKPD dapat timbul akibat beban yang belum dibayar.

### B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban adalah:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kabupten Serang
2. Bendahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Serang
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Kabupaten Serang

### C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan menangguhkan pembayarannya, maka PPK SKPD akan mengakui adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat "Beban...(sesuai rincian objek)" pada sisi debit dan "Utang" pada sisi kredit.

Beban....	xxx
Utang	xxx

Dalam kasus pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK SKPD adalah "Aset Tetap" di debit dan "Utang" di kredit.

Aset Tetap	xxx
Utang	xxx

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK SKPD akan menghapus utang tersebut dengan menjurnal "Utang" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau "RK PPKD" (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit.

Utang	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Atau

Utang	xxx
RK PPKD	xxx

**D. CONTOH PENJURNALAN**

1. Pada tanggal 21 Maret 2013, SKPD Kabupaten Serang menerima 100 eksemplar peraturan daerah dari percetakan senilai Rp 15.000.000, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 30 Maret 2013, SKPD N membayar belanja cetak tersebut kepada supplier menggunakan uang UP.
2. Pada tanggal 1 April 2013, SKPD Kabupaten Serang menerima 2 unit komputer dari vendor senilai Rp 15.000.000. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 10 April 2013.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BUKU JURNAL SKPD**

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	21-Mar	9/BA/III/13	9.1.2.06.01	Beban Cetak	15,000,000	
			2.1.5.02.10	Utang Belanja Cetak		15,000,000
	30-Mar	15/KK/III/13	2.1.5.02.10	Utang Belanja Cetak	15,000,000	
			1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		15,000,000
			5.1.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		5,000,000
2	1-Apr	3/BA/IV/13	1.3.2.16.02	Personal Komputer	15,000,000	
			2.1.5.03.02	Utang Belanja Peralatan dan Mesin		15,000,000
	7-Apr	10/KK/IV/2013	2.1.5.03.02	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	15,000,000	
			3.1.3.01.01	RK PPKD		15,000,000
			5.2.2.16.08	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15,000,000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		15,000,000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Berita Acara Serah Terima Barang
2. Bukti Pembayaran
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

## **JURNAL PENYESUAIAN DAN KOREKSI**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Prosedur pencatatan jurnal penyesuaian dan koreksi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian yang bersifat koreksi dan penyesuaian atas akun-akun terkait yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, yang meliputi:

#### **1. Koreksi Kesalahan Pencatatan**

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah *diposting* ke buku besar.

#### **2. Penyesuaian Persediaan**

Merupakan pengakuan terhadap persediaan yang dimiliki oleh SKPD

#### **3. Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka**

Merupakan pengakuan terhadap sewa dibayar dimuka yang dimiliki oleh SKPD

#### **4. Penyesuaian Piutang**

Merupakan penyesuaian terhadap piutang yang dimiliki oleh SKPD berdasarkan *net realizable value*

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi di atas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

PPK, berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas akan membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

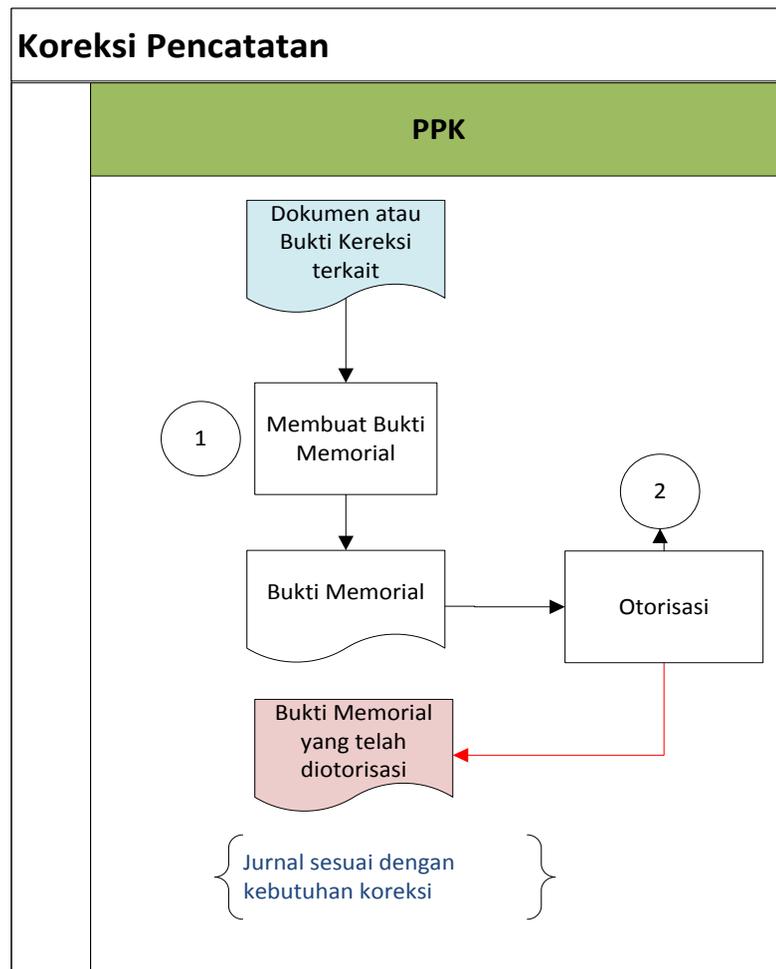
### **B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jurnal penyesuaian dan koreksi adalah:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kabupaten Serang
2. Pihak yang melakukan *Stock Opname* SKPD Kabupaten Serang

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

**1. Koreksi kesalahan pencatatan**



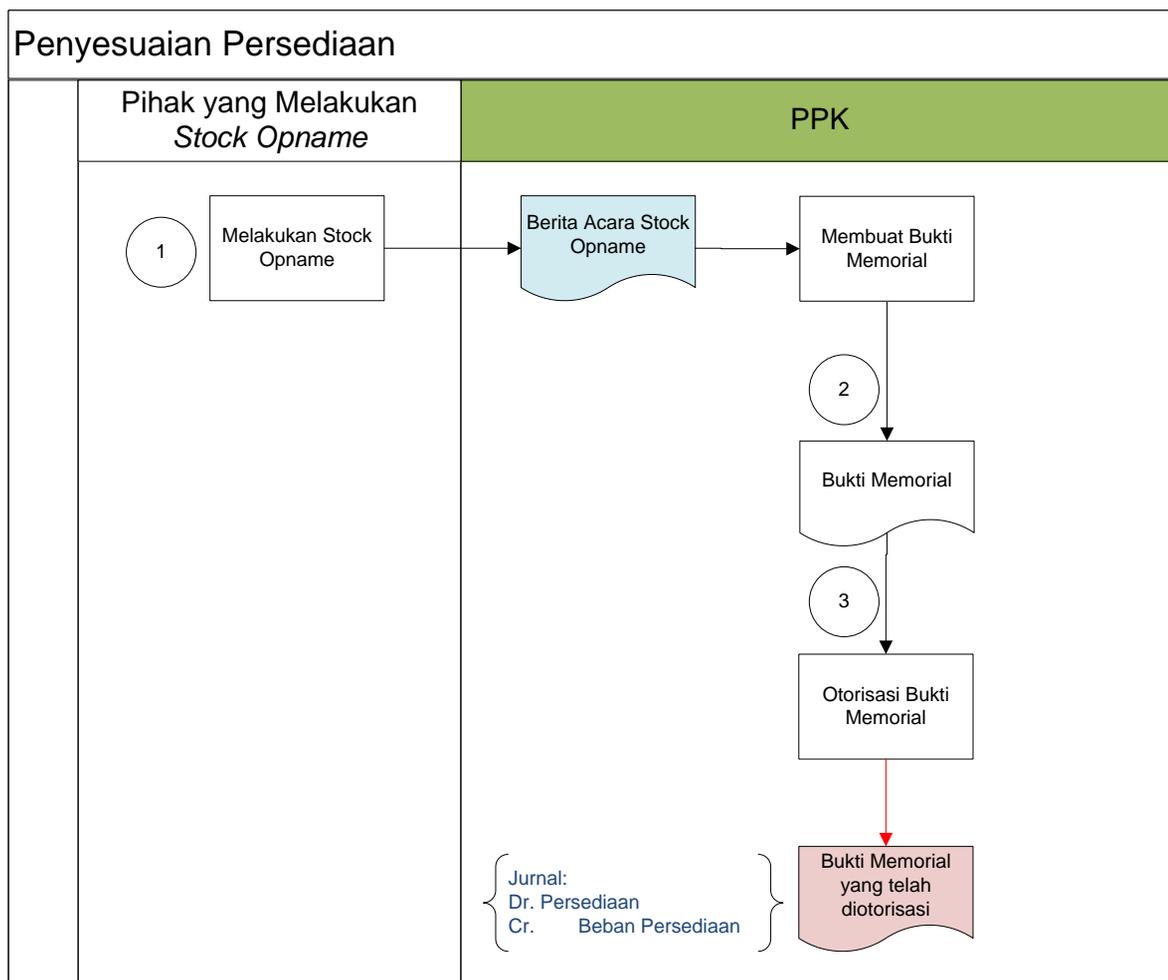
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh PPK SKPD. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, PPK SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK SKPD menjurnal "Beban telepon" di debit dan "Beban listrik" di kredit.

Beban telepon	xxx
Beban listrik	xxx

Selain itu, pada saat bersamaan PPK SKPD juga perlu mencatat koreksi belanja dengan basis kas untuk memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja telepon" di debit dan "Belanja listrik" di kredit.

Belanja telepon	xxx
Belanja listrik	xxx

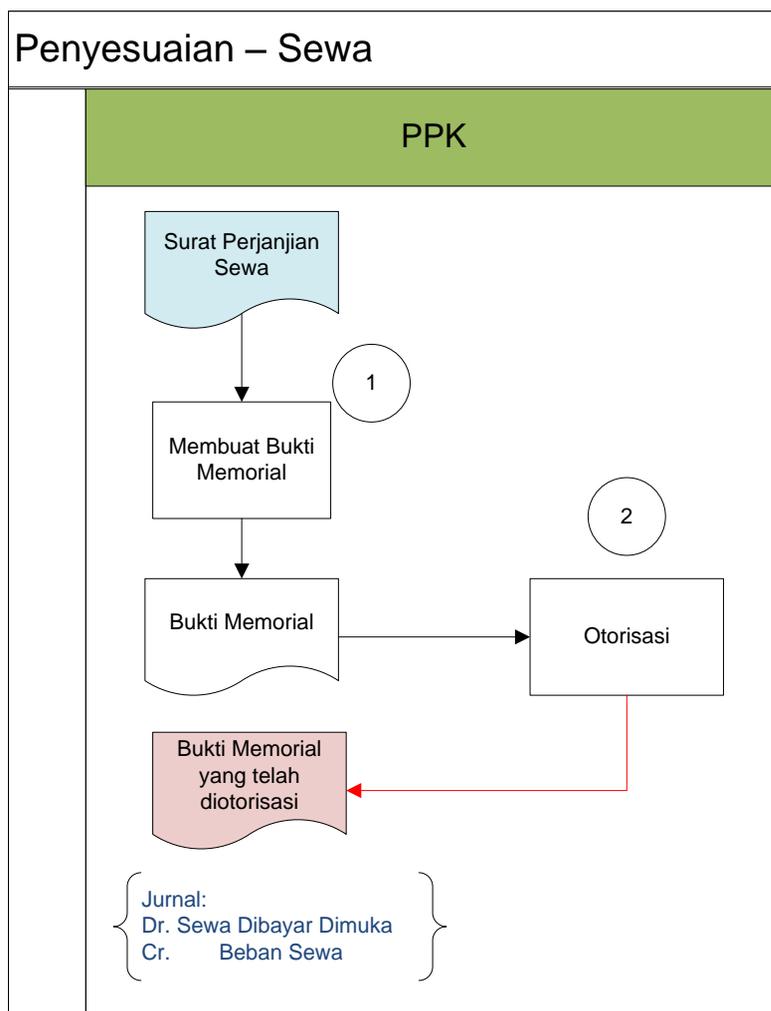
## 2. Pengakuan persediaan



Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK SKPD mengakui persediaan dengan menjurnal "Persediaan sesuai jenisnya" di debit dan "Beban Persediaan" di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir periode.

Persediaan_____	xxx
Beban Persediaan	xxx

### 3. Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka



Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh Pemda. Pada akhir tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK SKPD akan membuat bukti memorial untuk penyesuaian beban sewa. PPK SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal "Sewa dibayar di muka" di debit dan "Beban sewa" di kredit pada buku jurnal.

Sewa dibayar di muka	xxx
Beban sewa	xxx

### 4. Penyesuaian Piutang

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominalnya. Namun, tidak selamanya piutang yang dicatat bisa dilunasi oleh semua wajib bayar (debitur). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyesuaian atas piutang tidak tertagih. Hal ini dilakukan agar nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Berikut adalah klasifikasi piutang berdasarkan umur jatuh temponya. Secara lebih lengkap klasifikasi piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dapat dilihat dalam kebijakan akuntansi.

Pemda Serang harus melakukan pencatatan terkait penyisihan piutang tak tertagih dengan mencatat “Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih” di sisi debit dan “Penyisihan Piutang Tak Tertagih” di sisi kredit

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx

Berikut adalah contoh perhitungan terkait penyisihan piutang tak tertagih:

Jenis Piutang	Saldo Piutang	Lewat Jatuh tempo (bulan)			
		3	13	25	38
Pajak Reklame	50.000.000		50.000.000		
Restribusi	100.000.000	100.000.000			
TGR	150.000.000				150.000.000
PBB	25.000.000			25.000.000	
Presentase Penyisihan		0%	10%	30%	60%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	5.000.000	7.500.000	90.000.000
Jumlah Penyisihan			<b>102.500.000</b>		

Jurnal atas penyisihan tersebut adalah:

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	102.500.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	102.500.000

#### D. CONTOH PENJURNALAN

1. Tanggal 5 Januari 2014, SKPD Kabupaten Serang membayar sewa gedung kantor sebesar Rp 48.000.000 untuk sewa selama 2 tahun dengan mekanisme LS

2. Pada tanggal 31 Desember 2014 dilakukan *stock opname* persediaan ATK SKPD Kabupaten Serang dan diketahui ATK SKPD M tersisa sebesar Rp 1.000.000.
3. Pada tanggal 31 Desember 2014, dibuat jurnal untuk menyesuaikan beban sewa untuk bulan Januari.

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**BUKU JURNAL SKPD**

No	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	5-Jan-14	SP2D 01/14	9.1.2.07.02	Beban sewa gedung	48,000,000	
			3.1.3.01.01	RK PPKD		48,000,000
			5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung	48,000,000	
			3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL		48,000,000
2	31-Des-14		1.1.7.01.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	1,000,000	
			5.1.2.07.07	Beban Persediaan ATK		1,000,000
3	31-Des-14		1.1.6.03.02	Sewa Dibayar Dimuka	46,000,000	
			9.1.2.07.02	Beban Sewa gedung		46,000,000

**E. DOKUMEN TERKAIT**

1. Berita Acara *Stock Opname*
2. Bukti Memorial
3. Surat Perjanjian Sewa

## JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

### A. JURNAL

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

#### BUKU JURNAL

SKPD :					Halaman:
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	6	7

xxxx, .....

**PPK Dinas/Badan/Kantor**

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Cara pengisian:

7. **Tanggal** diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam bukti transaksi.
8. **Nomor Bukti** diisi dengan nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.
9. **Kode Rekening** diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07            Kode urusan

1.07.01        Kode organisasi

01.02          Kode Program & Kegiatan

5.2.2.03.01   Rincian obyek belanja

10. **Uraian** diisi dengan dengan uraian kode rekening, misalnya “Belanja Telepon”.
11. **Debit** diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di debit.
12. **Kredit** diisi dengan jumlah rupiah yang dijurnal di kredit.

**B. BUKU BESAR**

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BUKU BESAR**

SKPD : .....  
 KODE REKENING : .....  
 NAMA REKENING : .....  
 PAGU APBD : .....  
 PAGU PERUBAHAN APBD : .....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6

....., tanggal.....  
**PPK SKPD**  
 (tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP.

Cara pengisian:

12. **SKPD** diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.
13. **Kode Rekening** diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendapatan adalah 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01
  - 1.07 Kode urusan
  - 1.07.01 Kode organisasi
  - 01.02 Kode Program & Kegiatan
  - 5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja
14. **Nama Rekening** diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya.
15. **Pagu APBD** diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini dapat dikosongkan.

16. **Pagu Perubahan APBD** diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan.
17. **Tanggal** diisi dengan tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam jurnal yang bersangkutan.
18. **Uraian** diisi dengan dengan penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang *diposting*.
19. **Ref** diisi dengan referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa jurnal yang *diposting* tersebut.
20. **Debit** diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom debit.
21. **Kredit** diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal kolom kredit.
22. **Saldo** diisi dengan saldo akumulasi.

### C. NERACA SALDO

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**NERACA SALDO PER TANGGAL .....**

SKPD : ..... Halaman...

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit	Kredit

....., tanggal.....

**PPK SKPD**  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
NIP.

Cara pengisian:

6. **Tanggal** diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun
7. **SKPD** diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.
8. **Kode Rekening** diisi dengan kode rekening setiap buku besar.
9. **Nama Rekening** diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai kode rekeningnya.
10. **Debit** diisi dengan jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir debit.
11. **Kredit** diisi dengan jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir kredit.

## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

### A. KETENTUAN UMUM

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK. Jurnal dan *posting* yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD:



**B. PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kabupaten Serang
2. Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Serang

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS****Langkah 1 (Menyiapkan Kertas Kerja)**

PPK SKPD menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

**Format dokumen kertas kerja (*worksheet*)**

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada disetiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo (NS)		Penyesuaian		NS Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K

**Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo)**

PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja. Berikut adalah contoh proses penyusunan kertas kerja dalam SKPD Kabupaten Serang akan digunakan sebagai contoh dalam ilustrasi berikut:

**Ilustrasi Kertas Kerja SKPD Setelah Neraca Saldo**

SAPD Kabupaten Serang

**SKPD KABUPATEN SERANG**  
Neraca Saldo setelah disesuaikan per 31 Des 2014

No.	Kode Rek.	Uraian	NS Sblm Penyesuaian		Jurnal Penyesuaian		NS Stlh Penyesuaian	
							Debet	Kredit
1	1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0					
2	1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.750.000					
3	1.1.3.01	Piutang pajak	0					
4	1.1.6.01	Sewa Dibayar Dimuka	0					
5	1.1.7.01	Persediaan ATK	0					
6	1.3.2.02	Kendaraan	100.000.000					
7	1.3.3.01	Gedung Kantor	500.000.000					
8	3.0.0.00	Surplus (Defisit) - LO						
9	3.1.1.01	Ekuitas		600.000.000				
10	3.1.2.01	Estimasi Pendapatan	65.000.000					
11	3.1.2.03	Apropriasi Belanja		80.000.000				
12	3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL		49.250.000				
13	3.1.3.01	RK PPKD		73.000.000				
14	4.1.1.01	Pendapatan Pajak - LRA		40.000.000				
15	4.1.2.01	Pendapatan Retribusi - LRA		15.000.000				
16	5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok	45.000.000					
17	5.1.1.01	Belanja Tunjangan Keluarga	15.000.000					
18	5.1.1.01	Belanja Tunjangan Jabatan	10.000.000					
19	5.1.2.01	Belanja ATK	1.250.000					
20	5.1.2.07	Belanja Sewa	48.000.000					
21	8.1.1.01	Pendapatan Pajak - LO		40.000.000				
22	8.1.2.01	Pendapatan Retribusi - LO		15.000.000				
23	9.1.1.01	Beban Gaji Pokok	45.000.000					
24	9.1.1.01	Beban Tunjangan Keluarga	15.000.000					
25	9.1.1.01	Beban Tunjangan Jabatan	10.000.000					
26	9.1.2.01	Beban ATK	1.250.000					
27	9.1.2.02	Beban Sewa	48.000.000					
Total			<b>912.250.000</b>	<b>912.250.000</b>				

**Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian)**

PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
- Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (*accrual* atau *prepayment*)
- Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

Contoh jurnal penyesuaian adalah:

<b>Pengakuan</b>	_____Dibayar Dimuka	xxx
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	Beban_____	xxx
<b>Pengakuan</b>	Persediaan_____	xxx
<b>Persediaan yang ada</b>	Beban Persediaan_____	xxx

Berikut contoh proses di atas pada SKPD Kabupaten Serang:

Pada akhir tahun terdapat informasi nilai persediaan per 31 Desember adalah 1 juta dan beban sewa yang terjadi sebesar 2 juta. Di awal tahun nilai persediaan adalah 1,25 juta. Jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah sebagai berikut:

Sewa Dibayar Dimuka	46.000.000
Beban Sewa	46.000.000
Persediaan ATK	1.000.000
Beban ATK	1.000.000

**Langkah 4 (Neraca Saldo Setelah Penyesuaian)**

PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom ”Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

**Ilustrasi Kertas Kerja SKPD Setelah Penyesuaian**

SAPD Kabupaten Serang

**SKPD KABUPATEN SERANG**  
Neraca Saldo setelah disesuaikan per 31 Des 2014

No.	Kode Rek.	Uraian	NS Sblm Penyesuaian		Jurnal Penyesuaian		NS Stlh Penyesuaian	
							Debet	Kredit
1	1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0				0	
2	1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.750.000				8.750.000	
3	1.1.3.01	Piutang pajak	0				0	
4	1.1.6.01	Sewa Dibayar Dimuka	0		46.000.000		46.000.000	
5	1.1.7.01	Persediaan ATK	0		1.000.000		1.000.000	
6	1.3.2.02	Kendaraan	100.000.000				100.000.000	
7	1.3.3.01	Gedung Kantor	500.000.000				500.000.000	
8	3.0.0.00	Surplus (Defisit) - LO						
9	3.1.1.01	Ekuitas		600.000.000				600.000.000
10	3.1.2.01	Estimasi Pendapatan	65.000.000				65.000.000	
11	3.1.2.03	Apropriasi Belanja		80.000.000				80.000.000
12	3.1.2.05	Estimasi Perubahan SAL		49.250.000				49.250.000
13	3.1.3.01	RK PPKD		73.000.000				73.000.000
14	4.1.1.01	Pendapatan Pajak - LRA		40.000.000				40.000.000
15	4.1.2.01	Pendapatan Retribusi - LRA		15.000.000				15.000.000
16	5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok	45.000.000				45.000.000	
17	5.1.1.01	Belanja Tunjangan Keluarga	15.000.000				15.000.000	
18	5.1.1.01	Belanja Tunjangan Jabatan	10.000.000				10.000.000	
19	5.1.2.01	Belanja ATK	1.250.000				1.250.000	
20	5.1.2.07	Belanja Sewa	48.000.000				48.000.000	
21	8.1.1.01	Pendapatan Pajak - LO		40.000.000				40.000.000
22	8.1.2.01	Pendapatan Retribusi - LO		15.000.000				15.000.000
23	9.1.1.01	Beban Gaji Pokok	45.000.000				45.000.000	
24	9.1.1.01	Beban Tunjangan Keluarga	15.000.000				15.000.000	
25	9.1.1.01	Beban Tunjangan Jabatan	10.000.000				10.000.000	
26	9.1.2.01	Beban ATK	1.250.000			1.000.000	250.000	
27	9.1.2.02	Beban Sewa	48.000.000			46.000.000	2.000.000	
<b>Total</b>			<b>912.250.000</b>	<b>912.250.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>47.000.000</b>	<b>912.250.000</b>	<b>912.250.000</b>

**Langkah 5 (Membuat LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA)**

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat “Laporan Realisasi Anggaran”.

Berikut adalah contoh LRA SKPD Kabupaten Serang:

**SKPD KABUPATEN SERANG**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014**

	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Pajak - LRA	37.500.000	40.000.000
Pendapatan Retribusi - LRA	14.000.000	15.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>51.500.000</b>	<b>55.000.000</b>
<b>BELANJA</b>		
Belanja Gaji Pokok	45.750.000	45.000.000
Belanja Tunjangan Keluarga	16.250.000	15.000.000
Belanja Tunjangan Jabatan	10.500.000	10.000.000
Belanja ATK	1.500.000	1.250.000
Belanja Sewa	49.500.000	48.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>123.500.000</b>	<b>119.250.000</b>
<b>Surplus (Defisit) -LRA</b>		<b>(64.250.000)</b>
<b>SILPA</b>		<b>(64.250.000)</b>

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0.

<b>Penutupan LRA</b>	Pendapatan_____ - LRA	xxx
	Pendapatan_____ - LRA	xxx
	Apropriasi Belanja	xxx
	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx
	Penerimaan Pembiayaan	xxx
	Estimasi Perubahan SAL	xxx
	Belanja_____	xxx
	Belanja_____	xxx
	Estimasi Pendapatan	xxx
	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx
	Pengeluaran Pembiayaan	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Dari contoh Neraca Saldo setelah penyesuaian di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh jurnal penutupan LRA dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

### Jurnal Penutup LRA

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak - LRA	Rp 40.000.000	
Pendapatan Retribusi - LRA	Rp 15.000.000	
Apropriasi Belanja	Rp 80.000.000	
Estimasi Perubahan SAL	Rp 49.250.000	
Belanja Gaji Pokok		Rp 45.000.000
Belanja Tunjangan Keluarga		Rp 15.000.000
Belanja Tunjangan Jabatan		Rp 10.000.000
Belanja ATK		Rp 1.250.000
Belanja Sewa		Rp 48.000.000
Estimasi pendapatan		Rp 65.000.000

### SKPD KABUPATEN SERANG Neraca Saldo Setelah Penutupan LRA

No.	Kode Rek.	Uraian	NS Stlh Penyesuaian	
			Debet	Kredit
1	1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0	
2	1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.750.000	
3	1.2.04	Piutang pajak	0	
4	1.6.01	Persediaan ATK	1.000.000	
5	1.7.01	Sewa Dibayar Dimuka	46.000.000	
6	1.9.01	Kendaraan	100.000.000	
7	1.9.02	Gedung Kantor	500.000.000	
8	3.1.01	Ekuitas		600.000.000
9	3.3.01	RK PPKD		73.000.000
10	6.1.01	Pendapatan Pajak - LO		40.000.000
11	6.1.02	Pendapatan Retribusi - LO		15.000.000
12	7.1.01	Beban Gaji Pokok	45.000.000	
13	7.1.02	Beban Tunjangan Keluarga	15.000.000	
14	7.1.03	Beban Tunjangan Jabatan	10.000.000	
15	7.1.04	Beban ATK	250.000	
16	7.1.05	Beban Sewa	2.000.000	
Total			728.000.000	728.000.000

### **Langkah 6 (Membuat LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO)**

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional (kode akun 8 dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

<b>Penutupan LO</b>	Pendapatan_____ - LO	xxx
	Pendapatan_____ - LO	xxx
	Surplus (Defisit) - LO	xxx
	Belanja_____	xxx
	Belanja_____	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Dari contoh Neraca Saldo setelah Penutupan LRA di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh LO, jurnal penutupan LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

### **Laporan Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014**

<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Pajak - LO	40.000.000	
Pendapatan Retribusi - LO	15.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>55.000.000</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban Gaji Pokok	45.000.000	
Beban Tunjangan Keluarga	15.000.000	
Beban Tunjangan Jabatan	10.000.000	
Beban ATK	250.000	
Beban Sewa	2.000.000	
<b>Jumlah Beban</b>		<b>72.250.000</b>
<b>Surplus (Defisit) - LO</b>		<b>(17.250.000)</b>

### Jurnal Penutup LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak - LO	Rp 45.000.000	
Pendapatan Retribusi - LO	Rp 15.000.000	
Surplus (defisit) - LO	Rp 17.250.000	
Beban Gaji Pokok		Rp 45.000.000
Beban Tunjangan Keluarga		Rp 15.000.000
Beban Tunjangan Jabatan		Rp 10.000.000
Beban ATK		Rp 250.000
Beban Sewa		Rp 2.000.000

### SKPD KABUPATEN SERANG Neraca Saldo Setelah Penutupan LO

No.	Kode Rek.	Uraian	NS Stlh Penyesuaian	
			Debet	Kredit
1	1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0	
2	1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.750.000	
3	1.2.04	Piutang pajak	0	
4	1.6.01	Persediaan ATK	1.000.000	
5	1.7.01	Sewa Dibayar Dimuka	46.000.000	
6	1.9.01	Kendaraan	100.000.000	
7	1.9.02	Gedung Kantor	500.000.000	
8	3.0.00	Surplus (Defisit) LO	17.250.000	
9	3.1.01	Ekuitas		600.000.000
10	3.3.01	RK PPKD		73.000.000
Total			673.000.000	673.000.000

### **Langkah 7 (Membuat Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir)**

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas.

<b>Penutupan akhir</b>	Surplus (Defisit)	xxx
	Ekuitas	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Dari contoh Neraca Saldo setelah Penutupan LO di atas, pada halaman berikutnya akan disajikan contoh Neraca, jurnal penutupan akhir dan Neraca Saldo Akhir.

**SKPD KABUPATEN SERANG**

**Neraca**

**Per 31 Desember 2014**

URAIAN	Jumlah
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Penerimaan	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.750.000
Persediaan ATK	1.000.000
Sewa Dibayar Dimuka	46.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>55.750.000</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Kendaraan	100.000.000
Gedung dan Bangunan	500.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>600.000.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>655.750.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	
Surplus (Defisit) - LO	(17.250.000)
Ekuitas	600.000.000
RK PPKD	73.000.000
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>655.750.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>655.750.000</b>

**Jurnal Penutup Akhir**

Uraian	Debet	Kredit
RK PPKD	Rp 73.000.000	
Surplus (Defisit) - LO		Rp 17.250.000
Ekuitas		Rp 55.750.000

**SKPD KABUPATEN SERANG**  
**Neraca Saldo Akhir**

No.	Kode Rek.	Uraian	NS Akhir	
			Debet	Kredit
1	1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0	
2	1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.750.000	
3	1.2.04	Piutang pajak	0	
4	1.6.01	Persediaan ATK	1.000.000	
5	1.7.01	Sewa Dibayar Dimuka	46.000.000	
6	1.9.01	Kendaraan	100.000.000	
7	1.9.02	Gedung Kantor	500.000.000	
8	3.1.01	Ekuitas		655.750.000
<b>Total</b>			<b>655.750.000</b>	<b>655.750.000</b>

**Langkah 8 (Membuat Laporan Perubahan Ekuitas)**

Selanjutnya, PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

**SKPD KABUPATEN SERANG**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014**

URAIAN	2014
EKUITAS AWAL	600.000.000
RK PPDK	73.000.000
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(17.250.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>655.750.000</b>

**Langkah 9 (Membuat Catatan atas Laporan Keuangan)**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,

dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan
----------------------------------

**SKPD KABUPATEN SERANG**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemda
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemda
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Pemda	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemda	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemda
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Pemda
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemda
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemda	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Beban
	5.1.3	Belanja
	5.1.4	Aset
	5.1.5	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda	
Bab VII	Penutup	

Surat Pertanyaan Tanggung Jawab

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA SKPD  
DINAS/BADAN/KANTOR.....**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor..... Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas/Badan/Kantor

(.....)  
NIP.

  
BUPATI SERANG,  
  
A. TAUFIK NURIMAN